

**INTERVENSI PIHAK KETIGA: STRATEGI TIONGKOK DALAM KASUS SUDAN
SELATAN**

SKRIPSI

*Diajukan sebagai salah satu syarat
dalam memperoleh gelar Sarjana Ilmu Politik pada
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik*

Universitas Andalas



Oleh:

ERTI FADHILAH PUTRI

1510852021

**JURUSAN ILMU HUBUNGAN INTERNASIONAL
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS ANDALAS**

PADANG

2019

**JURUSAN ILMU HUBUNGAN INTERNASIONAL
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS ANDALAS PADANG**

LEMBAR PERSETUJUAN SKRIPSI

Skripsi ini telah diperiksa dan disetujui oleh dosen pembimbing

Nama : Erti Fadhillah Putri

No. BP : 1510852021

Jurusan : Ilmu Hubungan Internasional

Judul Skripsi : Intervensi Pihak Ketiga: Strategi Tiongkok Dalam Kasus Sudan Selatan.

Pembimbing

Pembimbing I



Haiyyu Darman Moenir, S.IP, M.Si

NIP. 198012212010121003

Pembimbing II



Ardila Putri, S.IP, MA

Mengetahui

Ketua Jurusan Ilmu Hubungan Internasional

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Universitas Andalas



Haiyyu Darman Moenir, S.IP, M.Si

NIP. 198012212010121003


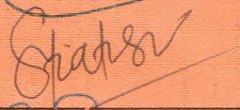
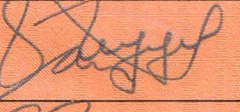
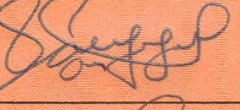

**JURUSAN ILMU HUBUNGAN INTERNASIONAL
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS ANDALAS**

LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI

Skripsi ini telah diuji dan dipertahankan di depan tim penguji serta diterima untuk memenuhi sebagian persyaratan guna memperoleh gelar Sarjana Ilmu Politik pada:

Hari/Tanggal : Jumat/11 Januari 2019;
Jam : 16.00-17.30;
Tempat : Ruang Sidang Jurusan Ilmu Hubungan Internasional
Gedung Jurusan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu
Politik Lantai 2.


Tim Penguji

Nomor	Nama	Jabatan	Tanda Tangan
1	Dr. Indraddin, M.Si. NIP. 1967111301999031001	Ketua	
2	Sofia Trisni, S.IP., MA (IntRel). NIP. 198210182015042002	Sekretaris	
3	Rika Isnarti, S.IP., MA (IntRel)	Anggota	
4	Haiyyu Darman Moenir, S.IP, M.Si NIP. 198012212010121003	Anggota	
5	Ardila Putri, S.IP, MA	Anggota	

Mengetahui,

Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Universitas Andalas


Dr. Alfian Miko, M.Si.
NIP. 196206211988111001

SURAT PERNYATAAN


Dengan ini saya menyatakan bahwa:

1. Karya tulis yang berjudul **“Intervensi Pihak Ketiga: Strategi Tiongkok Dalam Kasus Sudan Selatan.”** ini belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik (sarjana, magister, dan/atau doktor), baik di Universitas Andalas maupun di perguruan tinggi lainnya.
2. Karya tulis ini murni gagasan, penilaian, dan perumusan saya sendiri, kecuali bantuan dan arahan dari pihak-pihak yang disebutkan di dalam kata pengantar.
3. Dalam karya tulis ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah ditulis ataupun dipublikasikan orang lain, kecuali secara tertulis dengan jelas yang dicantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan disebutkan nama pengarang dan dicantumkan di dalam Daftar Pustaka.
4. Pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya dan apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar yang telah diperoleh karena karya tulis ini, serta sanksi lainnya sesuai dengan norma yang berlaku di perguruan tinggi ini.

Padang, 21 Januari 2019



Yang Menyatakan


Erti Fadhillah Putri
NIM. 1510852014

HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
TUGAS AKHIR UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Saya mahasiswa Universitas Andalas yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama Lengkap : Erti Fadhilah Putri

Np. BP/NIM/NIDN : 1510852021

Jurusan : Ilmu Hubungan Internasional

Fakultas : Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Jenis Tugas Akhir : Skripsi

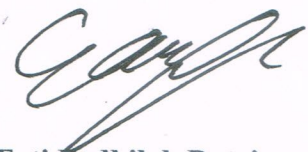
Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Andalas hak atas publikasi dari tugas akhir saya yang berjudul:

“Intervensi Pihak Ketiga: Strategi Tiongkok Dalam Kasus Sudan Selatan.”

Beserta perangkat yang ada (jika diperlukan). Universitas Andalas juga berhak untuk menyimpan, mengalih media/formatkan, mengelola, merawat dan mempublikasikan karya saya tersebut selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik hak cipta. Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Padang 21 Januari 2019

Yang Menyatakan,



Erti Fadhilah Putri
NIM: 1510852021

KATA PENGANTAR



Puji syukur kehadiran Allah SWT yang telah memberikan keberkahan serta rahmat-Nya kepada penulis untuk menyelesaikan skripsi yang berjudul; ***“Intervensi Pihak Ketiga: Strategi Tiongkok Dalam Kasus Sudan Selatan.”***. Skripsi ini dibuat untuk melengkapi serta memenuhi syarat-syarat mencapai gelar sarjana Strata Satu (S-1) pada Jurusan Ilmu Hubungan Internasional, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Andalas.

Penyelesaian skripsi ini tidak lepas dari peran berbagai pihak di lingkungan Universitas Andalas maupun lingkungan luar yang turut memberikan semangat dalam pencapaian kesuksesan. Penulis sangat menghargai dukungan moral dan material dalam penyelesaian skripsi ini. Dengan demikian, penulis mengucapkan terima kasih kepada beberapa pihak sebagai berikut:

1. Kedua Orang tua tercinta, Asnawati dan Ersansa Putra yang telah memberikan dukungan secara moril dan materi terhadap proses perkuliahan penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan pendidikan untuk memperoleh gelar sarjana ini.
2. Bapak Haiyyu Darman Moenir, S.IP, M.Si sebagai Dosen Pembimbing I dan Ibu Ardila Putri, S.IP, MA sebagai Dosen Pembimbing II yang memiliki kontribusi besar dalam penyelesaian skripsi penulis, yakni seperti telah meluangkan waktu untuk penulis agar mudah untuk berkonsultasi, memberikan saran dan nasihat kepada penulis dalam pengarahannya yang lebih baik pada penyelesaian skripsi ini.
3. Bapak Dr. Indraddin, M.Si., Ibu Sofia Trisni, S.IP, MA (IntRel), dan Ibu Rika Isnarti, S.IP., MA (IntRel) selaku Dosen Penguji. Adapun kritik dan saran kepada penulis telah membangun dan memudahkan penulis untuk menyempurnakan penulisan skripsi ini.

4. Seluruh Civitas Akademika Jurusan Ilmu Hubungan Internasional Universitas Andalas, , Ibu Anita Sinulingga, S.IP, M.Si, bapak Apriwan, S.Sos., MA, bapak Poppy Irawan, S.IP, MA.IR, bapak Virtuous Setyaka, S.IP, M.Si, bapak Zulkifli Harza S.IP, M.Soc.Sc, bapak Muhammad Yusra, S.IP, MA, Ibu Maryam Jamilah S.IP, M.Si, bapak Bima Jon Nanda, S.IP, MA, Inda Mustika Permata, S.IP, MA yang telah memberikan banyak ilmu pengetahuan kepada penulis selama perkuliahan.
5. Bapak Hendri (almarhum) dan Reza Reshita yang telah membantu administrasi perkuliahan penulis selama di kampus.
6. Ujuk Zaitun dan Om Anto yang telah memberikan dukungan secara moril dan materi terhadap proses perkuliahan penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan pendidikan untuk memperoleh gelar sarjana ini
7. Saudari penulis, Asti Kumala Putri dan Anissa Mayada Sari yang telah memberikan dukungan materi terhadap proses perkuliahan dan skripsi. Sehingga penulis dapat dengan tenang mengerjakan skripsi dan mengukir prestasi di perkuliahan.
8. Sepupu penulis, Siska Permata Sari, Natasya Aini, Ardi Hamonangan Siregar, Arieq Pane, Sarah Soraya dan Echa menghibur penulis di kala kejenuhan penulis dari perkuliahan dan skripsi hingga menyelesaikannya saat ini.
9. Cyndy Cludia Ningsih, dan Fajri Salim yang telah menjadi teman seperjuangan bagi penulis. penulis menyadari banyak sekali kelemahan penulis dalam proses perkuliahan namun sahabat terdekat penulis selalu mendukung, meluangkan waktunya disela-sela kesibukannya untuk membantu penulis, hingga penulis mendapatkan gelar sarjana.
10. Sahabat Aye-aye, Khairul Umam Manik yang sangat baik hati, tidak sombong, sangat memotivasi dalam setiap kalimat yang diucapkannya. Umam rela memperlambat skripsinya demi melihat aku selesai duluan. Sungguh baik hati. Dengan menyebut nama Allah, saya merekomendasikan kalian untuk follow akun Instagram umam yaitu:

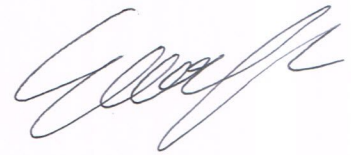
@khairulumam.manik. Foto-foto dan captionnya sungguh mengharukan

11. Skripsi ini tidak akan selesai tepat waktu jika sahabat Cips Ahoy saya, Erwin Romel, tidak meluangkan waktunya untuk membantu saya dalam menganalisis dan bertukar pikiran dan selalu menyemangati penulis dengan kalimat-kalimat yang menggemaskan dan imut. Saya secara resmi menganjurkan kalian untuk follow instagram sahabat sejati saya ini di @erwinromel5 dan juga Cyndy.
12. Delfira Irgahayu Pratiwi yang selalu mendampingi penulis dikala penulis menghadapi kesulitan dan permasalahan. Devi Purwati yang selalu menginspirasi penulis untuk ke Slovakia, Nurul Rahmi yang menyemangati penulis dengan kata-kata mutiara yang kadang menyinggung. Ikhsan Putra Arma yang selalu menghibur penulis dengan kalimat-kalimat sarkas nan lucu, Hafizh Ulya Fikri yang menyemangati penulis dengan kalimat-kalimat lembut nan menghibur walaupun kadang-kadang membuat baper penulis.
13. Sahabat-sahabat penulis semenjak SMA, Tesyah Nurintan, Eka Srikandi Putri, Melik, Diah S.W, Karina, Nurul, Ramadhani Ambar, Rama Wira, dan Ary yang selalu memberikan semangat dan meluangkan waktu untuk berkeluh kesah dalam proses penyelesaian skripsi.
14. Sahabat-sahabat KKN Bukit Sikumpa Jorong Pakan Sinayan dan yang paling spesial Kaharudin yang bersedia meluangkan waktunya disela kesibukan perkuliahnya untuk sekedar berbagi keluh kesan dan berbagi pengalaman yang menginspirasi.
15. Teman-teman dan adik-adik pada ASSIST volunteers, terima kasih telah saling berbagi ilmu selama ini. Tetap jayalah selalu!

16. Seluruh teman-teman angkatan HI 15 yang selalu bersama penulis dari awal masa perkuliahan hingga sekarang. Terimakasih telah menjadi rumah kedua untuk berbagi semangat menjalani proses perkuliahan selama 3 tahun 5 bulan.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih banyak memiliki kekurangan. Oleh karena itu, penulis mengharapkan kritik dan saran yang membangun dari semua pihak agar tulisan ini dapat menjadi tulisan yang lebih baik dan memberikan dampak positif yang luas bagi penggunaannya. Penulis juga berharap skripsi ini dapat bermanfaat tidak hanya bagi penulis, tapi juga pihak-pihak lain yang terkait.

Padang, 22 Januari 2019



Erti Fadhilah Putri

ABSTRAK

Tujuan utama dari penelitian ini adalah menjelaskan upaya intervensi yang dilakukan Tiongkok dalam kasus Sudan Selatan. Penelitian ini mengeksplorasi dan merincikan beberapa konflik sipil yang terjadi di Sudan Selatan pada tahun 2013 dan strategi Tiongkok mengupayakan proses perdamaian yang belum pernah dilakukan Tiongkok sebelumnya. Intervensi yang dilakukan Tiongkok saat ini pada konflik sipil di Sudan Selatan adalah upaya untuk membawa proses perdamaian atau dikenal dengan *third party intervention*. Penelitian ini mengadopsi dari *third party intervention* Ronald J. Fisher dengan menggunakan *model contingency* sebagai alat untuk menganalisis tahap-tahap intervensi yang dilakukan Tiongkok sesuai dengan kondisi konflik yang terjadi. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan teknik pengumpulan data sekunder. Temuan penelitian ini menunjukkan bahwa Tiongkok memiliki peran penting dalam proses perdamaian dalam konflik sipil Sudan Selatan. Peran aktif Tiongkok dapat dilihat bahwa Tiongkok telah melakukan beberapa bentuk intervensi seperti negosiasi, mediasi, *power mediation*, memberikan bantuan pembangunan dan konsultasi khusus. Namun keberhasilan Tiongkok dalam mengupayakan perdamaian di Sudan Selatan adalah ketika kondisi konflik dalam tingkatan kehancuran Tiongkok melakukan tindakan *peacekeeping* sebagai bentuk pengendalian kekerasan dan mendorong adanya arbitrase serta konsultasi demi mewujudkan adanya gencatan senjata. keberhasilan Tiongkok dalam mengupayakan perdamaian ini sesuai dengan tingkatan pada *model contingency* yang menawarkan tipe intervensi yang sesuai pada tahapan intervensi pada kondisi konflik yang demikian. Hal ini menunjukkan keefektifan *model contingency* dalam menawarkan penyelesaian konflik.

Kata Kunci: Tiongkok, Sudan Selatan, Third Party Intervention, Konflik sipil, Gencatan Senjata.



ABSTRACT

The main objective of this research is to explain the intervention efforts made by China in the case of South Sudan. This research explores and details some of the civil conflicts that occurred in South Sudan in 2013 and China's strategy to seek a peace process that China has never done before. The intervention carried out by China in civil conflict in South Sudan is an effort to bring the peace process known as third party intervention. This study adopted the concept of third party intervention Ronald J. Fisher using the contingency model as a tool to analyze the stages of intervention carried out by China in accordance with the conditions of the conflict. This study uses qualitative methods with secondary data collection techniques. The findings of this study indicate that China has an important role in the peace process in the civil conflict of South Sudan. China's active role can be seen that China has taken several forms of interventions such as negotiation, mediation, power mediation, providing development assistance and special consultations. But China's success in pursuing peace in South Sudan is when conflict conditions in the level of destruction of China carry out actions peacekeeping as a form of controlling violence and encouraging arbitration and consultation to realize a ceasefire. China's success in pursuing peace is in line with the contingency model that offers the type of intervention that is suitable at the intervention stage in such conflict conditions. This shows the effectiveness of the contingency model in offering conflict resolution.

Keywords: China, South Sudan, Third Party Intervention, Civil Conflict, Ceasefire.



DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
ABSTRACT	ii
DAFTAR ISI.....	iii
DAFTAR GRAFIK	vi
DAFTAR SINGKATAN.....	vii
DAFTAR TABEL	viii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang Masalah.....	1
1.2 Rumusan Masalah.....	6
1.3 Pertanyaan Penelitian.....	7
1.4 Tujuan Penelitian	7
1.5 Manfaat Penelitian	8
1.6 Studi Pustaka.....	8
1.7 Kerangka Konseptual.....	12
1.7.1 <i>Third party Interventions</i>	12
1.8 Metode Penelitian	18
1.8.1 Pendekatan dan Jenis Penelitian.....	18
1.8.2. Batasan Penelitian	19
1.8.3. Unit dan Tingkat Analisis	19
1.8.4. Teknik Pengumpulan Data.....	20
1.8.5. Teknik Analisis Data.....	20
1.9. Sistematika Penulisan	21
BAB II KONFLIK SIPIL DI SUDAN SELATAN	23
2.1. Faktor-Faktor Penyebab Konflik Sipil Sudan Selatan	23
2.1.1. Krisis Ekonomi	24
2.1.2. Korupsi.....	27
2.1.3. Penyebaran Isu Kudeta.....	28

2.2.	Dinamika Konflik Sipil.....	29
2.2.1	Konflik sipil 2013-2014.....	30
2.2.2	Konflik sipil 2015-2016.....	36
2.2.3	Konflik sipil 2017-2018.....	41
2.3.	Dampak Konflik Sipil Sudan Selatan	43
2.3.1.	Kekerasan dan Kematian	43
2.3.2.	Defisit.....	44
2.3.3.	Krisis Kemanusiaan	44
2.3.4.	Instabilitas Kawasan	45
BAB III HUBUNGAN TIONGKOK DENGAN SUDAN SELATAN.....		46
3.1.	Kepentingan Tiongkok di Sudan Selatan.....	46
3.1.1.	Ekonomi.....	48
3.1.2.	Politik.....	52
3.1.3.	Keamanan	54
3.2.	Kerjasama Tiongkok dan Sudan Selatan	55
3.2.1.	<i>Political Exchange</i>	55
3.2.2.	<i>Economic and Trade</i>	56
3.2.3.	<i>Education and Culture</i>	57
BAB VI STRATEGI TIONGKOK DALAM MENYELESAIKAN KONFLIK SIPIIL DI SUDAN SELATAN		58
4.1	Strategi Tiongkok Dalam Menyelesaikan Konflik Menggunakan <i>Third-Party Intervention</i>	59
4.1.1	<i>Discussion</i>	61
4.1.2	<i>Destruction</i>	66
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN		84
5.1	Kesimpulan	84
5.2	Saran	88
DAFTAR PUSTAKA		90

DAFTAR GAMBAR

Gambar	1.1 Bagan Tahapan <i>Third Party Interventio</i>	14
Gambar	2.2 Wilayah Pengaruh Pihak Pemerintah dan Pihak Pemberontak.....	35
Gambar	4.1 Pertemuan Duta Besar Tiongkok dengan Menteri Luar Negeri Sudan Selatan	39
Gambar	4.2 Penandatanganan Gencatan Senjata antara Pihak Pemerintah dan Pemberontak	39
Gambar	4.3 Mediasi Tiongkok dengan pihak pemerintah dan pemberontak	8



DAFTAR GRAFIK

Grafik	3.1 Perbandingan Konsumsi dan Produksi Minyak Tiongkok.....	43
--------	---	----



DAFTAR SINGKATAN

CPA	Comprehensive Peace Agreement
CNPC	China National Petroleum Corp
FSI	The Fragile State Index
IGAD	Intergovernmental Authority on Development
IPC	Integrated Food Security Phase Classification
JMEC	Joint Monitoring and Evaluation Commission
PBB	Perserikatan Bangsa-Bangsa
PDB	Produk Domestik Bruto
PRC	People's Republic of China
SSDM	South Sudan Democratic Movement (SSDM)
SSLM	South Sudan Liberation Movement
SPLA	Sudan People's Liberation Army
SPLM	Sudan People's Liberation Movement
SPLM/A	Sudan People's Liberation Movement/ Army
SPLM-IO	Sudan People's Liberation Movemet In Opposition



DAFTAR TABEL

Tabel	3.1 Peringkat Konsumsi Minyak pada tahun 2013.....	41
-------	--	----



BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Sudan Selatan secara resmi adalah negara paling lemah di dunia menurut *Fragile States Index* 2014.¹ Sebagai negara yang baru, Sudan Selatan harus dihadapkan dengan permasalahan konflik sipil yang berlangsung sejak tahun 2013 kecewa terhadap pemerintahan Sudan Selatan. *Sudan People's Liberation Movement* ini mengakibatkan terpisahnya SPLM menjadi dua bagian yaitu SPLM yang berpihak pada pemerintah Sudan Selatan dan SPLM-OI *Sudan People's Liberation Movement In Opposition* yang berpihak pada Riek Machar sebagai pemimpin dari pasukan pemberontak.² Kemunculan pasukan pemberontak disebabkan oleh kekecewaan dari suku Nuer yang diperlakukan tidak adil dalam pemerintahan, adanya impunitas pemerintah Sudan Selatan terhadap beberapa pejabat, tuduh menuduh korupsi serta kondisi ekonomi Sudan Selatan pasca kemerdekaan yang belum membaik menjadi pemicu adanya aksi pemberontakan yang dilakukan oleh SPLM-OI.³

Konflik sipil ini telah merugikan negara Sudan Selatan baik dari sisi keamanan regional, ekonomi, dan sosial penduduk Sudan Selatan. Dari sisi keamanan, konflik ini telah membuat negara-negara yang tergabung dalam Uni-Afrika merasa terancam akan adanya perluasan konflik sipil ini. Adanya penduduk Sudan Selatan yang mencari suaka di negara-negara tetangga juga menjadikan konflik sipil ini dapat mengganggu keamanan regional.

¹ The Fund for Peace, "Fragile State Index 2014," The Fund for Peace, <http://library.fundforpeace.org/library/cfsir1423-fragilestatesindex2014-06d> (Diakses pada 12 Desember 2018)

² John Young, "Sudan People's Liberation Army," Institute for security studies, (April 2007), 1-3.

³ John Young, 5

Dari sisi sosial penduduk, konflik ini telah membuat 700.000 penduduk tewas, lebih dari 1.500.000, penduduk mengungsi dan 2.000.000 penduduk mengalami kelaparan.⁴ Dari sisi ekonomi, konflik sipil ini telah membuat inflasi bagi negara Sudan Selatan dimana 98% pendapatan negara Sudan selatan berasal dari ladang minyak milik pemerintah Sudan Selatan.⁵

Konflik ini telah menghambat produksi, terutama produksi penjualan minyak di Sudan Selatan. Negara-negara investor pada perusahaan minyak milik pemerintah Sudan Selatan seperti negara Tiongkok mengalami kerugian yang besar. Walaupun Sudan Selatan hanya menyumbang 2-5% dari impor minyak tahunan Tiongkok namun hal ini juga membawa kerugian bagian Tiongkok dimana saat ini keamanan energi menjadi fokus utama Tiongkok.⁶

Selain minyak yang menjadi prioritas Tiongkok di Sudan Selatan, Tiongkok juga memiliki investasi lainya seperti 100 perusahaan Tiongkok telah ada di Sudan Selatan sejak tahun 2013. Perdagangan kedua negara juga telah mencapai \$ 534 juta pada tahun 2013.⁷ Tiongkok melihat Sudan Selatan sebagai tempat yang baik untuk berinvestasi, tidak hanya kaya terhadap sumber daya alam namun minimnya pesaing, biaya operasi yang murah serta tenaga kerja yang

⁴ USAID."South Sudan-Crisis" fact sheet, 4 (February 9, 2018), 1-6

⁵ Lauren, Ploch Blanchard."Conflict in South Sudan and the Challenge Ahead", Congressional Research Service report (September 22, 2016),16

⁶ International Crisis Group,"China's Foreign Policy Experiment in South Sudan," International Crisis Group, <https://www.crisisgroup.org/africa/horn-africa/south-sudan/288-china-s-foreign-policy-experiment-south-sudan> (Diakses pada 14 January 2018)

⁷ International Crisis Group,"China's Foreign Policy Experiment in South Sudan," International Crisis Group, <https://www.crisisgroup.org/africa/horn-africa/south-sudan/288-china-s-foreign-policy-experiment-south-sudan> (Diakses pada 14 January 2018)

murah membuat Tiongkok mendapatkan margin keuntungan 50 persen sebelum konflik sipil pecah pada tahun 2013.⁸

Konflik Sipil di Sudan Selatan telah menarik perhatian Tiongkok untuk berperan aktif dan menjadi aktor sentral dalam upaya perdamaian. Keikutsertaan Tiongkok pada konflik sipil ini merupakan sebuah transformasi kebijakan luar negeri Tiongkok yang sebelumnya sangat kaku. Transformasi kebijakan luar negeri yang proaktif dalam proses perdamaian ini telah dimulai sejak konflik sipil di Sudan dan berlanjut ke beberapa negara di kawasan Afrika Sub-Sahara. Hal ini telah menjadi studi kasus yang penting dalam evolusi kebijakan luar negeri Tiongkok secara global.

Pandangan mengenai peran besar Tiongkok di Sudan Selatan telah ada sebelum konflik sipil meletus pada tahun 2013. Salah satu kajian mengenai analisis peran Tiongkok ialah Sudan Selatan sebagai tempat uji coba untuk diplomasi proaktif.⁹ Bahkan telah diperdebatkan bahwa peran Tiongkok di Sudan Selatan saat ini akan menjadi gambaran bagaimana hubungan Tiongkok di masa depan dengan negara-negara di kawasan Afrika Sub Sahara. Hal ini terlihat dalam pendapat beberapa ahli bahwa Tiongkok menggunakan pendekatan yang lebih tegas untuk melindungi kepentingannya di Sudan Selatan akan menjadi citra baru Tiongkok di sistem internasional.

Dalam menegaskan kepentingan Tiongkok di Sudan Selatan, Tiongkok telah mengerahkan lebih dari 2000 pasukan sebagai pasukan penjaga perdamaian PBB, dan melakukan banyak upaya diplomatik lainnya untuk membantu

⁸ International Crisis Group, "China's Foreign Policy Experiment in South Sudan," International Crisis Group, <https://www.crisisgroup.org/africa/horn-africa/south-sudan/288-china-s-foreign-policy-experiment-south-sudan> (Diakses pada 14 January 2018)

⁹ Obert Hodz, "Strategy of 'Parallels': China in the South Sudanese armed conflict", Asia Center-note observatoire china 2016/2017, 40-46.

menyelesaikan perang sipil yang sedang berlangsung.¹⁰ Peran Tiongkok di konflik sipil Sudan Selatan adalah sebagai *Third Party Intervener* dalam mengupayakan perdamaian. Intervensi pihak ketiga merupakan strategi resolusi konflik yang melibatkan pihak ketiga. Keikutsertaan pihak ketiga ini juga dapat dilihat dari *power* negara tersebut dan kondisi konflik. Sehingga terdapat tingkatan keterlibatan sebuah negara dalam menyelesaikan konflik. Metode intervensi *Third-party intervention* ini juga mengalami perkembangan dalam kajiannya. *Third-party intervention* tidak hanya berbentuk mediasi, namun juga terdapat bentuk-bentuk lainnya seperti konsiliasi, arbitrase, *peacekeeping operation*, konsultasi dan lainnya¹¹.

Keterlibatan Tiongkok di konflik sipil ini bermula pertemuan Ma Qiang sebagai duta besar Tiongkok untuk Sudan Selatan dengan Presiden Salva Kiir membahas informasi resmi dan kondisi pasca pecahnya konflik sipil di Sudan Selatan. Beberapa hari kemudian pada tanggal 24 Desember 2013, Duta Besar Ma Qiang melakukan diskusi dengan Menteri Luar Negeri Sudan Selatan Mr. Benjamin, bertukar pandangan tentang situasi Sudan Selatan dan mencoba mempromosikan perdamaian disana. Ma Qiang menanggapi konflik sipil tersebut telah mengancam perusahaan Tiongkok terutama para insinyur dan teknik Tiongkok di daerah konflik.¹² Ma Qiang meminta adanya tindakan dari pemerintah Sudan Selatan yang konkrit untuk mengatasi permasalahan ini, terutama kemauan pemerintah Sudan Selatan untuk melakukan perundingan

¹⁰ Obert Hodz, 40-46.

¹¹ Junhyuk Park, 183-190.

¹² Aly Verjee, "Explaining China's involvement in the South Sudan peace process" lowy institute; <https://www.lowyinstitute.org/the-interpreter/explaining-chinas-involvement-south-sudan-peace-process> (diakses pada tanggal 12 desember 2018).

dengan pihak pemberontak untuk mendapatkan kesepakatan bersama mengenai konflik sipil yang terjadi.¹³

Dalam mengupayakan perundingan terhadap pihak yang berkonflik Tiongkok segera mengangkat utusan atau perwakilan khusus yang memiliki kredibilitas dan pengetahuan yang luas terhadap permasalahan yang menimpa Sudan Selatan dan negara-negara sekitarnya. Tiongkok mengangkat Zhong Jianhua sebagai perwakilan diplomatik khusus untuk permasalahan di Sudan Selatan. Dalam sebuah pernyataan, juru bicara Kementerian Luar Negeri, Hua Chunying mengatakan bahwa utusan khusus Zhong Jianhua mengunjungi Selatan Sudan dan negara-negara tetangga, dan secara aktif membawa upaya mediasi.¹⁴ Tiongkok bersedia untuk meningkatkan komunikasi dan koordinasi dengan semua pihak-pihak terkait dan bersama-sama mendorong pemulihan stabilitas di Sudan Selatan. Adapun hasil dari negosiasi, yang pertama perjanjian gencatan senjata pada tahun 2014.

Penyelesaian konflik yang dilakukan Tiongkok melalui *Third Party Intervention* merupakan hal menarik untuk dikaji. Tiongkok memiliki prinsip luar negeri *non-interference* yang berlawanan dengan tindakan mediasi yang diusung oleh Tiongkok pada konflik sipil di Sudan Selatan. prinsip *non-interference* ini menjadikan Tiongkok untuk tidak mencampuri urusan dalam negeri negara lain begitupun sebaliknya. Prinsip ini bahkan juga menjadi prinsip yang telah disepakati dalam kerjasama dengan organisasi regional di kawasan Afrika. Konflik sipil di Sudan Selatan telah mengarahkan Tiongkok untuk

¹³ Aly Verjee, "Explaining China's involvement in the South Sudan peace process" lowy institute; <https://www.lowyinstitute.org/the-interpreter/explaining-chinas-involvement-south-sudan-peace-process> (diakses pada tanggal 12 desember 2018).

¹⁴ Obert Hodz, 46

menginterpretasi lebih fleksibel tentang kebijakan non-intervensi melihat peluang pendekatan baru untuk melindungi kepentingannya. Hal yang menarik lainnya adalah perwakilan diplomatik Tiongkok belum pernah mendapatkan pengalaman dalam menyelesaikan konflik dalam bentuk mediasi. Hal ini seperti yang dikatakan oleh Harry Verhoeven bahwa “*Chinese diplomats took unprecedented steps in publicly pressuring belligerents Salva Kiir and his former vice president, Riek Machar, to sign a ceasefire agreement*”.¹⁵ Sebagai pemain baru dalam menggunakan strategi *Third Party Intervention*, Tiongkok masih mengalami beberapa hal yang harus diperbaiki dalam menangani permasalahan konflik sipil. Hal ini tentunya menjadi aspek yang menarik untuk menjadi kajian dalam melihat upaya Tiongkok melakukan mediasi di konflik sipil Sudan Selatan.

1.2 Rumusan Masalah

Konflik sipil di Sudan Selatan telah membuat dampak yang signifikan terhadap negara Tiongkok. Adanya konflik sipil ini telah membuat kepentingan Tiongkok terhambat di Sudan Selatan. Tiongkok memiliki investasi yang besar di Sudan Selatan di mana mencapai keuntungan marginal sekitar 50% sebelum adanya konflik sipil. Investasi ini bersumber dari minyak dan perusahaan-perusahaan Tiongkok yang ada di Sudan Selatan. konflik sipil Sudan Selatan telah membuat aktivitas perusahaan Tiongkok terhenti sehingga Tiongkok mengalami kerugian dari hal tersebut. Sebagai respon terhadap kondisi di Sudan Selatan, Tiongkok melakukan Tindakan intervensi sebagai upaya penyelesaian konflik sipil di Sudan Selatan. menariknya tindakan Tiongkok ini merupakan bentuk inkonsistensi Tiongkok terhadap prinsip *non-interference* yang selama ini

¹⁵ Obert Hodz,49

merupakan prinsip kebijakan luar negeri Tiongkok. Selain itu bentuk intervensi yang dilakukan Tiongkok juga berbeda dengan tindakan intervensi yang pernah dilakukan Tiongkok sebelumnya. Tiongkok melakukan intervensi di konflik sipil Sudan Selatan dengan metode diplomatik yaitu dengan menggunakan beberapa metode penyelesaian konflik seperti mediasi, negosiasi dan konsultasi. Walaupun demikian Tiongkok belum memiliki pengalaman yang cukup untuk melakukan tindakan intervensi yang bersifat diplomatis ini seperti yang dikatakan oleh Zhong Jianhua.¹⁶ Sehingga menarik untuk diteliti upaya Tiongkok dalam menyelesaikan konflik sipil di Sudan Selatan.

1.3 Pertanyaan Penelitian

Berangkat dari latar belakang dan rumusan masalah diatas, maka penelitian ini akan menjawab pertanyaan penelitian yaitu, *“Bagaimana upaya Tiongkok dalam melakukan intervensi di Sudan Selatan?”*

1.4 Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah:

- Menjelaskan upaya intervensi yang dilakukan Tiongkok dalam kasus Sudan Selatan
- Menjelaskan tentang konflik Sudan Selatan dan kepentingan Tiongkok di Sudan Selatan.

¹⁶ International Crisis Group, "China's Foreign Policy Experiment in South Sudan," International Crisis Group, <https://www.crisisgroup.org/africa/horn-africa/south-sudan/288-china-s-foreign-policy-experiment-south-sudan> (Diakses pada 14 January 2018)

1.5 Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian ini adalah:

- Penelitian ini dapat menjadi sumbangsih pemikiran bagi akademisi dan masyarakat internasional terhadap isu intervensi yang dilakukan oleh sebuah negara.
- Penelitian ini dapat menjadi referensi bagi pemerintah, lembaga swadaya masyarakat (LSM), ataupun organisasi internasional non pemerintah untuk sebagai gambaran penyelesaian konflik dengan metode mediasi melalui *Third party Interventions*.

1.6 Studi Pustaka

Dalam studi pustaka ini, penulis akan memaparkan berbagai penelitian yang telah dilakukan sebelumnya untuk memberikan signifikansi pada topik penelitian yang diambil. Secara umum penulis membagi studi pustaka berdasarkan penelitian sebelumnya mengenai prinsip intervensi Tiongkok dan konsistensinya di Afrika dan bentuk intervensi halus Tiongkok di Sudan Selatan.

Studi pustaka pertama yang penulis gunakan sebagai bahan acuan adalah hasil tesis Qinye Gou yang berjudul *"The Principle of Non-Interference and China's Role in International Conflict in the New Era"*. Di dalam buku ini Qinyeng menjelaskan bagaimana upaya Tiongkok menyelesaikan isu-isu *high politics* dengan damai di Asia, Afrika, dan Timur Tengah.¹⁷ Salah satu tantangan yang dihadapi Tiongkok menuju keunggulan global adalah bagaimana menyeimbangkan tanggung jawab internasional yang semakin meningkat dan prinsip-prinsip kebijakan luar negeri yang telah ditetapkan dan ditegakkan selama

¹⁷ Gou Qing Ye, 35

beberapa dekade. Di dalam Tesis ini, Qingye mencoba menjawab mengapa Tiongkok tetap berpegang pada prinsip non-interferensi, bagaimana Tiongkok menangani kontradiksi antara tanggung jawab internasional dan prinsip non-interferensi Tiongkok. Qingye mengadopsi strategi metodologis gabungan, termasuk analisis mendalam pada permasalahan dan studi kasus. Selanjutnya Qingye menggunakan teori mediator dan perubahan kebijakan luar negeri namun lebih merujuk pada kognitif teori dan prospek teori hal inilah yang membedakan penelitian Qingye dengan penelitian yang akan dilakukan oleh penulis.

Studi pustaka selanjutnya adalah karya Lauren Ploch Blanchard dalam tulisanya *Conflict in South Sudan and the Challenges Ahead*.¹⁸ Lauren menuliskan konflik Sipil Sudan Selatan merupakan sebuah arena perebutan kepentingan dari pihak-pihak yang memiliki kepentingan di Sudan selatan. Peran pihak-pihak dalam menyelesaikan konflik sipil di Sudan Selatan seperti Amerika Serikat secara efektif memfasilitasi penyelesaian konflik sipil yang berujung pada konflik bersenjata. Amerika Serikat juga berkontribusi dalam pemberian bantuan luar negeri untuk memfasilitasi pemerintah Sudan Selatan membangun sarana fasilitas gawat darurat. Selanjutnya peran PBB juga berpengaruh di sini dalam menjaga perdamaian dalam bentuk pengiriman pasukan penjaga perdamaian di Sudan Selatan. Tulisan Lauren akan berkontribusi pada penggambaran kondisi konflik di Sudan Selatan serta dinamika perebutan kepentingan dari berbagai pihak.

Studi pustaka yang ketiga adalah tulisan Ching-chiu hang dan Chin-yu Shih dalam bukunya *Harmonious Interventions: China's Quest for Relational*

¹⁸, Lauren Ploch Blanchard, 1

*Security*¹⁹. Dalam tulisan tersebut dideskripsikan keadaan Tiongkok yang mengalami peningkatan kemajuan perekonomian menjadikan Tiongkok memiliki pengaruh yang besar pada sistem internasional yang anarki hal ini merujuk pada bagaimana Tiongkok menerapkan prinsip non intervensinya yang dipengaruhi kondisi domestik Tiongkok.²⁰ Selanjutnya keadaan sistem internasional juga mendorong Tiongkok untuk beberapa kasus tidak konsisten bahkan sangat tidak menerapkan prinsip luar negeri Tiongkok. Pada tulisan ini tulisan Ching-chiu hang dan Chin-yu Shih menggunakan pendekatan *Balancing of Relations* untuk menganalisis perilaku Tiongkok. Tulisan yang menjadi bahan acuan awal untuk mendeskripsikan prinsip non intervensi Tiongkok dalam pengimplementasinya.

Studi pustaka keempat adalah tulisan Fisher, R. J., dan Keashly, L yang berjudul *The Potential Complementarity of Mediation and Consultation within a Contingency Model of Third party Interventions*.²¹ Pustaka ini menjelaskan bahwa *Third party Interventions* adalah salah satu yang paling sering digunakan oleh negara-negara untuk menyelesaikan konflik. Biasanya pendekatan ini digunakan pada konflik konflik yang cenderung tidak dapat diselesaikan tanpa menggunakan jalur kekerasan. *Third party Interventions* secara umum dapat didefinisikan sebagai keterlibatan negara/ organisasi atau lembaga ke dalam konflik berkelanjutan yang merupakan menyelesaikan konflik.²² Fungsi intervensi *Third party* membantu pihak yang berkonflik menganalisis konsekuensi dari tindakan mereka, dan mengelola penyelesaian konflik dengan cara yang saling

¹⁹ Ching-chiu hang dan Chin-yu Shih , *Harmonious Interventions s: China's Quest for Relationl Security* (London: Routledge, 2014), 1-9

²⁰ Ching-chiu hang dan Chin-yu Shih, 35

²¹ Fisher Ronald J. and Loreleigh Keashly . "The Potential Complementarity of Mediation and Consultation within a Contingency Model of Third party Interventions ", in: *Journal of Peace Research*, 28, 1: 29-42

²² Fisher, 29-42,

menguntungkan. Tulisan dari Fisher, R. J., dan Keashly, L yang menjadi acuan dalam melihat bagaimana Tiongkok menjalankan strategi intervensinya melalui metode *Third party Interventions*. Studi pustaka ini membantu penulis menganalisis permasalahan dengan menggunakan model *Third party Interventions* yang diawali dengan mengidentifikasikan bentuk- bentuk intervensi kemudian mendeskripsikan tahap-tahap dalam *Third party Interventions* dan kemudian menggolongkan tingkat keterlibatan negara dalam tahapan intervensi.

Studi pustaka kelima adalah tulisan Barry M. Goldman, Russell Cropanzano, Jordan Stein, dan Lehman Benson yang berjudul *The Role of Third Parties/ Mediation in Managing Conflict in Organization*.²³ Studi pustaka ini menjelaskan bahwa peran dalam manajemen konflik tanpa kekerasan adalah diarahkan membantu para aktor dalam konflik untuk mewujudkan kepentingan mereka sendiri ketika berbagai masalah mengancam untuk mengganggu atau menurunkan hubungan tawar-menawar (*Face-Saving*). Dalam proses pengurangan konflik oleh dapat berdampak positif dan langsung kontribusi dengan memfokuskan para pihak pada perjanjian pengakhiran perang, memberikan agenda negosiasi memanipulasi waktu proses negosiasi. Pihak ketiga juga dapat membantu mengatasi kendala dihadapi oleh pihak-pihak yang berkonflik. Studi pustaka ini menjadi gambaran dan referensi penulis dalam melihat peran *Third Party Intervention* pada konflik sipil.

²³Barry M. Goldman, et all., The psychology of conflict and conflict management in organizations [SIOP Frontiers Series], Chapter: The role of third-parties/mediation in resolving conflict in organizations, (London:Lawrence Erlbaum, 2008),297.

1.7 Kerangka Konseptual

1.7.1 *Third party Interventions*

Resolusi konflik merupakan semua upaya dalam menggabungkan elemen sosial, ekonomi dan politik melalui instrumen mediasi, negosiasi, *peace building* dan rekonsiliasi. Di antara semua instrumen resolusi konflik, *Third party Interventions* adalah salah satu yang paling sering digunakan oleh negara-negara untuk menyelesaikan konflik. Biasanya pendekatan ini digunakan pada konflik konflik yang cenderung tidak dapat diselesaikan tanpa menggunakan jalur kekerasan. *Third party Interventions* secara umum dapat didefinisikan sebagai keterlibatan negara, organisasi atau lembaga ke dalam konflik berkelanjutan yang berupa menyelesaikan konflik.²⁴ Menurut Jean Christophe Boucher, intervensi pihak ketiga membantu pihak yang berkonflik menganalisis konsekuensi dari tindakan mereka, dan mengelola penyelesaian konflik dengan cara yang saling menguntungkan. Menurut Ronald J. Fisher Terdapat 6 pembagian bentuk dari *Third party Interventions* yaitu sebagai berikut²⁵,

1. *Conciliation*, di mana pihak ketiga menyediakan sarana komunikatif informal antara pihak yang sedang berkonflik yang bertujuan untuk mengidentifikasi masalah, menurunkan ketegangan dan mendorong interaksi langsung, biasanya bentuk intervensi pihak ketiga ini dalam bentuk negosiasi.
2. *Consultation*, di mana pihak ketiga bekerja untuk memfasilitasi penyelesaian masalah secara konsultatif dengan menggunakan instrumen

²⁴ Ronald J. Fisher dan Loreleigh Keashly, "The Potential Complementarity of Mediation and Consultation within a Contingency Model of *Third party Interventions* ", *Journal of Peace Research* 28,1, 29-42.

²⁵ Ronald J. dan Keashly, 169-167

komunikasi baik antar kedua pihak yang berkonflik dan menganalisis permasalahan antara kedua pihak yang berkonflik .

3. *Pure Mediation*, di mana pihak ketiga bekerja untuk memfasilitasi penyelesaian yang menggunakan instrumen negosiasi. Pemecahan permasalahan substantif melalui penggunaan penalaran, persuasi, kontrol informasi yang efektif dan saran alternatif
4. *Power Mediation*, pihak ketiga memiliki peran sebagai mediator namun menggunakan cara-cara paksaan dan ancaman hukuman untuk mengarahkan kedua belah pihak mencapai pemecahan permasalahan. *Third party* juga berperan sebagai monitor dan penjamin kesepakatan.
5. *Arbitration*, di mana pihak ketiga membuat kesepakatan yang mengikat kedua pihak yang berkonflik untuk di bawah pada peradilan sehingga kedua belah pihak dapat menyelesaikan permasalahan secara adil.
6. *Peacekeeping*, dimana pihak ketiga menyediakan personel militer untuk memantau gencatan senjata, menjaga hak-hak kemanusiaan tetap terjaga dan membantu manajemen proses pengambilan keputusan politik seperti pemilihan.

Third Party Intervention sebagai metode penyelesaian konflik yang masih dalam perkembangan pada menyelesaikan konflik. Berbeda dengan metode penyelesaian konflik lainnya *Third Party Intervention* memiliki keunggulan tersendiri dalam menyelesaikan konflik yang cenderung bersenjata dan menggunakan kekerasan.²⁶ *Third Party Intervention* banyak dipakai dalam

²⁶ Ronald J. Fisher, 165-170

menyelesaikan konflik yang bersifat *ethnopolitical* konflik atau konflik *intrastate* yang memiliki keterikatan dengan adanya pengaruh etnis yang di permasalahkan.²⁷ Metode *Third Party Intervention* dapat membawa kedua belah pihak yang berseteru untuk melakukan perundingan dan tawar-menawar sebagai bentuk upaya proses perdamaian. Beberapa jurnal juga menyebutkan bahwa metode ini dapat memperpendek durasi konflik sipil yang terjadi tentunya dengan mempertimbangkan faktor-faktor lainnya yang mempengaruhi seperti keterlibatan aktor eksternal, tekanan dari komunitas internasional, latar belakang permasalahan dan lainnya sebagainya.

Third party intervention juga memiliki *model contingency* yang menghubungkan jenis-jenis intervensi ke tahap-tahap eskalasi konflik.²⁸ Menurut Fisher Hal ini didasari bahwa konflik adalah perpaduan unsur-unsur obyektif dan subyektif sehingga dibutuhkan penanganan yang mencakupi kedua unsur tersebut. Jenis-jenis intervensi yang telah dijelaskan di atas memiliki perbedaanya dalam unsur-unsur yang membangunnya sehingga di butuhkan metode yang dapat dicocokkan dengan tingkatan atau tahap eskalasi konflik.

Model contingency bertujuan untuk mengidentifikasi empat tahap dalam eskalasi konflik pada *third party intervention* yakni *discussion*, *polarisation*, *segregation*, *destruction*.²⁹ Tahapan eskalasi tersebut dipengaruhi oleh sifat komunikasi dan interaksi antara para pihak, persepsi pihak-pihak terhadap pihak lain dan hubungan keberpihakan. *Intervener* nantinya akan melihat kondisi konflik berdasarkan kondisi konflik, nantinya intervensi akan mengidentifikasi

²⁷ Ronald J. Fisher, 167-170

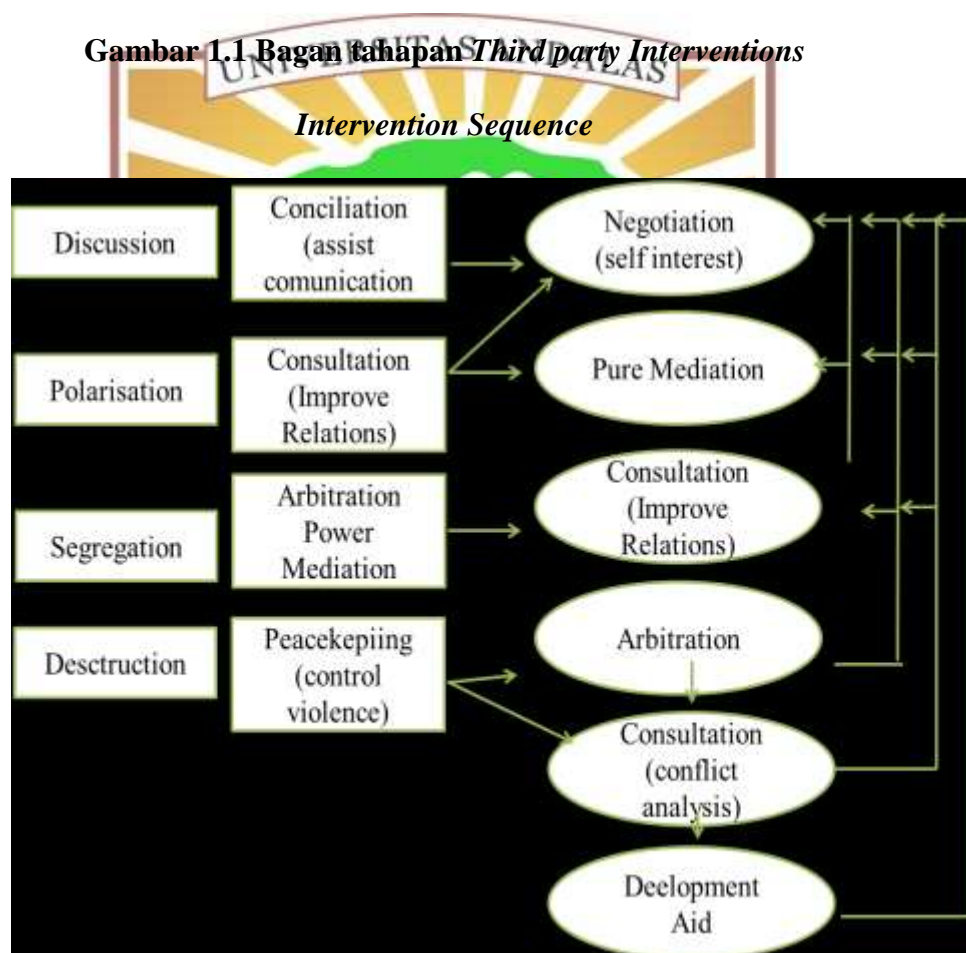
²⁸ Ronald J. Fisher, 311

²⁹ Ronald J. Fisher , 315-136

tahapan atau tingkatan mana yang akan diambil dalam upaya menyelesaikan konflik tersebut.

Berbeda dengan model eskalasi konflik lainnya *Model Contingency* lebih berfokus pada tingkat politik pengambilan keputusan yang berpengaruh terhadap resolusi konflik yang diambil. Hampson dan Aii dalam tulisannya menyebutkan *Model contingency* berguna dalam mereka menghubungkan berbagai kombinasi berbagai jenis bantuan pihak ketiga dengan tingkat kekerasan.³⁰

Gambar 1.1 Bagan tahapan *Third party Interventions*



Sumber: Ronald J Fisher dan Loreleigh Keashly, 1991.

³⁰ Fisher, 29-42

Bagan di atas mendeskripsikan tahapan-tahapan *Third party Interventions* berupa³¹:

1. *Discussion*, pada tahap ini kedua belah pihak yang berkonflik sulit untuk melakukan perundingan sehingga sangat dibutuhkan peran *Third party* dalam mengkonsolidasi kedua belah pihak. Bentuk intervensi pada tahapan adalah konsiliasi dimana jenis intervensi ini dapat menangani secara efektif masalah-masalah kecil persepsi dan emosional, dan mengarahkan para pihak ke dalam negosiasi untuk mengelola perbedaan. Tujuan dari tahap ini adalah untuk memfasilitasi pihak yang berkonflik untuk bernegosiasi sehingga dapat menyelesaikan perbedaan pandangan kedua belah pihak;
2. *Polarisation*, tahap ini ditandai dengan adanya persepsi negatif dan rasa permusuhan. Dalam mengupayakan perdamaian sangat dibutuhkan peran pihak ketiga sebagai sarana untuk berkonsultasi. Konsultasi yang baik dari *Third party* dapat membantu menjernihkan mispersepsi dan kesalahpahaman serta meredakan tensi kedua negara. Setelah itu, pihak yang berkonflik kemudian dapat didorong untuk masuk ke mediasi murni untuk mencapai kesepakatan;
3. *Segregation*, Tahap ini menjelaskan kondisi konflik dengan rasa permusuhan yang tinggi antara kedua belah pihak. Dalam tahap ini, intensitas komunikasi menjadi terbatas dan terkadang ada kecenderungan penggunaan ancaman. Kondisi tersebut mendorong pihak ketiga untuk melakukan bentuk intervensi berupa arbitrase atau

³¹ Fisher, 29-42

power mediation. Tindakan ini diperlukan untuk mengendalikan permusuhan pihak-pihak dan mengurangi efek negatif yang ada pada hubungan kedua negara;

4. *Destruction*, pada tahap ini pihak-pihak yang berkonflik sudah berada pada titik terendah dalam hubungan mereka dan menganggap situasi konflik tidak dapat diselesaikan dan akan berlangsung secara terus menerus. Penggunaan kekerasan sangat dominan pada tahapan ini. Kedua belah pihak tidak ragu saling menyerang satu sama lain dan bahkan dapat berakhir pada titik terberatnya yaitu adanya genosida. Tahap ini memaksa pihak ketiga untuk melakukan intervensi dalam bentuk *peacekeeping* untuk mengendalikan kekerasan, dan mengusahakan usaha mediasi dan konsultasi kembali. Intervensi berupa bantuan pembangunan juga ada pada tahap ini. Bantuan pembangunan berperan dalam menangani ketidakadilan struktural dan mengatasi masalah kesetaraan dan keadilan distributif. Selain itu bantuan pembangunan juga berdampak pada pencegahan terhadap terjadinya kekerasan yang disebabkan kurangnya kebutuhan dasar sehingga dapat mewujudkan perdamaian positif.

Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya bahwa *model contingency* ini menjadi acuan dalam melihat bentuk-bentuk intervensi yang dilakukan oleh pihak ketiga dan kondisi konflik yang cocok untuk menggunakannya. Berbagai bentuk intervensi menemukan legitimasi dalam berbagai jenis kekuatan, dan perlu dievaluasi baik dari segi efektivitas dan penerimaan terhadap tindakan tersebut. Sebagai contoh pada konsiliasi, konsultasi, dan mediasi murni cenderung

mengerahkan tingkat kontrol yang lebih rendah atas proses dan hasil, dan juga lebih mengandalkan kekuatan Arbitrase, mediasi kekuasaan, dan *peacekeeping* dicirikan oleh tingkat kontrol yang lebih tinggi atas proses dan hasil.

Pihak ketiga dapat saja berada pada tingkatan *Polarisation* hal ini sesuai dengan kondisi konflik yang sedang berlangsung. Tindakan pihak ketiga jika berada pada stage ini dapat berbentuk mediasi. Setelah terjadi mediasi antara kedua belah pihak yang berseteru maka *intervener* akan menganalisis apakah praktik mediasi tersebut telah berhasil hal ini dilihat dari intensitas berkomunikasi, persepsi antar kedua belah pihak dan bentuk kepatuhan terhadap isi kesepakatan dari adanya mediasi. Jika kondisi setelah adanya mediasi ini semakin membaik maka *intervener* akan membawa kedua belah pihak ketahapan eskalasi konflik lebih mengarah ke meningkatkan hubungan baik dengan adanya diskusi. Seperti yang di tunjukkan oleh gambar 1.1 bahwa eskalasi konflik kemudian menuju kearah atas atau menunjuk pada arah panah atas yang menunjukkan keberhasilan *intervener* dalam mengatasi permasalahan kedua belah pihak yang berkonflik. Namun jika ternyata mediasi yang dilakukan tidak membawa perdamaian positif dan membuat kondisi konflik semakin memanas maka tingkatan *polarization* akan menjadi tingkatan *segregation*.



1.8 Metode Penelitian

1.8.1 Pendekatan dan Jenis Penelitian

Dalam penelitian ini pendekatan yang digunakan adalah kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif. Metode penelitian kualitatif adalah metode-metode yang digunakan untuk mengeksplorasi dan memahami makna yang oleh sejumlah individu atau sekelompok orang dianggap berasal dari masalah sosial atau

kemanusiaan.³² Dalam prosesnya, penelitian kualitatif melibatkan upaya-upaya penting, seperti mengajukan pertanyaan dan prosedur-prosedur mengumpulkan data yang spesifik dari partisipan, menganalisis data secara induktif dan menafsirkan makna dari data yang telah didapatkan.³³ Dengan menggunakan jenis penelitian deskriptif, penulis mencoba menggambarkan bagaimana upaya Tiongkok melakukan intervensi di konflik sipil Sudan Selatan. Penggunaan metode penulisan deskriptif ditujukan agar dapat menggambarkan dan menyampaikan masalah yang diteliti secara cermat dan lengkap.

1.8.2. Batasan Penelitian

Batasan penelitian bertujuan agar isi penelitian lebih fokus pada hal yang akan dideskripsikan. Penelitian ini dibatasi dari periode tahun 2013 sampai 2018. Tahun 2013 adalah awal berkembangnya konflik Sudan Selatan. Sementara itu, tahun 2018 adalah masa terdapatnya kesepakatan gencatan senjata berhasil didapat dari mediasi Tiongkok.

1.8.3. Unit dan Tingkat Analisis

Unit analisis atau dapat disebut sebagai variabel dependen; merupakan objek yang akan dideskripsikan dalam sebuah penelitian.³⁴ Sedangkan unit eksplanasi atau variabel independen, merupakan unit yang mempengaruhi perilaku dari unit analisis.³⁵ Tingkat atau level analisis adalah unit (individu, negara atau sistem) yang menjadi fokus dari sebuah teori.³⁶

³² John W. Creswell. Research Design: "Qualitative, Quantitative, and Mixed Method Approaches 4th Edition", (California, SAGE Publications : 2013), 4.

³³ John W. Creswell, 4-5.

³⁴ Laura Roselle dan Sharon Spray, "Research and Writing in International Relations", (London: Longman Pearson, 2008), 11-12.

³⁵ Laura Roselle dan Sharon Spray, 11-12.

³⁶ Paul D'Anieri, International Politics: Power and Purpose in Global Affairs, 2nd ed. (Boston: Wadsworth, 2012), 19.

Unit analisis dalam penelitian ini adalah konflik sipil Sudan Selatan. Sedangkan unit eksplanasi adalah upaya Tiongkok dalam melakukan intervensi *Third party*. Sementara itu, tingkat analisis akan berada di level negara.

1.8.4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini terdiri dari *primary data* dan *secondary data*. *primary data* adalah data yang diperoleh atau dikumpulkan langsung di lapangan. Penulis akan menggunakan data primer berupa hasil observasi terhadap upaya mediasi Tiongkok melalui situs remis Kementerian Luar Negeri Tiongkok www.fmprc.gov.cn, Situs resmi pemerintah Tiongkok dan Sudan Selatan, situs-situs media massa nasional Tiongkok dan Sudan Selatan. Sedangkan *Secondary Data* adalah data yang diperoleh atau dikumpulkan oleh orang yang melakukan penelitian dari sumber-sumber yang telah ada. Penulis juga akan menggunakan referensi dari penelitian-penelitian, buku-buku, jurnal-jurnal ilmiah, artikel-artikel, dan juga situs-situs yang membahas tentang objek penelitian. Mengingat keanekaragaman sumber informasi yang dapat diperoleh, maka dalam penulisan ini dilakukan seleksi dan pemilihan atas sumber yang dianggap paling relevan dengan tujuan penulisan. Data-data diolah untuk menghasilkan serangkaian jawaban atas permasalahan penelitian.

1.8.5. Teknik Analisis Data

Dalam penelitian ini penulis menggunakan teknik analisis data yang digunakan sesuai dengan yang dikembangkan oleh Miles dan Huberman.³⁷ Adapun teknik-teknik tersebut adalah sebagai berikut:

³⁷ Matthew B. Miles dan Micheal Huberman, *Qualitative Data Analysis : A Methods Sourcebook* (Thousand Oaks: SAGE Publications Inc, 2015), 30-45

1. Reduksi Data, terdiri dari proses organisasi data dan kategorisasi data dengan konsep dimana data akan disusun secara sistematis;
2. Penyajian Data, proses menghubungkan data dengan kerangka konseptual yang digunakan;
3. Penarikan Kesimpulan dan Verifikasi, terdiri dari proses evaluasi dan melaporkan hasil temuan.

Dalam konteks penelitian ini, maka setelah proses pengumpulan data langkah selanjutnya yang akan dilakukan oleh penelitian adalah:

- a. Reduksi data, tahapan ini penulis akan mereduksi data dengan menggunakan kata kunci “intervensi, mediasi, Tiongkok dan konflik sipil di Sudan Selatan”;
- b. Penyajian data, data disajikan dengan menggunakan konsep *Third party Interventions* yang memuat jenis-jenis intervensi, tahap-tahap dan *Control Strategy*;
- c. Kesimpulan dan verifikasi, dari konsep *Third party Interventions*, akan ditarik kesimpulan bagaimana bentuk-bentuk intervensi yang dilakukan oleh Tiongkok. Setelah itu, akan dilakukan peninjauan kembali apakah konsep tersebut mampu menjawab pertanyaan penelitian.

1.9. Sistematika Penulisan

Bab I: Pendahuluan

Bab ini terdiri dari latar belakang masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, rumusan masalah, pertanyaan penelitian, kerangka konseptual yang akan dipakai dalam penelitian, metodologi penelitian, pembatasan masalah dan

sistematika penulisan. Menggambarkan secara keseluruhan tentang permasalahan penelitian yang diteliti.

Bab II: Konflik Sudan Selatan.

Dalam Bab ini peneliti akan menjelaskan mengenai konflik sipil yang terjadi di Sudan Selatan dengan lebih memfokuskan faktor penyebab terjadinya konflik sipil di Sudan Selatan, dampak terjadinya perang dan bagaimana dinamika konflik sipil, dimulai dari awal konflik tersebut mulai pecah hingga adanya kesepakatan damai antara pihak pemerintah dan pihak pemberontak yang dipelopori oleh Tiongkok. .

Bab III: Hubungan Tiongkok Di Sudan Selatan

Dalam Bab ini penulis akan menjelaskan hubungan Tiongkok dan Sudan Selatan. Dimulai dari kepentingan Tiongkok di Sudan Selatan yang meliputi kepentingan ekonomi, politik dan militer. Tiongkok juga memiliki beberapa bidang kerjasama dengan Sudan Selatan seperti bidang *political exchange*, *economic and trade cooperation* dan *education and cultural exchange*.

Bab IV: Upaya Intervensi Tiongkok Di Sudan Selatan

Bab ini menjelaskan bagaimana upaya Tiongkok melakukan Third Party Intervention di Sudan Selatan dengan *model contingency* yang terbagi menjadi empat tahapan intervensi yang menghubungkan kondisi konflik dengan tipe intervensi yang digunakan untuk menyelesaikan konflik. Tahapan tersebut meliputi yaitu *Discussion*, *Polarisation Segregation*, *Destruction*.

Bab V: Kesimpulan

Bab ini berisi kesimpulan penelitian terkait dengan keterlibatan Tiongkok pada konflik sipil di Sudan Selatan.

BAB II

KONFLIK SIPIL DI SUDAN SELATAN

Dalam Bab II ini peneliti akan menjelaskan mengenai konflik sipil yang terjadi di Sudan Selatan dengan lebih memfokuskan faktor penyebab terjadinya konflik sipil di Sudan Selatan, dampak terjadinya perang dan bagaimana dinamika konflik sipil, dimulai dari awal konflik tersebut mulai pecah hingga adanya kesepakatan damai antara pihak pemerintah dan pihak pemberontak yang dipelopori oleh Tiongkok.

2.1. Faktor-Faktor Penyebab Konflik Sipil Sudan Selatan

Sudan Selatan muncul pada tahun 2011 sebagai negara yang paling baru di dunia. Negara Sudan Selatan resmi menjadi negara yang berdaulat setelah adanya perjanjian damai (*Compromise Peace Agreement*) antara *Sudan People's Liberation Army* (SPLA) atau gerakan pembebasan rakyat Sudan dengan Pemerintah Sudan untuk mengakhiri perang selama 40 tahun.³⁸ Namun setelah kemerdekaan, Sudan Selatan harus menghadapi permasalahan baru di tingkat internal negara. Dua tahun setelah kemerdekaan Sudan Selatan tepatnya pada Desember 2013 terjadi pemberontakan yang dilakukan oleh sekelompok orang yang tergabung dalam *Sudan' People Liberation Movement- In Opposition* (SPLM-IO) yang melawan pemerintahan presiden Salva Kiir.

Pemberontakan ini dilakukan oleh personil militer yang dulunya merupakan tentara SPLM.³⁹ Adanya perpecahan dalam batang tubuh militer tentara Sudan Selatan ini disebabkan oleh faktor-faktor seperti krisis ekonomi.

³⁸ Lauren Ploch Blanchard, "Conflict in South Sudan and the Challenges Ahead", Congressional Research Service, (September 2016), 1-6

³⁹ Blanchard, Conflict in South Sudan and the Challenges Ahead, 6

Tuduhan korupsi dan penyebaran isu kudeta. hal inilah yang menyebabkan adanya sebuah gerakan yang dikenal dengan SPLM-IO yang melawan pemerintahan Sudan Selatan saat itu.

2.1.1. Krisis Ekonomi

Awal kemerdekaan Sudan Selatan terjadi pada krisis ekonomi yang menyebabkan berhentinya produksi minyak di Khartoum.⁴⁰ Hal ini menjadi penting bagi Sudan Selatan dimana 60% dari produk domestik bruto (PDB) merupakan hasil dari ekspor minyak dan 98% pendapatan pemerintah Sudan Selatan berasal dari penjualan minyak.⁴¹ Sudan Selatan menghentikan produksi minyak 350.000 barel per hari pada Januari 2012.⁴² Penghentian produksi minyak ini disebabkan oleh kurangnya akses dalam mengekspor produk minyak. Negara Sudan Selatan merupakan negara *landlock* atau negara yang tidak secara langsung berbatasan dengan laut. Hal ini menyebabkan Sudan Selatan harus menggunakan akses pipa minyak untuk menyalurkan produksi minyak ke pelabuhan-pelabuhan terdekat. Salah satu negara yang dapat membantu Sudan Selatan dalam menyalurkan produksi minyak adalah negara Sudan.

Setelah resminya Sudan Selatan lepas dari negara Sudan pada tahun 2011. Sudan Selatan dan Sudan masih memiliki perselisihan yang berkaitan dengan pembagian sumber daya alam. Sebelum lepasnya Sudan Selatan menjadi negara yang merdeka. Sudan sangat tergantung dengan wilayah Sudan Selatan atau dahulunya dikenal dengan Sudan bagian Selatan. Wilayah Sudan bagian Selatan

⁴⁰ Al Jazeera. "South sudan loses control of key oil-rich city," Aljazeera <https://www.aljazeera.com/news/africa/2013/12/envoys-head-south-sudan-as-fighting-rages-20131222112124655142.html> (Diakses pada 28 oktober 2018)

⁴¹ El wathing kameir, "The political economy south sudan- a scoping analytical study," The African Development Bank report, 2011

⁴² Eike Grawert and Christine Andra, "Brief 48 – oil investment and conflict upper Nile state," South Sudan. Bonn International Center for Conversion report, May 2013.

ini memiliki keunggulan dari semua wilayah Sudan yaitu banyaknya cadangan minyak yang terkandung dalam buminya. Adapun 2/3 minyak yang ada di Sudan berasal dari wilayah Sudan bagian Selatan. Produksi minyak sangatlah penting bagi kedua negara hal tentu merujuk pada ketergantungan kedua negara terhadap penjualan minyak yang mempengaruhi pendapatan kedua negara. Dampak negatif yang dirasakan oleh kedua negara adanya defisit ekonomi.



Gambar 2.1 Kilang Minyak Sudan dan Sudan Selatan
Sumber: Putri Cahyani, 2015.

Dampak negatif terhadap perekonomian negara Sudan dimana terjadi defisit pendapat negara diakibatkan kurangnya penjualan pasokan minyak yang merupakan komoditas utama ekspor.⁴³ Dari sisi Sudan Selatan, adanya pemisahan diri dengan negara Sudan membuat Sudan Selatan sedikit kesulitan dalam mengekspor minyaknya terlebih Sudan selatan merupakan negara yang

⁴³ The Daily Star."South Suda's Kiir Gets Regional backing, army says wins back oil town. The Daily Star, <http://www.dailystar.com.lb/News/Middle-East/2013/Dec-28/242493-s-sudans-kiir-gets-regional-backing-army-says-wins-back-oil-town.ashx#axzz2oNa3sbT8> (Diakses pada 28 oktober 2018)

landlocked.⁴⁴ Sudan Selatan membutuhkan pipa minyak milik Sudan untuk mengekspor minyaknya melalui Port Sudan.

Setelah melakukan perundingan didapatkan kesepakatan bahwa Sudan Selatan akan membayar sewa terhadap penggunaan pipa Sudan. Sudan Selatan harus membayar sebesar \$11 per barel untuk pipa minyak ditambah \$15 per barel sebagai bagian dari kompensasi dan \$3 Miliar untuk pendapatan minyak yang hilang.⁴⁵ Perjanjian ini ternyata sangat merugikan Sudan Selatan dimana perjanjian tersebut tidak merujuk kepada dinamika harga minyak dunia sehingga walaupun harga minyak turun, Sudan Selatan akan membayar biaya yang sama sesuai isi perjanjian.

Defisit yang dialami Sudan Selatan yang diakibatkan berhentinya produksi minyak telah menyentuh angka 40%.⁴⁶ Hal ini mengakibatkan pemerintah Sudan Selatan sangat fokus terhadap perekonomian. Pemerintah Sudan Selatan melakukan penghematan anggaran negara dengan melakukan pemotongan terhadap biaya-biaya yang dikeluarkan negara. Pemerintah Sudan Selatan juga mendapatkan bantuan asing namun adanya perbedaan antara nilai tukar resmi dan pasar paralel menyebabkan kerugian modal setara dengan total semua bantuan asing yang telah diterima Sudan Selatan. Kegagalan pemerintah Sudan dalam menanggulangi krisis yang terjadi telah mengakibatkan tingginya tingkat pelanggaran hukum. Pencurian dan penjarahan oleh pasukan keamanan yang belum dibayar sehingga menimbulkan permasalahan sosial yang signifikan.

⁴⁴ Acaps."South Sudan: Country Profile", <https://www.acaps.org/country/south-sudan/country-profile> (Diakses pada 28 oktober 2018).

⁴⁵ South Sudan Humanitarian Project,"Implications of the economic crisis in south sudan,"South Sudan Humanitarian Project report.

⁴⁶ Luka Biong and pamela lomoro, laura james, rosalind marsden"Domestic and regional implication of the economic crisis in south sudan," Chatham house the royal institute of internasional affairs – african program meeting summary 2016.

2.1.2. Korupsi

Awal kemerdekaan Sudan Selatan menunjukkan beberapa fungsi pemerintahan tidak berjalan dengan baik, hal ini terlihat dari Presiden Salva Kiir tidak mengumumkan susunan pemerintahan baru pasca kemerdekaan.⁴⁷ Presiden Salva Kiir Sudan Selatan masih sulit mengakomodasi kepentingan dari kelompok elit politik di sekitarnya. Masyarakat internasional juga menilai bahwa pemerintah Sudan Selatan belum memiliki kapasitas dalam menjalankan pemerintahannya. Desakan masyarakat Internasional yang menginginkan adanya perubahan besar yang merujuk pada pemenuhan hak asasi manusia, kepastian hukum dan pemerintahan yang memiliki kapabilitas telah membuat pemerintah Sudan Selatan sedikit pesimis terhadap Sudan Selatan.

Adanya krisis ekonomi pasca kemerdekaan yang diakibatkan oleh adanya pemberhentian produksi minyak menyebabkan negara Sudan Selatan mengalami defisit ekonomi. Presiden Salva Kiir yang belum dapat menjalankan pemerintahan dengan baik harus juga dihadapkan dengan permasalahan ekonomi yang berdampak signifikan terhadap masyarakat Sudan Selatan. Masyarakat kemudian menilai pemerintah tidak dapat memenuhi hak-hak masyarakat sipil dan menuduh pemerintah telah melakukan penggelapan uang dengan program penghematan. Mendengar hal yang demikian Salva Kiir menuduh pejabat senior dan mantan penjabatlah yang menggelapkan uang negara.⁴⁸ Kemudian presiden Salva Kiir merombak seluruh kabinetnya, menghapus elit terkemuka seperti mantan Wakil Presiden Rick Machar, lalu menembaki se-kelompok etnis, menteri kabinet dan

⁴⁷ Jason Burke. "South Sudan: is the renewed violence the restart of civil war?", the guardian, <https://www.theguardian.com/world/2016/jul/12/south-sudan-is-the-renewed-violence-the-restart-of-civil-war> (Diakses pada 12 november 2018).

⁴⁸ Putri Cahyani, 89-90

pejabat tinggi. Presiden Salva Kiir menuduh 75 menteri dan pejabat telah menggelapkan uang negara sebesar \$4 miliar dan meminta uang tersebut dikembalikan.⁴⁹ Beberapa sumber berita seperti Al-jazeera menyebutkan bahwa hanya 1,5% uang negara yang dikembalikan. Dana tersebut kemudian dialokasikan kembali pada sektor minyak dalam upaya dalam penanganan kasus krisis ekonomi yang sedang terjadi.⁵⁰

Adanya pemecatan mantan presiden Riek Machar dan adanya pembunuhan yang dilakukan pemerintah terhadap para pejabat pemerintahan dengan etnis tertentu telah membuat beberapa militan yang tergabung dalam SPLM membuat suatu gerakan melawan pemerintahan. Beberapa anggota SPLM yang merupakan anggota militer yang setia dengan Riek Machar sangat kecewa dengan tindakan yang dilakukan pemerintah dengan memberhentikan Wakil Presiden Riek Machar dan menuduhnya melakukan korupsi.

2.1.3. Penyebaran Isu Kudeta

Ketegangan politik yang berkembang di antara para pemimpin utama Sudan Selatan meletus dalam kekerasan. Sengketa politik yang memicu krisis tidak didasarkan pada identitas etnis, tetapi itu tumpang-tindih dengan keluhan-keluhan etnis dan politik yang sudah ada sebelumnya yang memicu bentrokan bersenjata dan pembunuhan etnis yang ditargetkan di ibukota, Juba. Bentrokan ini telah dipicu oleh beberapa faktor seperti kondisi krisis pasca kemerdekaan, pemerintahan yang belum dapat berjalan dengan baik dan stigma-stigma negatif antar pejabat pemerintahan.

⁴⁹ Aziza Geleta Dessalegn, "Cause and Consequence of Conflict in South Sudan," *Internasional Journal of Political Science and Development* 50, no.40 (Januari 2017): 17.

⁵⁰ Dessalegn, "Cause and Consequence of Conflict in South Sudan," 17.

Konflik ini berakar ketika Dr. Riek Machar, Wakil Ketua SPLM pertama, menyatakan niatnya untuk ikut serta dalam kepemimpinan SPLM. Menurut Dr. Riek Machar hal tersebut adalah hak demokrasinya.⁵¹ Melihat hal situasi demikian, Presiden Salva Kiir menganggapnya sebagai upaya kudeta yang akan dilakukan oleh Dr. Riek Machar.⁵² Segera setelah itu lebih banyak keputusan kepresidenan menyusul pemecatan Dr. Riek Machar sebagai Wakil Presiden, membubarkan kabinet dan menanggukhan Sekretaris Jenderal SPLM dan menundukannya pada investigasi kriminal atas tuduhan korupsi dan penggelapan uang negara. Adanya tuduhan ini membuat ketegangan politik semakin memanas di kabinet.

2.2. Dinamika Konflik Sipil

Konflik sipil di Sudan Selatan merupakan konflik internal antar pihak pemerintah Sudan Selatan dan pihak pemberontak yang berasal anggota militer negara yang kecewa terhadap pemerintahan Presiden Salva Kiir. Ketegangan politik terlihat dari kedua belah pihak bahkan sebelum pecahnya perang sipil di ibu kota Juba. Presiden Salva Kiir telah menuduh mantan wakil presiden Riek Machar telah berupaya melakukan kudeta. Machar kemudian memberikan respon bahwa tuduhan yang ditujukan kepadanya adalah tidak benar dan kembali menuduh Salva Kiir telah melakukan korupsi dan menutupinya dengan menuduh Machar telah melakukan kudeta. Padahal sebelumnya Machar merupakan pemimpin dari gerakan pembebasan Sudan Selatan (SPLM) sewaktu perang sipil

⁵¹ Hannah McNelsh, "South Sudan's Machar speaks to Al Jazeera," Aljazeera <https://www.aljazeera.com/indepth/features/2013/12/south-sudan-machar-speaks-al-jazeera-2013121961331646865.html> (Diakses pada 28 oktober 2018)

⁵² Musaaazi Namiti, "Analysis: Struggle for power in South Sudan," Aljazeera: <https://www.aljazeera.com/indepth/features/2013/12/analysis-struggle-power-south-sudan-20131217845861691.html> (Diakses pada 28 oktober 2018)

di Sudan. Hal tersebut menciptakan adanya tuduhan kudeta membuat perpecahan di tubuh SPLM dan kemudian memisahkan diri dan membentuk gerakan baru untuk melawan pemerintahan.

2.2.1 Konflik sipil 2013-2014

Bentrokan pun pecah pada 14 Desember 2013 di ibukota Sudan Selatan, Juba antara penjaga kepresidenan dengan kelompok pemberontak.⁵³ Presiden Salva Kiir mengklaim bahwa bentrokan di mulai ketika personel berseragam yang tidak dikenal mulai menembak pada pertemuan SPLM. Kondisi pertemuan kemudian menjadi arena pertarungan antara pihak pemerintah dan pihak pemberontak.

Adanya doktrin militer bahwa yang menyebabkan pemberontakan adalah faksi dari tubuh militer yang tidak puas terhadap pemerintahan Presiden Salva Kiir.⁵⁴ Doktrin militer tersebut juga diperkuat dengan pengakuan Menteri Luar Negeri Barnaba Marial Benjamin bahwa pelaku dari kudeta adalah tentara yang tidak puas dan politisi yang dipimpin oleh Machar. setidaknya sepuluh orang politisi kabinet Salva Kiir dikonfirmasi telah ditahan, tujuh dikonfirmasi sebagai mantan menteri termasuk mantan Keuangan.⁵⁵

Setelah insiden tersebut presiden Salva Kiir melakukan konferensi pers di televisi nasional pada 16 Desember, mengatakan bahwa kudeta telah digagalkan, kudeta tersebut telah diatur oleh sekelompok tentara yang bersekutu dengan

⁵³ Aljazeera, "South Sudan violence spreads from capital", Aljazeera: <https://www.aljazeera.com/video/africa/2013/12/south-sudan-violence-spreads-from-capital-20131218123217186850.html> (Diakses pada 20 november 2018)

⁵⁴ Putri Cahyani, " Analisis Konflik Sudan Selatan Pasca Rederendum Pemisahan Diri Sudan Selatan", *Journal of Internsional Relations* , No. 4 2017

⁵⁵ Aljazeera, "South Sudan violence spreads from capital" Aljazeera: <https://www.aljazeera.com/video/africa/2013/12/south-sudan-violence-spreads-from-capital-20131218123217186850.html> (Diakses pada 28 oktober 2018)

mantan wakil presiden.⁵⁶ Pada 21 Desember, pemerintah mengumumkan kesiapan tanpa syarat untuk mengadakan pembicaraan damai dengan kelompok pemberontak, termasuk Machar, Kiir memperingatkan pertempuran itu menjadi konflik suku.⁵⁷

Di sisi lain Machar berbicara untuk pertama kalinya bahwa dia tidak mengetahui adanya upaya kudeta, tetapi malah menyalahkan Presiden Salva Kiir karena mengarang tuduhan kudeta menaikan pamor politik dan menargetkan lawan politik. Machar menuduh Presiden Salva Kiir menghasut ketegangan etnis untuk mencapai tujuannya.⁵⁸

Setelah terjadi Bentrokan pertama yang menewaskan anggota kabinet Presiden Salva Kiir dan faksi pemberontak. Pemberontakan selanjutnya telah menewaskan ratusan warga sipil tewas yang menargetkan kelompok etnis Machar yaitu etnis Nuer. Selanjutnya aksi balas dendam Riek Machar yang didukung beberapa komandan militer dari Etnis Nuer senior yang tergabung dalam *Nuer White Army*, kemudian Machar mengumumkan pemberontakan terhadap pemerintahan Salva Kiir.⁵⁹ Konflik pecah antara pasukan pemerintah dan anggota militer yang setia kepada Presiden Salva Kiir dan pasukan pemberontak yang dipimpin Riek Machar.

⁵⁶ John Young, "Isolation and Endurance Riek Machar and the SPLM-IO," The Human Security Baseline Assesment (HSBA) report, (october 2017)

⁵⁷ Aljazeera, "South Sudan violence spreads from capital", Aljazeera: <https://www.aljazeera.com/video/africa/2013/12/south-sudan-violence-spreads-from-capital-20131218123217186850.html> (Diakses pada 20 november 2018)

⁵⁸ Aljazeera, "South Sudan violence spreads from capital", Aljazeera: <https://www.aljazeera.com/video/africa/2013/12/south-sudan-violence-spreads-from-capital-20131218123217186850.html> (Diakses pada 20 november 2018)

⁵⁹ John Young, "Isolation and Endurance Riek Machar and the SPLM-IO", The Human Security Baseline Assessment (HSBA) report, (october 2017)

Pasukan pemerintah presiden Salva Kiir didukung oleh *Sudan People's Liberation Movement (SPLM)* atau tentara Republik Sudan Selatan. SPLM diperkirakan memiliki 210.000 personil militer.⁶⁰ Salva Kiir juga didukung dengan *The South Sudan Liberation Movement (SSLM)*, kelompok bersenjata yang beroperasi pada wilayah perbatasan.⁶¹ Walaupun kelompok bersenjata ini merupakan etnis Nuer namun pada tahun 2013 berasimilasi dengan personil militer SPLM untuk melawan pihak pemberontak. Dukungan juga datang dari negara Mesir dan Uganda kepada pemerintah Sudan Selatan.

Pasukan pemberontak yang dipimpin oleh Machar tergabung ke dalam aliansi anti pemerintahan yaitu seperti *Sudan People's Liberation Movement-in-Opposition (SPLM-IO)* merupakan gerakan anti pemerintah yang merupakan bagian dari *Sudan People's Liberation Movement* yang memisahkan diri akibat ketegangan politik yang terjadi antara Presiden Salva Kiir dan Machar.⁶² Kelompok inilah yang nantinya menjadi pemain kunci terhadap gerakan pemberontakan di Sudan Selatan. Kelompok ini merupakan kelompok mayoritas etnis Machar atau etnis Nuer. Selain itu Machar mendapat dukungan dari *Nuer Army White* atau organisasi militer yang dibentuk oleh orang-orang Nuer. Adanya serangan pemerintah Salva Kiir terhadap etnis Nuer mengakibatkan banyak pemberontak yang beretnis Nuer saling berafiliasi melawan pemerintahan. Selanjutnya Machar juga didukung oleh *South Sudan Democratic Movement*

⁶⁰Richard Rands SPLA Transformation in 2006-10 and Beyond". Small arms survey HSBA working Paper. Nov 2010

⁶¹ Richard Rands,1-3.

⁶² Jason Burke,"South Sudan: is the renewed violence the restart of civil war?",the guardian, <https://www.theguardian.com/world/2016/jul/12/south-sudan-is-the-renewed-violence-the-restart-of-civil-war> (Diakses pada 20 november 2018)

(SSDM) yang merupakan militan yang sangat anti terhadap SPLM pemerintah Salva Kiir.



Gambar 2.2. Kondisi Konflik Sipil Sudan Selatan

Sumber: Vox, 2016.

Konflik sipil tersebut telah menjadikan Sudan Selatan menjadi arena pertempuran. PBB melaporkan bahwa 13.000 orang berlindung dari pertempuran.⁶³ Kondisi ibu kota sangat tidak memungkinkan untuk ditinggali, beberapa pelajar bahkan dibunuh. PBB mengumumkan bahwa ribuan orang mencari perlindungan di dalam kompleks PBB. Dua pasukan pemelihara perdamaian India tewas membantu melindungi 36 warga sipil di Akobo, Jonglei, ketika mereka diserang oleh sekitar 2.000 pemuda bersenjata.⁶⁴ Para penyerang tampaknya berniat membunuh warga sipil yang berlindung di markas PBB.⁶⁵

Selain warga sipil Sudan Selatan yang mencari perlindungan ke markas PBB yang ada di Juba, sekitar 200 karyawan operasi minyak asal Tiongkok juga mencari perlindungan ke markas PBB di Bentiu. Karyawan tersebut berasal dari Perusahaan minyak asal Tiongkok seperti *China National Petroleum Corp.*

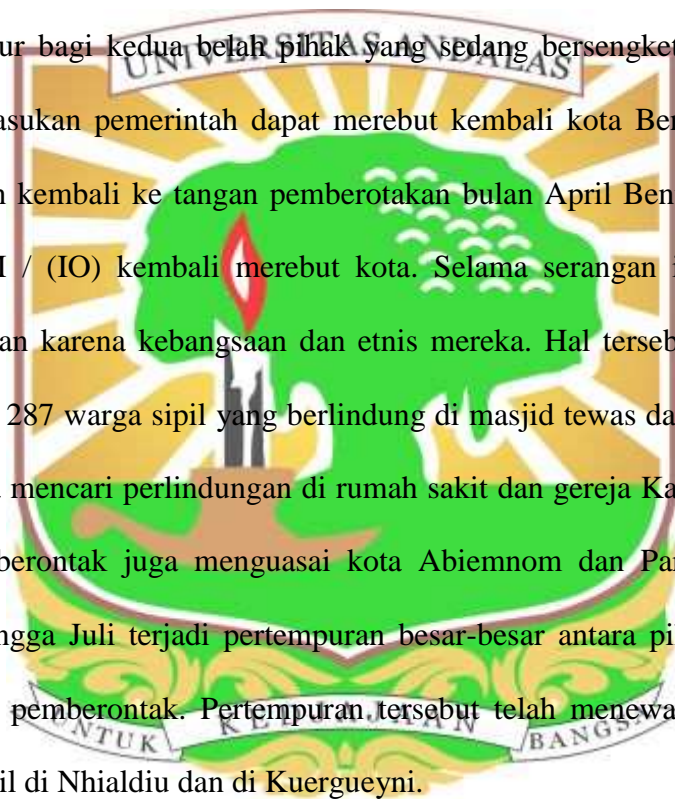
⁶³ Putri Cahyani, 102

⁶⁴ Putri Cahyani, 102-104

⁶⁵ Putri Cahyani, 109

Sebelumnya konflik sipil ini telah menewaskan 16 karyawan minyak. Para pasukan pemerintah kemudian mengambil alih ladang dan mengatakan bahwa produksi berjalan normal. Pemberontak telah dilaporkan mengambil alih setidaknya beberapa ladang minyak.

Pada 20-21 Desember SPLM / (IO) atau pasukan pemberontak Machar merebut ibukota negara, Bentiu.⁶⁶ Terjadi pembantaian terhadap suku di negara bagian Bentiu. PBB menyebutkan bahwa pertempuran tersebut adalah perubahan wilayah tempur bagi kedua belah pihak yang sedang bersengketa hal ini dapat dilihat dari pasukan pemerintah dapat merebut kembali kota Bentiu pada bulan Januari namun kembali ke tangan pemberontakan bulan April Bentiu dihancurkan setelah SPLM / (IO) kembali merebut kota. Selama serangan itu, warga sipil menjadi sasaran karena kebangsaan dan etnis mereka. Hal tersebut diperkirakan bahwa sekitar 287 warga sipil yang berlindung di masjid tewas dan lainnya tewas ketika mereka mencari perlindungan di rumah sakit dan gereja Katolik. Selain itu pasukan pemberontak juga menguasai kota Abiemnom dan Pariang.⁶⁷ Selama bulan Mei hingga Juli terjadi pertempuran besar-besaran antara pihak pemerintah dengan pihak pemberontak. Pertempuran tersebut telah menewaskan lebih dari 100 warga sipil di Nhialdiu dan di Kuergueyni.



⁶⁶ Jason Burke. "South Sudan: is the renewed violence the restart of civil war?", the guardian, <https://www.theguardian.com/world/2016/jul/12/south-sudan-is-the-renewed-violence-the-restart-of-civil-war>

⁶⁷ Aljazeera. "South Sudan Loses Control Of Key Oil-Rich City", Aljazeera <https://www.aljazeera.com/News/Africa/2013/12/Envoy-Head-South-Sudan-As-Fighting-Rages-20131222112124655142.html>

Pada 22 Desember 2013, utusan AS dan Nigeria sedang dalam perjalanan ke Juba untuk mencoba menegosiasikan solusi.⁶⁸ Utusan AS ke negara itu, Donald Booth, mengatakan bahwa setelah berbicara dengan Presiden Salva Kiir, yang terakhir berkomitmen untuk berbicara dengan Machar tanpa prasyarat. Machar mengatakan bahwa pihak pemberontak siap untuk pembicaraan yang mungkin bisa terjadi di Ethiopia. Dia mengatakan dia menginginkan pemilihan yang bebas dan adil dan yang terbaik adalah Kiir pergi.

Pada Januari 2014, IGAD dan beberapa aktor lainnya seperti Uni Afrika, PBB, Tiongkok, Uni Eropa, AS, Inggris dan Norwegia memulai memfasilitasi negosiasi antara pemerintah dan pihak pemberontak.⁶⁹ Namun sebelum negosiasi dimulai pihak pemerintah melakukan serangan ke daerah-daerah yang dikuasai oleh pihak pemberontak. Tiongkok dan IGAD mengupayakan adanya negosiasi antara kedua belah pihak yang akan bertempat di Addis Ababa Ethiopia.⁷⁰ Ethiopia menjadi tempat negosiasi dengan pertimbangan bahwa merupakan tempat yang netral untuk melakukan perundingan. Pada 23 Januari 2014, perwakilan dari Pemerintah Sudan Selatan dan perwakilan pemimpin pemberontak Riek Machar mencapai kesepakatan gencatan senjata di Ethiopia. Kesepakatan telah menyetujui 11 poin kesepakatan dimana diantaranya kesepakatan untuk gencatan senjata, melindungi warga sipil, membuka akses bantuan kemanusiaan dan membentuk badan khusus untuk mengawasi pelanggaran kesepakatan.

⁶⁸ Aljazeera. "South Sudan Loses Control Of Key Oil-Rich City", Aljazeera
<https://www.aljazeera.com/news/africa/2013/12/Envoy-Head-South-Sudan-As-Fighting-Rages-20131222112124655142.html> (Diakses Pada 20 September 2018)

⁶⁹ Zhou Hang, 7

⁷⁰ Jason Hanna and Susanna Capelouto CNN, "South Sudan, rebels reach ceasefire after weeks of fighting", CNN, <https://edition.cnn.com/2014/01/23/world/africa/south-sudan-ceasefire/>

Adapun pihak eksternal yang membantu proses perdamaian konflik sipil ini adalah IGAD atau otoritas pembangunan antar pemerintah Afrika dan beberapa negara seperti Tiongkok, Amerika Serikat dan Uni Eropa. Perjanjian damai yang dilakukan Presiden Salva Kiir dan Riek Machar pada 9 Mei 2014 merupakan hasil dari upaya IGAD dalam Proses perdamaian di Sudan Selatan.⁷¹ Perjanjian ini berhasil membuat gencatan senjata sementara, membuka bantuan kemanusiaan dan mendorong situasi yang aman agar petani dapat kembali menanam untuk menghindari bahaya kelaparan. Namun hal ini tidak berlangsung lama setelah perjanjian damai tersebut ditandatangani oleh kedua belah pihak.

Perjanjian damai lainnya terjadi pada November 2014, dimana kedua belah pihak memperbarui perjanjian gencatan senjata. mediator IGAD memberikan waktu 15 hari untuk mencapai kesepakatan pembagian kekuasaan, mengancam sanksi jika kesepakatan ini gagal atau dilanggar lagi. Namun kesepakatan ini berujung pada pertempuran sipil yang lebih besar yang terjadi di bagian utara Sudan Selatan.

2.2.2 Konflik sipil 2015-2016

Sebelum adanya perjanjian damai, Tiongkok sebelumnya telah mengupayakan gencatan senjata pada Januari 2015. Ini merupakan upaya Tiongkok untuk menjaga stabilitas di Sudan Selatan dalam mengupayakan terciptanya perdamaian. gencatan senjata ini merupakan gencatan senjata putaran ketiga dimana sebelumnya, IGAD dan negara-negara yang menjadi mediator pada konflik ini mengupayakan forum damai. gencatan senjata pada awal 2015 merupakan kontribusi besar Tiongkok yang dilakukan selama proses perdamaian

⁷¹ Daniel Larg, "China's Sudan Engagement: Changing Northern and Southern Political Trajectories in Peace and War" The China Quarterly, (september 2009).

berlangsung. Hal ini dikarenakan Tiongkok dapat mengkonsolidasi kepentingan dengan pihak pemerintah maupun pihak pemberontak sehingga terjadinya gencatan senjata dan pembebasan perusahaan minyak yang ditahan oleh pihak pemberontak. anggota mediator dari pihak pemberontak pun mengatakan bahwa adanya pertemuan dan diskusi yang telah berlangsung dengan pihak mediator telah menurunkan tensi negatif antar kedua belah pihak.

Pada akhir Agustus 2015, setelah beberapa perjanjian yang dilanggar kedua belah pihak, kedua belah pihak akhirnya menyetujui perjanjian damai yang di mediasi oleh IGAD dengan beberapa negara seperti Tiongkok dan Uni Eropa.⁷² Perjanjian ini memiliki signifikansi terhadap keadaan damai sementara yang dirasakan oleh masyarakat Sudan Selatan. Perjanjian dikenal dengan *Agreement on The Resolution Of The Conflict in The Republic Of South Sudan*.⁷³ Kesepakatan itu akan membuat Riek Machar menjadi wakil presiden lagi. Perjanjian tersebut *Joint Monitoring and Evaluation Commission* (JMEC) yang bertanggung jawab untuk memantau dan mengawasi pelaksanaan perjanjian. Ini lah yang membedakan dengan perjanjian damai sebelumnya, perjanjian *Compromise Peace Agreement* memiliki tingkat delegasi yang tinggi sehingga adanya lembaga yang mengawasi perjanjian.⁷⁴

Pada 20 Oktober 2015, Uganda mengumumkan bahwa mereka akan secara sukarela menarik tentaranya dari Sudan Selatan, sesuai dengan perjanjian damai

⁷² Aljazeera.” South Sudan Loses Control Of Key Oil-Rich City”, Aljazeera
<https://www.aljazeera.com/news/africa/2013/12/envoys-head-south-sudan-as-fighting-rages-20131222112124655142.html> (Diakses Pada 20 September 2018)

⁷³ Daniel Large. “China's Sudan Engagement: Changing Northern and Southern Political Trajectories in Peace and War” *The China Quarterly*, (september 2009), 197

⁷⁴ Large, 197

tersebut.⁷⁵ Pada Desember 2016 ketika kondisi Sudan Selatan telah dianggap stabil. Presiden Sudan Selatan Salva Kiir mengumumkan kebijakan untuk memperbanyak negara bagian dari 10 menjadi 28 negara bagian.⁷⁶ Selanjutnya Presiden Salva Kiir mengangkat beberapa gubernur untuk memimpin negara bagian tersebut.⁷⁷ Amanda Apherber dalam artikelnya menyatakan bahwa adanya pembagian negara-negara Sudan Selatan adalah permainan kekuasaan oleh Presiden Salva Kiir dimana perbatasan negara-negara yang dirancang memastikan bahwa suku Dinka merupakan suku mayoritas di negara bagian tersebut.⁷⁸

Kebijakan pembagian batasan wilayah tersebut menimbulkan gelombang amarah pihak pemberontak. Salah satu tentara pemberontak menyatakan bahwa “pintu perdamaian di Sudan Selatan telah ditutup, pengangkatan 28 gubernur negara bagian merupakan deklarasi perang terhadap rakyat Sudan Selatan”.⁷⁹ Pihak pemberontak memandang bahwa kebijakan pembagian 28 negara bagian

⁷⁵ Jok P Mayom, “The leader of the Cobra Faction and South Sudan Democratic Movement (SSDM), General David Yau Yau Jongkuch has officially dissolved his party and joined the ruling SPLM under the chairmanship of President Salva Kiir Mayardit”, Gurtong, <http://www.gurtong.net/AboutGurtong/tabid/146/Default.aspx> (Diakses pada 20 oktober 2018)

⁷⁶ Amanda Spenber, “Just when a peace deal seemed within reach, President Salva Kiir is threatening to plunge the country back into bloody conflict,” Foreign Policy, <https://foreignpolicy.com/2016/01/22/south-sudan-next-civil-war-is-starting-shilluk-army/> (Diakses pada 13 oktober 2018)

⁷⁷ AlJazeera, “South Sudan president creates 28 new states,” AlJazeera, <https://www.aljazeera.com/news/2015/12/south-sudan-president-creates-28-states-151225101750723.html> (Diakses pada 26 september 2018)

⁷⁸ Amanda Spenber, “Just when a peace deal seemed within reach, President Salva Kiir is threatening to plunge the country back into bloody conflict,” Foreign Policy, <https://foreignpolicy.com/2016/01/22/south-sudan-next-civil-war-is-starting-shilluk-army/> (Diakses pada 13 oktober 2018)

⁷⁹ Amanda Spenber, “Just when a peace deal seemed within reach, President Salva Kiir is threatening to plunge the country back into bloody conflict,” Foreign Policy, <https://foreignpolicy.com/2016/01/22/south-sudan-next-civil-war-is-starting-shilluk-army/> (Diakses pada 13 oktober 2018)

adalah sebagai penghinaan.⁸⁰ Kebijakan ini juga mempertegas bahwa gerakan pemberontak di bawah tekanan pemerintah Sudan Selatan. Adanya kebijakan pembagian daerah ini juga membuat pasukan militer etnis Shilluk yang sebelumnya memihak pada pemerintahan presiden Salva Kiir beralih kepada pihak pemberontak.⁸¹ Etnis Shilluk merupakan etnis terbesar ketiga di Sudan Selatan. Etnis kecewa terhadap pemerintahan Salva Kiir dengan kebijakan pembagian negara bagian dan memperkuat dominasi dari etnis Dinka di setiap negara bagian.⁸²

Kondisi konflik mulai memanaskan sejak awal tahun 2016, terjadi beberapa penembakan yang ilegal dari kedua belah pihak. Barulah pada awal Juli 2016 terjadi bentrokan konflik sipil yang kedua dan terbesar selama konflik berlangsung. Pada awal Juli 2016, Seorang militan setia kepada Machar, Letnan Kolonel George Gismala dibunuh oleh personil keamanan pemerintah.⁸³ Pembunuhan itu menyebabkan meningkatnya ketegangan di dalam beberapa pasukan keamanan di Juba. 3 hari setelah insiden tersebut, tentara yang setia pada Machar diserang di pos pemeriksaan pemerintah. Insiden itu menewaskan 5 tentara pemerintah dan 2 tentara dari afiliasi yang tidak ditentukan terluka.⁸⁴

Bentrokan terjadi pada pertemuan damai antara pihak Presiden Salva Kiir dan Riek Machar yang diadakan di Juba. Bentrokan tersebut telah menewaskan 115

⁸⁰ Amanda Spenber, "Just when a peace deal seemed within reach, President Salva Kiir is threatening to plunge the country back into bloody conflict", Foreign Policy, <https://foreignpolicy.com/2016/01/22/south-sudan-next-civil-war-is-starting-shilluk-army/> (Diakses pada 13 oktober 2018)

⁸¹ Sudan Tribune, "Tiger faction of ethnic Shilluk kingdom dismisses integration into SPLM-IO", Sudan Tribune (Diakses pada 13 oktober 2018)

⁸² Sudan Tribune, "Tiger faction of ethnic Shilluk kingdom dismisses integration into SPLM-IO", Sudan Tribune (Diakses pada 13 oktober 2018)

⁸³ Lauren Ploch Blanchard, 16

⁸⁴ BBC, "South Sudan: Heavy gunfire following death of soldiers", BBC, <https://www.bbc.com/news/world-africa-36744636> (Diakses pada 4 Januari 2018)

orang dari kedua belah pihak.⁸⁵ Bentrokan juga terjadi pada markas PBB yang diserang oleh tentara dari pihak pemerintah. Pertempuran kembali terjadi di Juba pada 10 juli.⁸⁶ Seorang penjaga perdamaian PBB Tiongkok terbunuh, dan 2 lainnya terluka kritis. Pertempuran berlanjut hingga pada tanggal 12 juli terjadi kesepakatan gencatan senjata.⁸⁷

Bentrokan tersebut telah telah mengakibatkan 300 orang tewas dalam pertempuran itu, termasuk setidaknya 33 warga sipil dan 2 penjaga perdamaian Tiongkok. sekitar 36.000 warga sipil melarikan diri dari bagian kota karena bentrokan. Banyak toko telah dijajah selama konflik.⁸⁸

Keadaan setelah bentrokan semakin membuat hubungan kedua pihak memburuk. Hal ini dapat dilihat, pada bulan November, Riek Machar mengatakan SPLM-IO tidak akan berpartisipasi dalam sebuah lokakarya yang diselenggarakan oleh JMEC, Riek Machar mengatakan perjanjian perdamaian perlu direvisi.⁸⁹ Pada bulan September, Lam Akol, pemimpin partai pemberontak terbesar, Perubahan Demokratik, mengumumkan sebuah faksi baru yang disebut Gerakan Demokrasi Nasional (NDM) untuk menggulingkan Kiir. Keadaan setelah bentrokan



⁸⁵ The Gulf Today,” S.Sudan clashes kill over 150 soldiers”,the Gulf Today, <http://gulftoday.ae/portal/86bfdc4d-b832-49bb-826f-0f7c149a40bd.aspx?>(Diakses pada 23 desember 2018)

⁸⁶ The Gulf Today,” S.Sudan clashes kill over 150 soldiers” ,the Gulf Today, <http://gulftoday.ae/portal/86bfdc4d-b832-49bb-826f-0f7c149a40bd.aspx?>(Diakses pada 23 desember 2018)

⁸⁷ BBC,” South Sudan: Heavy gunfire following death of soldiers”,BBC, <https://www.bbc.com/news/world-africa-36744636> (Diakses pada 4 januari 2018)

⁸⁸ Josh Chin” Violence in South Sudan Kills Two Chinese U.N. Peacekeepers”, The Wall Street Journal, <https://www.wsj.com/articles/violence-in-south-sudan-kills-chinese-u-n-peacekeeper-1468224678>

⁸⁹ James Butty,” South Sudan’s Riek Machar Calls for Armed Struggle”,VOA nwes, <https://www.voanews.com/a/south-sudan-riek-machar-calls-for-arnes-struggle/3525045.html>

2.2.3 Konflik sipil 2017-2018

Setelah insiden pelanggaran gencatan senjata pada tahun 2016. Kondisi konflik sipil di Sudan Selatan semakin memburuk. Pihak pemberontak yang diketuai oleh Riek Machar meminta adanya revisi perjanjian gencatan senjata hal ini dikarenakan tidak efektifnya dalam menjamin penggunaan kekerasan bagi kedua belah pihak. Selanjutnya PBB mengancam untuk mengintervensi Sudan Selatan dengan pasukan militer jika kondisi kekerasan terus berlanjut di Sudan Selatan.

Pada bulan Juli 2017, terjadi insiden penyerangan yang dikenal dengan *Pagak offensive*.⁹⁰ *Pagak offensive* adalah operasi militer besar oleh pemerintah Sudan Selatan selama Perang Sipil Sudan Selatan dengan tujuan Mengambil alih kota Pagak yang strategis dan Wilayah Maiwut. Sejak perang saudara dimulai, Pagak telah menjabat sebagai markas besar dan benteng bagi para pemberontak, pengambilalihan pagak diyakini Presiden Salva Kir dapat melemahkan pemberontakan. Sebagian besar pasukan pemerintah yang ikut dalam serangan itu adalah anggota SPLM-IO (faksi Juba), kelompok yang memisahkan diri dari gerakan Machar.⁹¹ *Pagak offensive* ini telah membuat pasukan pemberontak mundur pada akhir 6 Agustus.⁹² Pada 25 Agustus, pejabat penjaga perdamaian PBB mengkonfirmasi bahwa Pagak sepenuhnya di bawah kendali pemerintah;

⁹⁰ Radio Tamazuj, "Clashes erupt in Pagak as rebels battle to retake main stronghold", Radio tamazuj, <https://radiotamazuj.org/en/news/article/clashes-erupt-in-pagak-as-rebels-battle-to-retake-main-stronghold%E2%80%83> (Diakses pada 16 desember 2018)

⁹¹ Radio Tamazuj, "Clashes erupt in Pagak as rebels battle to retake main stronghold", Radio tamazuj, <https://radiotamazuj.org/en/news/article/clashes-erupt-in-pagak-as-rebels-battle-to-retake-main-stronghold%E2%80%83> (Diakses pada 16 desember 2018)

⁹² Sudan Tribune. Sudan's SPLA controls Pagak but fighting continues in surrounding areas: UN," Sudan Tribune, <http://www.sudantribune.com/spip.php?article63335> (Diakses pada 23 desember 2018) (Diakses pada 18 desember 2018)

namun, pertempuran sengit berlanjut di daerah sekitarnya dengan koridor ke Mathiang tetap tidak aman.⁹³

Setelah operasi militer yang dilakukan oleh pihak pemerintah dan kekalahan pihak pemberontak dalam pertempuran membuat kondisi konflik sipil di Sudan Selatan mengalami dinamika baru dimana anggota-anggota Aliansi dari pihak pemberontak mulai membuat aliansi baru untuk mendorong adanya negosiasi dengan pemerintah. selanjutnya pihak eksternal seperti IGAD+ lainnya juga mengupayakan perdamaian antara kedua belah pihak. Salah satu upaya adalah perjanjian gencatan senjata permanen pada tahun 2018.

Revitalised Agreement on the Conflict in the Republic of South Sudan menjadi bentuk keberhasilan proses perdamaian yang dilakukan oleh IGAD, Tiongkok dan Amerika Serikat dan Uni Eropa.⁹⁴ Sebelumnya komunitas internasional juga telah membuat sebuah lembaga dari PBB yang bertugas untuk menjaga penduduk sipil dari dampak konflik sipil yang telah dimulai sejak tahun 2013.⁹⁵ *Revitalised Agreement on the Conflict in the Republic of South Sudan* kemudian menarik untuk dikaji bagaimana perjanjian ini dapat mengikat kedua belah pihak sehingga terjadi kesepakatan. Peran signifikansi IGAD dan beberapa negara yang ikut ambil bagian pada proses perdamaian menjadi hal yang menarik untuk dianalisis khususnya peran Tiongkok dalam proses perdamaian di Sudan Selatan.

⁹³ Sudan Tribune. Sudan's SPLA controls Pagak but fighting continues in surrounding areas: UN," Sudan Tribun, <http://www.sudantribune.com/spip.php?article63335> (Diakses pada 23 desemebr 2018) (Diakses pada 18 desember 2018)

⁹⁴ ALJAZEERA, diakses pada 20 september 2018

⁹⁵ Large, 197

2.3. Dampak Konflik Sipil Sudan Selatan

Pecahnya konflik sipil di Sudan Selatan pada tahun 2013 telah membawa dampak negatif terhadap penduduk sipil di Sudan Selatan. dampak akibat adanya konflik sipil ini tidak hanya dirasakan oleh internal dari negara Sudan Selatan namun juga negara-negara lain yang berbatasan dengan negara Sudan Selatan. selain itu konflik sipil ini juga mengancam keamanan di kawasan Afrika. Berikut ini merupakan dampak-dampak dari hasil konflik sipil yang berlangsung di Sudan Selatan.

2.3.1. Kekerasan dan Kematian

Konflik sipil di Sudan selatan antara pihak pemerintah dan pihak pemberontak telah berdampak pada adanya kekerasan yang dialami oleh penduduk sipil bahkan kekerasan terhadap penduduk sipil telah dilakukan sebelum pecahnya konflik pada desember 2013. Kekerasan yang dialami oleh penduduk sipil ini dapat dikategorikan sebagai kejahatan perang yang dilakukan oleh pihak-pihak yang berkonflik.⁹⁶ Kekerasan yang dialami oleh penduduk sipi meningkat ke hampir seluruh wilayah Sudan selatan. konflik sipil yang terjadi secara tidak proporsional mempengaruhi penduduk sipil. Diperkiraan total kematian penduduk sipil telah melebihi kematian akibat perang di Suriah. Pada november 2014 korban kekerasan telah mencapai 100.000 jiwa.⁹⁷

Kekerasan tidak hanya dirasakan oleh penduduk sipil Sudan Selatan, namun juga dirasakan oleh pekerja asing yang tergabung dalam pasukan perdamaian maupun utusan negara. Pada Juli 2014 terjadi penyerangan terhadap

⁹⁶ Kate Almquist Knopf, "Ending South Sudan's Civil War" Council Special Report, No 77 (November 2016): 14-17

⁹⁷ BBC News, "South Sudan ambush leaves six aid workers ded, UN says", BBC News, <https://www.bbc.com/news/world-africa-39400650>

penjaga perdamaian asal Tiongkok. Insiden ini membuat pasukan perdamaian asal Tiongkok mengalami keadaan kritis, 79 pekerja asing yang telah terbunuh dalam konflik sipil.⁹⁸

2.3.2. Defisit

Perang sipil telah berdampak pada pertumbuhan ekonomi Sudan Selatan. Perang telah berdampak pada pendapatan pemerintah lebih dari 98% dari penjualan minyak.⁹⁹ Konflik sipil telah mengganggu produksi minyak Sudan Selatan hampir di seluruh negara Sudan Selatan, sejak pecahnya konflik, beberapa perusahaan minyak milik pemerintah Sudan Selatan berhasil dikuasai oleh pihak pemberontak salah satunya adalah ladang minyak di Bentiu. Pada saat yang sama pendapatan pemerintah juga menurun yang diakibatkan oleh liberalisasi nilai tukar sehingga menghasilkan 90% devaluasi. Inflasi mencapai hampir 700 persen pada September 2016 dan terus meningkat.¹⁰⁰

2.3.3. Krisis Kemanusiaan

Pada Tahun 2014 dan 2015, PBB mengumumkan bahwa Sudan Selatan merupakan wilayah yang tergolong dalam darurat kemanusiaan tingkat 3 atau keadaan darurat kemanusiaan yang paling parah dan kompleks. Sudan Selatan adalah satu dari empat keadaan darurat kemanusiaan di dunia dan satu-satunya di Afrika. Sejak konflik mulai pecah hingga tahun 2016. Krisis kemanusiaan di Sudan Selatan semakin memburuk. Sudan Selatan menjadi negara dengan keadaan krisis kemanusiaan yang paling buruk setelah Suriah, Afganistan dan Somalia. Lebih dari 1,6 juta penduduk Sudan selatan telah mengungsi, termasuk hampir 200.000

⁹⁸ Knopf, "Ending South Sudan's Civil War":17

⁹⁹ Knopf, "Ending South Sudan's Civil War":18

¹⁰⁰ Knopf, "Ending South Sudan's Civil War":18

mengungsi di pengungsian PBB atau pangkalan PBB. Lebih dari 40 persen populasi menghadapi kekurangan pangan yang parah dan lebih 75 persen menghadapi ancaman keamanan pangan, tingkat kelaparan tertinggi sejak perang dimulai.¹⁰¹

2.3.4. Instabilitas Kawasan

Konflik sipil di Sudan Selatan saat ini berdampak pada stabilitas keamanan regional di kawasan Afrika. Salah satu kemungkinan yang diprediksi akan terjadi adalah adanya intervensi militer oleh Amerika Serikat.¹⁰² Amerika sendiri merupakan mitra strategi kawasan Afrika. Amerika Serikat memiliki investasi politik, keuangan, dan militer yang substansial di negara-negara Afrika seperti Ethiopia, Uganda, dan Kenya. Ancaman lainnya yang dapat mengganggu stabilitas regional kawasan Afrika adalah konflik sipil berdampak pada ketersediaan minyak di kawasan Afrika. Konflik sipil tersebut telah berdampak pada penutupan koridor energi transnasional di seluruh kawasan Afrika Tengah dan Afrika Timur.¹⁰³



¹⁰¹ Knopf, "Ending South Sudan's Civil War", 18

¹⁰² Daniel Wagner, "Regional implications Sudanese civil war", Huffpost, https://intpolicydigest-org.cdn.ampproject.org/v/s/intpolicydigest.org/2014/01/07/risks-region-south-sudan-civilwar/amp/?usqp=mq331AQECAFYAQ%3D%3D&_js_v=0.1#aoh=15461489801558&_p_ct=1546148985484&referrer=https%3A%2F%2Fwww.google.com&_tf=Dari%20%251%24s&share=https%3A%2F%2Fintpolicydigest.org%2F2014%2F01%2F07%2Frisks-region-south-sudan-civil-war%2F (Diakses pada 12 desember 2018)

¹⁰³ Daniel Wagner, "Regional implications Sudanese civil war", (diakses pada 30 desember 2018).

BAB III

HUBUNGAN TIONGKOK DENGAN SUDAN SELATAN

Dalam Bab ini penulis akan menjelaskan hubungan Tiongkok dan Sudan Selatan. Dimulai dari kepentingan Tiongkok di Sudan Selatan yang meliputi kepentingan ekonomi, politik dan militer. Tiongkok juga memiliki beberapa bidang kerjasama dengan Sudan Selatan seperti bidang *political exchange*, *economic and trade cooperation* dan *education and cultural exchange*.

3.1. Kepentingan Tiongkok di Sudan Selatan

Hubungan Tiongkok dengan Sudan Selatan telah berjalan bahkan sejak Sudan Selatan belum menjadi negara yang merdeka. Potensi yang dimiliki oleh Sudan Selatan dalam bidang sumber daya alam dan letaknya yang strategis membuat negara Tiongkok memiliki ketertarikan tersendiri dalam menjalin kerjasama dengan Sudan Selatan.

Keterlibatan Tiongkok dimulai dari negara Sudan dimana Sudan bagian Selatan masih belum memisahkan diri dari Sudan. Kemitraan yang terjalin dengan wilayah selatan Sudan adalah kemitraan pengembangan industri minyak di Khartoum pada tahun 1990-an.¹⁰⁴ Selanjutnya Tiongkok membangun perusahaan minyak pada tahun 1997.¹⁰⁵ Hubungan Tiongkok pun berlanjut dengan wilayah bagian hingga adanya *Comprehensive Peace Agreement* yang merujuk pada kemerdekaan Sudan Selatan dari negara Sudan.¹⁰⁶

Hubungan diplomatik yang baik antara Sudan Selatan dengan Tiongkok terlihat di awal kemerdekaan Sudan Selatan. Tiongkok merupakan negara pertama

¹⁰⁴ Daniel Large, "China and South's Civil war, 2013-2015", *African Studies Quarterly* 16, no. 3-4 (Desember 2016), 44-50.

¹⁰⁵ Large, 44-50.

¹⁰⁶ Sigli M. Mumuni, "China's non-Interventions policy in Africa: Principle versus pragmatism", *African Journal of Political Science and International Relations* 11, no. 9 (2017), 258-273.

yang mengakui kemerdekaan Sudan Selatan. Deng Alor Kuol, Menteri Luar negeri Tiongkok mengatakan bahwa “*The Republic of South Sudan is founded on July 9. The government of the People's Republic of China announces to recognize the country, and set up diplomatic ties at ambassadorial level with South Sudan from now on.*”.¹⁰⁷ Sebagai bentuk pengakuan kemerdekaan negara Sudan Selatan, negara Tiongkok membangun kedutaannya di Sudan sebagai bentuk kesediaannya menjalin hubungan diplomatik. Selain itu pemerintah Tiongkok ingin mengembangkan kerjasama yang bersifat rama di berbagai bidang dengan negara Sudan Selatan yang berlandaskan dengan lima prinsip koeksistensi damai.

Dinamika internal negara Sudan Selatan selama masa perang sipil juga mulai bersinggungan terhadap peran Tiongkok, walaupun Tiongkok memegang prinsip Koeksistensi Damai khususnya prinsip *non intervensi*, namun pada konflik sipil di Sudan Selatan, Tiongkok memiliki peran yang cukup signifikan terhadap proses perdamaian yang berlangsung. Tiongkok merupakan negara yang kurang berpengalaman dalam menyelesaikan konflik internal sebuah negara namun pada kasus ini Tiongkok memilih peran menjadi mediator dalam penyelesaian konflik sipil ini.¹⁰⁸ Dengan bekerjasama dengan organisasi regional dan PBB, Tiongkok saat ini tengah menerapkan uji coba peran barunya di kawasan Afrika.

Hubungan Diplomatik Tiongkok dan Sudan Selatan telah berlangsung sejak sebelum kemerdekaan hingga saat ini. Hal ini menjadi menarik untuk analisis dalam melihat kepentingan Tiongkok di Sudan Selatan. Dalam motif Tiongkok

¹⁰⁷ Ching-chiu hang dan Chin-yu Shih , *Harmonious*

Interventions s: China's Quest for Relationl Security (London: Routledge, 2014), 1-9

¹⁰⁸ Ching-chiu hang dan Chin-yu Shih , “*Harmonious Interventions s: China's Quest forRelationl Security* “,(London: Routledge, 2014), 1-7.

menjalin hubungan diplomatik dengan negara Sudan Selatan penulis membaginya ke dalam 3 alasan seperti berikut :

3.1.1. Ekonomi

Tiongkok telah mengalami perkembangan yang signifikan terhadap bidang industri di dalam negerinya pada tahun 1990-an hingga saat ini. Sehingga Tiongkok saat ini telah menjadi negara dengan tingkat pertumbuhan konsumsi minyak tertinggi setelah Amerika Serikat pada tahun 2013.¹⁰⁹

Tabel 3.1 Peringkat konsumsi minyak pada tahun 2013

Peringkat	Negara	Jumlah Konsumsi (Barel/Hari)	Jumlah Penduduk (ribu)
1	Amerika Serikat	19.150.000	313.847.465
2	Cina	9.400.000	1.343.239.923
3	Jepang	4.452.000	127.756.412
4	Rusia	3.199.000	138.082.178
5	India	3.182.000	1.205.073.612
6	Jerman	2.495.000	82.702.384
7	Brazil	2.229.000	205.716.890
8	Kanada	2.220.000	34.300.083
9	Saudi Arabia	2.209.000	26.534.504
10	Korea Selatan	2.195.000	48.860.500

Sumber: *our world in data, 2013.*

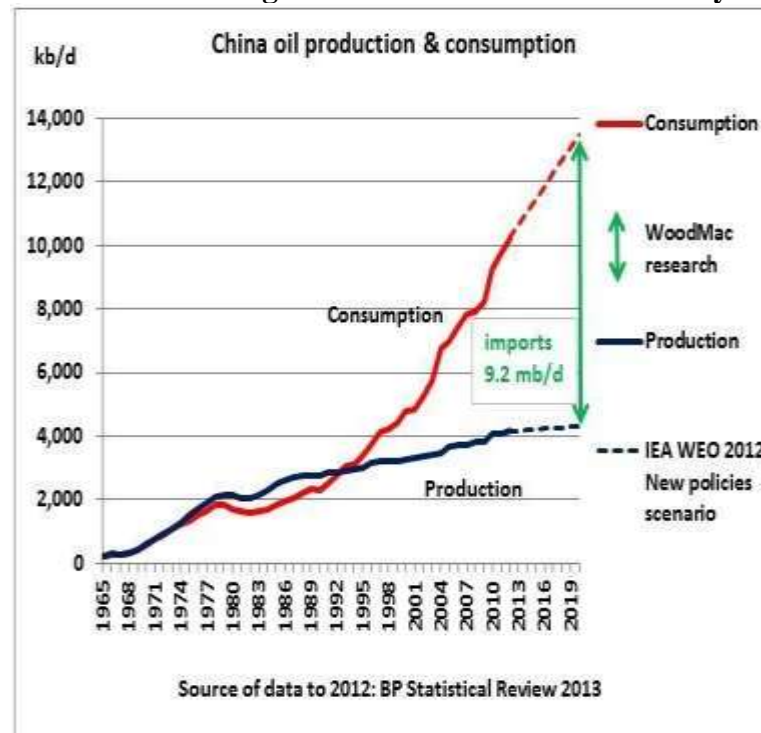
Sumber daya yang paling dibutuhkan Tiongkok adalah minyak. Yuwen Wu menyatakan bahwa ledakan ekonomi Tiongkok membutuhkan banyak minyak, tetapi produksi dalam negeri terbatas dan akan impor untuk lebih dari 56% dari total minyak yang digunakan pada tahun 2012.¹¹⁰

¹⁰⁹ Gou Qingnye, "The Principle of Non-interference and China's Role in International Conflict in the New Era China in Sudan and South Sudan, Syria, and Afghanistan", (Doctoral diss., Lund University, 2017), 20

¹¹⁰ Hannah Ritchie and Max Roser, "Fossil Fuels. *OurWorldInData.org 2018*", *Our world data* <https://ourworldindata.org/fossil-fuels> (Diakses pada 23 desember 2018)

Tiongkok hanya dapat memproduksi sekitar 4000 kb per hari sedangkan konsumsi dalam negeri negara Tiongkok mencapai 13,000 kb per hari.¹¹¹ Adanya jarak antara jumlah yang diperlukan dengan penawaran (*supply*) yang ada membuat negara Tiongkok melakukan impor minyak untuk memenuhi kebutuhan dalam negerinya.¹¹²

Grafik 3.1. Perbandingan Konsumsi dan Produksi Minyak Tiongkok



Sumber : Cahyani, 2016

Dalam pemenuhan kebutuhan dalam negerinya akan ketersediaan minyak ini, Tiongkok mulai mencari kawasan yang memiliki sumber daya alam yang melimpah pada minyak dan gas bumi. Salah satu kawasan dengan yang Tiongkok pilih adalah kawasan Afrika.

Afrika telah terkenal akan sumber daya alamnya, Tiongkok mulai menjalin kerjasama berdagang dengan negara-negara di Afrika, khususnya Sudan. Sudan,

¹¹¹ Lauren Ploch Blanchard, 17-19

¹¹² Lauren Ploch Blanchard, 16

sebuah negara yang kaya minyak, adalah mitra terpercaya dengan Tiongkok hingga 2011.¹¹³ Sebelumnya negara Sudan dan Sudan selatan memisahkan diri pada tahun 2011, Sudan adalah penyedia terbesar kedua *China National Petroleum Corporation* telah menginvestasikan lebih dari \$ 7 miliar dolar dan mengendalikan 40% saham di konsorsium minyak terbesar di Sudan Selatan.¹¹⁴

Investasi Tiongkok di Sudan Selatan sesuai dengan kebutuhan dalam negerinya, Tiongkok melakukan investasi besar-besaran di wilayah selatan Sudan yaitu wilayah Khourtoom dengan membangun infrastruktur dan sarana guna menunjang efisiensi produksi minyak di Sudan Selatan.

Namun adanya konflik sipil di Sudan Selatan telah membuat perlambatan terhadap produksi minyak dan investasi Tiongkok di Sudan Selatan. Yuwen juga menyebutkan bahwa pekerjaan investasi yang berat, dan dalam 10 bulan pertama tahun 2013, Tiongkok mengimpor 1,9 juta ton minyak dari Sudan Selatan.¹¹⁵ Ini adalah dua kali lipat impor Tiongkok dari Nigeria setiap tahun.¹¹⁶ Konflik ini telah menghambat produksi, terutama produksi penjualan minyak di Sudan Selatan. Walaupun Sudan Selatan hanya menyumbang 2-5% dari impor minyak tahunan Tiongkok namun hal ini juga membawa kerugian bagian Tiongkok dimana saat ini keamanan energi menjadi fokus utama

¹¹³ Lauren Ploch Blanchard, 13

¹¹⁴ Chen, H., Liao, H., Tang, B. J., & Wei, Y. M. "Impacts of OPEC's political risk on the international crude oil prices: An empirical analysis based on the SVAR models". *Energy Economics*, 57, 2015 :42-49

¹¹⁵ Ministry of Foreign Affairs of People's Republic of China, "Speech at the International Colloquium Commemorating the 60th Anniversary of the Five Principles of Peaceful Coexistence", Ministry of Foreign Affairs of People's Republic of China, http://www.fmprc.gov.cn/mfa_eng/wjdt_665385/zyjh_665391/t1160366.shtml (Diakses pada 20 September 2018).

¹¹⁶ Ministry of Foreign Affairs of People's Republic of China, "Speech at the International Colloquium Commemorating the 60th Anniversary of the Five Principles of Peaceful Coexistence", Ministry of Foreign Affairs of People's Republic of China, http://www.fmprc.gov.cn/mfa_eng/wjdt_665385/zyjh_665391/t1160366.shtml (Diakses pada 20 September 2018).

Tiongkok.¹¹⁷ Selain minyak yang menjadi prioritas Tiongkok di Sudan Selatan, Tiongkok juga memiliki investasi lainnya seperti 100 perusahaan Tiongkok telah ada di Sudan Selatan sejak tahun 2013. Perdagangan kedua negara juga telah mencapai \$ 534 juta pada tahun 2013.¹¹⁸ Tiongkok melihat Sudan Selatan sebagai tempat yang baik untuk berinvestasi, tidak hanya kaya terhadap sumber daya alam namun minimnya pesaing, biaya operasi yang murah serta tenaga kerja yang murah membuat Tiongkok mendapatkan margin keuntungan 50 persen sebelum konflik sipil pecah pada tahun 2013.¹¹⁹ Semua bukti ini menunjukkan Tiongkok memiliki minat yang tinggi di Sudan Selatan, dan Tiongkok harus membangun dan mempertahankan stabilitas hubungan dengan Sudan Selatan untuk kepentingannya sendiri. Beberapa ahli artikel juga membahas bahwa mengapa Tiongkok memilih untuk berinvestasi di Sudan Selatan, mengingat hal itu ada banyak negara di seluruh dunia yang mungkin memiliki apa yang dibutuhkan Tiongkok¹²⁰. Alasan utamanya yang melatarbelakangi adalah bahwa Tiongkok tidak memiliki banyak pilihan selain berinvestasi di Sudan Selatan. Sebelumnya Tiongkok juga berinvestasi ke beberapa negara yang memiliki kekayaan minyak seperti Nigeria, Sudan, Iran dan lain sebagainya negara-negara tersebut tidak menjanjikan kondisi yang stabil untuk berinvestasi hal ini yang dimanfaatkan oleh Tiongkok, kondisi yang tidak stabil dari negara-negara yang kaya akan sumber

¹¹⁷ International Crisis Group, "China's Foreign Policy Experiment in South Sudan," International Crisis Group, <https://www.crisisgroup.org/africa/horn-africa/south-sudan/288-china-s-foreign-policy-experiment-south-sudan> (Diakses pada 14 January 2018)

¹¹⁸ International Crisis Group, "China's Foreign Policy Experiment in South Sudan," International Crisis Group, <https://www.crisisgroup.org/africa/horn-africa/south-sudan/288-china-s-foreign-policy-experiment-south-sudan> (Diakses pada 14 January 2018)

¹¹⁹ International Crisis Group, "China's Foreign Policy Experiment in South Sudan," International Crisis Group, <https://www.crisisgroup.org/africa/horn-africa/south-sudan/288-china-s-foreign-policy-experiment-south-sudan> (Diakses pada 14 January 2018)

¹²⁰ Ministry of Foreign Affairs of People's Republic of China

alamnya tentu tidak menarik bagi investor lainnya sehingga persaingan perdagangan tidak terlalu kompetitif. Selain itu Tiongkok juga sedang menjalankan sanksi perdagangan dengan negara-negara barat, maka tidak ada pilihan lain selain berinvestasi di kawasan Afrika.

3.1.2. Politik

Selain memiliki kepentingan di bidang ekonomi dengan kawasan Afrika khususnya Sudan Selatan. Tiongkok juga memiliki kepentingan di bidang politik. Tiongkok menginginkan legitimasi politik. Pemerintah Tiongkok percaya bahwa memperkuat hubungan Tiongkok- Afrika membantu meningkatkan pengaruh Tiongkok pada level internasional.

Tiongkok memiliki kebijakan “*One China Policy*” dimana merupakan kebijakan yang mengakui bahwa hanya ada satu negara di Tiongkok dengan nama resmi PRC atau *People’s Republic of China*. Kebijakan ini merupakan prasyarat bagi setiap entitas politik untuk menjalin hubungan diplomatik dengan republik Rakyat Cina¹²¹. Kebijakan ini membuat negara-negara mengakui bahwa PRC merupakan satu-satunya pemerintahan yang legal dan Taiwan adalah bagian yang tidak dapat dipisahkan dari wilayah PRC. Selain sebagai prasyarat mengadakan hubungan diplomatik, *One China Policy* juga digunakan sebagai prasyarat untuk menarik bantuan dan investasi Tiongkok. Hal ini dilakukan negara Tiongkok jika ada negara yang melanggar prinsip *One China Policy*.

Sudan Selatan merupakan salah satu negara yang mengakui kebijakan *One China Policy*. Hubungan Sudan Selatan dan Tiongkok seperti yang telah disebutkan sebelumnya telah ada bahkan sebelum Sudan Selatan menjadi sebuah

¹²¹ Erikson, Daniel P.; Chen, Janice "China, Taiwan, and the Battle for Latin America". The Fletcher Forum of World Affairs 2007 (31, number 2), 71.

negara. beberapa jurnal juga menyebutkan keterlibatan Tiongkok di kemerdekaan Sudan Selatan juga merupakan upaya Tiongkok untuk mendapatkan legitimasi politik¹²². Pemerintah Sudan juga mendapatkan keuntungan dari pengakuan tersebut yaitu pengakuan Sudan Selatan sebagai sebuah negara baru. Ini juga merupakan upaya Sudan Selatan untuk mendapatkan pengakuan internasional sebagai sebuah negara.

Negara-negara di Afrika telah menukarkan pengakuan politik dan legitimasi nya untuk mendapatkan pembangunan ekonomi melalui bantuan, investasi dan perdagangan oleh negara Tiongkok. Tentunya hal ini akan berpengaruh terhadap hubungan Afrika-Tiongkok yang saling tergantung. Banyak pemerintah Afrika yang berharap Tiongkok akan menjalin hubungan dengan kawasan Afrika dengan cara yang berbeda seperti yang dilakukan oleh Amerika Serikat dan negara-negara barat lainnya. Tiongkok lebih menggunakan cara berinvestasi kepada daerah-daerah yang belum memadai infrastrukturnya sehingga investasi yang diberikan Tiongkok lebih dianggap menyebar luas dibandingkan dengan hubungan investasi dengan negara-negara barat.¹²³ Pengaruh politik Tiongkok telah mempengaruhi cara pandang pemerintah Sudan Selatan dimana adanya perkembangan ekonomi yang signifikan, keberhasilan Tiongkok dalam mengatasi isu kemiskinan serta berkembangnya industri di dalam negeri membuat hal tersebut menginspirasi pemerintah Sudan Selatan untuk menerapkan pemerintahan yang baik seperti yang dilakukan Tiongkok pada domestiknya.

¹²² Zhou Hang: 12-14

¹²³ Zhou Hang: 12-14

Ketika konflik sipil di Sudan Selatan pecah pada tahun 2013, Pemerintah Tiongkok langsung menerapkan strateginya dalam mengatasi konflik sipil tersebut. Tiongkok bukanlah aktor yang berpengalaman dalam menyelesaikan konflik baik itu konflik sipil maupun konflik yang berskala multinasional. Namun pada kasus ini, Tiongkok melihat peluang untuk dapat menjadi negara yang memiliki kontribusi terhadap perdamaian tentunya ini akan mempengaruhi citranya di kawasan Afrika. Sudan selatan akan menjadi arena uji coba Tiongkok dapat menerapkan strateginya penyelesaian konflik sipil yang nantinya akan menjadi arena diplomasi baru Tiongkok di kawasan Afrika.

3.1.3. Keamanan

Dalam jurnal *Africa in China's One Belt, One Road Initiative: A Critical Analysis* yang ditulis oleh Raphael ZiroMwatela dan Zhao Changfeng menjelaskan bahwa adanya konflik sipil di Sudan Selatan sangat menghambat kepentingan Tiongkok di Afrika.¹²⁴ Selain faktor ekonomi, faktor lainnya adalah adanya kemungkinan perluasan konflik ke kawasan Afrika Timur terutama Kenya. Perluasan konflik di takutkan akan mengganggu kestabilan keamanan regional kawasan Afrika. Dimana negara-negara yang bersebelahan dengan Sudan Selatan seperti negara Kenya. Negara Kenya ini sangat penting bagi terwujudnya proyek besar negara Tiongkok. Kenya tergabung dalam proyek besar Tiongkok yaitu proyek *One Belt, One Road* yang dijadikan sebagai pusat jalur sutra laut yang menghubungkan kawasan Afrika ke negara-negara Asia dan Eropa. Investasi Tiongkok di Kenya adalah yang terbesar setelah negara Afrika Selatan. Sehingga perlu dipastikan bahwa konflik ini tidak melebar lebih jauh ke daerah Kenya.

¹²⁴ Lauren Ploch Blanchard, 13

3.2. Kerjasama Tiongkok dan Sudan Selatan

3.2.1. *Political Exchange*

Tiongkok telah mengadakan hubungan kerjasama dengan Sudan Selatan bahkan sebelum kemerdekaan Sudan Selatan hal ini terlihat dari presiden Tiongkok Hu Jintao melakukan kunjungan pertamanya ke Sudan dan bertemu di Khartoum dengan Wakil Presiden Pertama Salva Kiir Mayardit yang juga Presiden pemerintah otonomi selatan. Kemudian wakil presiden Kiir mengunjungi Tiongkok dua kali pada Maret 2005 dan Juli 2007.¹²⁵

Pada bulan September 2008, Tiongkok membuka Konsulat Jenderal di Juba. Pada Februari 2011, pemerintah Tiongkok mengumumkan pengakuannya atas hasil referendum di Sudan Selatan dan Tiongkok adalah salah satu kabupaten pertama di dunia yang mengakui hasilnya.¹²⁶ Pada tanggal 9 Juli 2011 ketika Republik Sudan Selatan didirikan, Menteri Pembangunan Perkotaan-Pedesaan Tiongkok, Jiang Weixin diundang sebagai utusan khusus Hu untuk berpartisipasi dalam perayaan kemerdekaan. Atas nama pemerintah Tiongkok, Jiang menandatangani pembentukan hubungan diplomatik antara kedua negara dengan Menteri Luar Negeri Sudan Selatan Deng Alor Kol, yang berarti bahwa pada hari pendirian Sudan Selatan, Tiongkok menjalin hubungan diplomatik resmi dengan negara baru tersebut. dan menjadi salah satu negara pertama yang menjalin hubungan dengan itu.

Pemerintah Sudan Selatan mengakui dalam Komunique Bersama bahwa kebijakan *one China policy*, PRC adalah satu-satunya pemerintah yang sah yang mewakili Tiongkok dan Taiwan adalah bagian yang tidak dapat dicabut dari

¹²⁵ Lauren Ploch Blanchard, 33-56

¹²⁶ Lauren Ploch Blanchard, 33-56

China. Pada hari yang sama, Duta Besar Tiongkok untuk Sudan Selatan membuka kedutaan. Dari 23 hingga 26 April 2012,¹²⁷ Presiden Sudan Selatan, Kiir, melakukan kunjungan kenegaraan ke Tiongkok atas undangan Hu. Selama kunjungan, Hu mengadakan pembicaraan dengan Kiir, para pemimpin Tiongkok lainnya, termasuk Ketua Komite Tetap dari Kongres Rakyat Nasional Wu Bangguo, dan Wakil Perdana Menteri, anggota CPC, Li Keqiang bertemu dengan Kiir.¹²⁸

3.2.2. *Economic and Trade*

Tiongkok mulai memberikan bantuan untuk Sudan Selatan pada tahun 1970-an. Pakar pertanian Tiongkok telah mengajar orang-orang di sana untuk menanam padi. Tim bantuan medis Tiongkok telah dikirim ke Juba, Wau dan Malakal sejak 1971, menawarkan perawatan medis ke Sudan Selatan. Pada 1985, Tiongkok berhenti mengirimkan tim medis karena perang saudara di Sudan dan memulai kembali bantuan itu pada Januari 2012 setelah Tiongkok dan Sudan Selatan menandatangani nota kesepahaman.

Pemerintah Tiongkok telah secara aktif terlibat dalam konstruksi ekonomi dan sosial Sudan Selatan, yang meliputi pembangunan rumah sakit dan sekolah, menggali sumur, menyediakan peralatan medis, alat musik, obat anti-malaria dan perlengkapan kemanusiaan darurat lainnya, serta pelatihan sumber daya manusia. Hubungan ekonomi dan perdagangan bilateral telah berkembang dengan lancar sejak Sudan Selatan menjadi negara merdeka. Pada 2011, kedua belah pihak menandatangani perjanjian perdagangan, ekonomi dan teknis bilateral dan membentuk komite ekonomi dan perdagangan bersama bilateral. Pada Oktober

¹²⁷ Blanchard, 47

¹²⁸ Blanchard, 23

2012, sekitar 60 perusahaan yang didanai Tiongkok telah terdaftar di Sudan Selatan, terutama terkait dengan minyak bumi, konstruksi, jalan dan jembatan, komunikasi.¹²⁹

3.2.3. *Education and Culture*

Tiongkok dan Sudan Selatan juga bekerjasama baik dalam bidang pendidikan dan kebudayaan.¹³⁰ Bahkan Tiongkok telah mengupayakan adanya pertukaran budaya dan Pendidikan sejak sebelum kemerdekaan di Sudan Selatan. walaupun kedatangan Tiongkok ke Sudan Selatan saat ini murni untuk kepentingan Ekonomi namun kerjasama itu berkembang ke arah pendidikan dan kebudayaan. Tiongkok menyadari untuk mendapatkan keuntungan dari kedua belah pihak yang melakukan kerjasama tentu harus didukung dengan kapabilitas oleh kedua belah pihak, Maka dari itu Tiongkok mengupayakan *good Governance* di Sudan Selatan.

Pada November 2009, Tiongkok melatih pekerja seni untuk Sudan Selatan. Tiongkok telah mulai memberikan beasiswa pemerintah bagi mahasiswa Sudan Selatan untuk belajar di Tiongkok sejak 2008. Hingga Oktober 2012, total 23 siswa telah memenangkan beasiswa. Sejak 2009, pemerintah Tiongkok telah membantu Sudan Selatan untuk melatih sumber daya manusia. Sejauh ini, sekitar 500 pejabat pemerintah dan tenaga teknis telah menerima pelatihan di Tiongkok.¹³¹ Termasuk Presiden Salva Kiir dan pejabat legislatif. Para pejabat pemerintah ini langsung belajar dengan partai komunis Tiongkok.

¹²⁹ Blanchard, 56

¹³⁰ Ministry of Foreign Affairs of People's Republic of China, South Sudan and China event , ss.chineseembassy.org/eng/sbjw (Diakses pada 12 september 2018).

¹³¹ Ministry of Foreign Affairs of People's Republic of China, (diakses pada 12 september 2018)



STRATEGI TIONGKOK DALAM MENYELESAIKAN KONFLIK SIPIL DI SUDAN SELATAN

Bab ini menjelaskan upaya Tiongkok melakukan *third party intervention* di Sudan Selatan, dimulai dari menjelaskan *third party intervention* sebagai sebuah strategi intervensi Tiongkok. Kemudian menjelaskan upaya Tiongkok dalam mengintervensi konflik sipil di Sudan Selatan menggunakan *third party intervention* dengan *contingency model*.

4.1 Strategi Tiongkok Dalam Menyelesaikan Konflik Menggunakan

Third-Party Intervention

Praktik *third party intervention* yang dilakukan Tiongkok merupakan bagian dari *peacemaking* dimana Tiongkok berperan aktif dalam bentuk *third party intervention* berupa mediasi, konsultasi, dan bentuk-bentuk intervensi lainnya.¹³² Hal ini menjadi kontradiktif dalam kajian kebijakan luar negeri Tiongkok. Dimana Tiongkok memiliki prinsip *non interference*. Beberapa jurnal juga menyebutkan bahwa Tiongkok tidak konsisten terhadap kebijakan luar negerinya.¹³³ Jurnal lainnya juga menyebutkan bahwa praktik intervensi yang dilakukan Tiongkok di Sudan Selatan merupakan bagian pengembangan dari prinsip *non-interference* yang mana lebih mengembangkan makna urusan internal sebuah negara dapat didefinisikan secara lebih sempit dan *interference* dapat diterima jika merupakan isu keamanan yang mengancam keamanan regional.¹³⁴

Upaya Tiongkok pada penyelesaian konflik ini dimulai dari pertemuan Ma Qing sebagai duta besar Tiongkok untuk Sudan Selatan dengan Presiden Salva Kiir membahas informasi resmi dan kondisi pasca pecahnya konflik sipil di Sudan Selatan. Beberapa hari kemudian pada tanggal 24 Desember 2013, Duta Besar Ma Qiang melakukan diskusi dengan Menteri Luar Negeri Sudan Selatan Mr. Benjamin, bertukar pandangan tentang situasi Sudan Selatan dan mencoba mempromosikan perdamaian di sana. Ma Qiang menanggapi konflik sipil tersebut telah mengancam perusahaan Tiongkok terutama para insinyur dan teknik

¹³² Ronald J. Fisher, 165-170

¹³³ Ronald J. Fisher, 165-179

¹³⁴ Aleu Garang, 15

Tiongkok di daerah konflik.¹³⁵ Ma Qiang meminta adanya tindakan dari pemerintah Sudan Selatan yang konkrit untuk mengatasi permasalahan ini, terutama kemauan pemerintah Sudan Selatan untuk melakukan perundingan dengan pihak pemberontak untuk mendapatkan kesepakatan bersama mengenai konflik sipil yang terjadi.¹³⁶

Tiongkok pun semakin menjadi aktor sentral dalam proses perdamaian yang berlangsung di Sudan Selatan bersama IGAD+. Tiongkok mengupayakan adanya negosiasi dan mediasi secara berkelanjutan guna menurunkan ketegangan dan menghentikan kekerasan dalam konflik sipil dengan adanya gencatan senjata. Berikut merupakan tingkatan eskalasi konflik yang dilakukan Tiongkok menggunakan *model contingency*.

Tiongkok melakukan Intervensi dimulai pada tingkatan *discussion* hal ini dapat dilihat dari kondisi-kondisi yang menggambarkan tingkatan *discussion*. Tiongkok kemudian melakukan tindakan intervensi berupa negosiasi untuk mengatasi permasalahan yang ada. Namun kondisi konflik semakin memburuk dengan banyaknya penggunaan kekerasan oleh pihak pemerintah dan pihak pemberontak. Pertempuran kedua belah pihak tidak dapat dihindari lagi. Kondisi demikian telah membuat tingkatan yang semula pada *discussion* kemudian berpindah ke tingkat *destruction* dimana kondisi konflik telah banyak penggunaan kekerasan dan diperlukan peran pihak ketiga untuk mengendalikan kekerasan yang terjadi.

¹³⁵ Aly Verjee, "Explaining China's involvement in the South Sudan peace process" lowy institute; <https://www.lowyinstitute.org/the-interpreter/explaining-chinas-involvement-south-sudan-peace-process> (diakses pada tanggal 12 desember 2018).

¹³⁶ Aly Verjee, "Explaining China's involvement in the South Sudan peace process" lowy institute; <https://www.lowyinstitute.org/the-interpreter/explaining-chinas-involvement-south-sudan-peace-process> (diakses pada tanggal 12 desember 2018).

4.1.1 Discussion

Pada tingkatan ini pihak pemerintah dan pihak pemberontak memiliki hubungan emosi yang mengarah pada rasa permusuhan. Hal ini dapat terlihat dari kekecewaan SPLM-OI terhadap pemerintahan Salva Kiir dimana Salva Kiir telah menuduh Mantan wakil presidennya Riek Machar melakukan korupsi dan mencabut jabatannya.¹³⁷ Adanya tindakan impunitas yaitu pembunuhan yang dilakukan pemerintah terhadap para pejabat pemerintahan yang beretnis Nuer juga menjadikan rasa permusuhan antara militan yang dipimpin oleh Riek Machar semakin memusuhi pemerintah.¹³⁸

Dari pihak pemerintah rasa permusuhan telah ada ketika Riek Machar mengumumkan dirinya untuk mengikuti pemilihan umum berikutnya untuk menjadi Presiden di Sudan Selatan. Presiden Salva Kiir yang saat itu menjabat sebagai Presiden Sudan Selatan merasa kecewa terhadap pernyataan tersebut dan menganggapnya sebagai awal kudeta yang akan dilakukan oleh Riek Machar.¹³⁹ Presiden Salva Kiir juga memiliki anggapan bahwa adanya krisis ekonomi di Sudan Selatan pada saat itu bersamaan dengan tindakan korupsi dan impunitas yang dilakukan oleh pejabat Dinka menyebabkan elektabilitas Salva Kiir menurun

¹³⁷ Jason Burke."South Sudan: is the renewed violence the restart of civil war?",the guardian, <https://www.theguardian.com/world/2016/jul/12/south-sudan-is-the-renewed-violence-the-restart-of-civil-war> diakses pada tanggal 20 september 2018

¹³⁸ Jason Burke."South Sudan: is the renewed violence the restart of civil war?",the guardian, <https://www.theguardian.com/world/2016/jul/12/south-sudan-is-the-renewed-violence-the-restart-of-civil-war> diakses pada tanggal 20 september 2018.

¹³⁹ Musaazi Namiti."Analysis: Struggle for power in South Sudan", Aljazeera: <https://www.aljazeera.com/indepth/features/2013/12/analysis-struggle-power-south-sudan-20131217845861691.html>

dan kemungkinan untuk adanya aksi protes yang berasal dari pejabat pemerintahan.¹⁴⁰

Pada 15 Desember 2013 terjadi pemberontakan yang terjadi di ibu kota Sudan Selatan. Pemberontakan dilakukan oleh tentara SPLA yang kecewa terhadap pemerintahan Salva Kiir dan menginginkan Salva Kiir turun dari Jabatannya.¹⁴¹ Setelah penyerangan tersebut, Presiden Salva Kiir mengecam Machar yang telah memprovokasi serangan tersebut.¹⁴² Kiir mengklaim bahwa Machar telah mencoba merebut kekuasaan melalui kekerasan setelah serangan mematikan oleh tentara yang mencoba menyerbu barak militer, dengan tank dan peluru mortir di ibu kota Juba.¹⁴³ Pada kondisi ini kedua belah pihak saling memiliki rasa kebencian sehingga hal ini menyebabkan adanya bentrokan.

Pada titik ini Tiongkok melakukan tindakan intervensi berupa Konsolidasi, tindakan konsolidasi ini bertujuan agar mengarahkan kedua belah pihak untuk mengadakan negosiasi dan menjadi jembatan penghubung antara pihak pemerintah dan pihak pemberontak dalam menjalin komunikasi kembali.

4.1.1.1 Tindakan yang dilakukan Tiongkok pada tingkatan Discussion

a. Tiongkok melakukan negosiasi kepada pihak pemerintah.

¹⁴⁰ Hannah Mcneish, "South Sudan's Machar Speak to Aljazeera," Al Jazeera, <https://www.aljazeera.com/indepth/features/2013/12/south-sudan-machar-speaks-al-jazeera-2013121961331646865.htm> (Diakses pada 4 januari 2018)

¹⁴¹ Daily Sabah Africa, "South Sudan on verge of civil war, death toll rises" Daily Sabah Africa, <https://www.dailysabah.com/africa/2016/07/12/south-sudan-on-verge-of-civil-war-death-toll-rises> (Diakses pada 4 Januari 2018)

¹⁴² Jeremy Astill-Brown, "South Sudan's Slide into Conflict: Revisiting the Past and Assessing Partnerships," The Royal Institute of International Affairs, Research Paper (December 2014) : 11.

¹⁴³ Hanna Mc Neish, "South Sudan's Machar Speak to Aljazeera," Al Jazeera, <https://www.aljazeera.com/indepth/features/2013/12/south-sudan-machar-speaks-al-jazeera-2013121961331646865.htm> (Diakses pada 4 januari 2018)

Pada tanggal 21 Desember 2013 Presiden Sudan Selatan Salva Kiir diminta untuk menemui duta besar Tiongkok untuk Sudan Selatan, Ma Qiang.¹⁴⁴ Pertemuan kedua pejabat negara tersebut membahas mengenai informasi resmi situasi dan kondisi pasca pecahnya konflik sipil di Sudan Selatan. Bagi *intervener* memahami keadaan kondisi konflik di butuhkan untuk memahami dinamika konflik. Selanjutnya *intervener* juga harus mengkonfirmasi data yang didapat dengan melakukan diskusi bersama dengan aktor-aktor yang terlibat.



Gambar 4.1 Pertemuan Duta Besar Ma Qiang pertemuan dengan Menteri Luar Negeri Sudan Selatan Mr. Benjamin

Sumber: *Ministry of Foreign Affairs the People's Republic of China, 2013*

Pada tanggal 24 Desember 2013, Duta Besar Ma Qiang melakukan diskusi dengan Menteri Luar Negeri Sudan Selatan Mr. Benjamin, bertukar pandangan tentang situasi Sudan Selatan dan mencoba mempromosikan perdamaian di sana.¹⁴⁵ Ma Qiang menanggapi konflik sipil tersebut telah mengancam perusahaan

¹⁴⁴ Sudan Tribune,” South government, rebels sign ceasefire agreement. Sudan Tribun, <http://www.sudantribune.com/spip.php?article49693> (Diakses pada 4 januri 2018).

¹⁴⁵ Aly Verjee, “Explaining China’s involvement in the South Sudan peace process” lowy institute; <https://www.lowyinstitute.org/the-interpreter/explaining-chinas-involvement-south-sudan-peace-process>(Diakses pada tanggal 12 desember 2018).

Tiongkok terutama para insinyur dan teknik Tiongkok di daerah konflik.¹⁴⁶ Ma Qiang meminta adanya tindakan dari pemerintah Sudan Selatan yang konkrit untuk mengatasi permasalahan ini, terutama kemauan pemerintah Sudan Selatan untuk melakukan perundingan dengan pihak pemberontak untuk mendapatkan kesepakatan bersama mengenai konflik sipil yang terjadi.¹⁴⁷

Pada 25 Desember 2013, perwakilan khusus pemerintah Tiongkok untuk urusan Afrika Zhong Jianhua mengadakan pembicaraan telepon dengan Menteri Luar Negeri Sudan Selatan, Barnaba Marial Benjamin.¹⁴⁸ Zhong Jianhua menunjukkan keprihatinannya atas korban besar yang disebabkan oleh konflik bersenjata di Sudan Selatan, dan berharap bahwa pihak-pihak terkait Sudan Selatan dapat tetap tenang dan menahan diri, dan menyelesaikan perbedaan mereka melalui dialog damai sesegera mungkin. Zhong Jianhua juga berharap bahwa pemerintah Sudan Selatan akan mengambil langkah-langkah efektif untuk menjaga keamanan pribadi dan lembaga-lembaga Tiongkok di Sudan Selatan.¹⁴⁹ Benjamin setuju dengan peran Tiongkok untuk mengadakan pembicaraan tanpa syarat dengan mantan Wakil Presiden Riek Machar dan presiden Salva Kiir.¹⁵⁰



¹⁴⁶ Aly Verjee, "Explaining China's involvement in the South Sudan peace process" lowy institute; <https://www.lowyinstitute.org/the-interpreter/explaining-chinas-involvement-south-sudan-peace-process> (Diakses pada tanggal 12 desember 2018).

¹⁴⁷ Aly Verjee, "Explaining China's involvement in the South Sudan peace process" lowy institute; <https://www.lowyinstitute.org/the-interpreter/explaining-chinas-involvement-south-sudan-peace-process> (Diakses pada tanggal 12 desember 2018).

¹⁴⁸ Embassy the People's Republic of China in the democratic socialist of sri lanka, "Chinese Government's Special Representative on African Affairs Zhong Jianhua Holds a Telephone Conversation with South Sudanese Foreign Minister on the Situation in South Sudan," Embassy the People's Republic of China in the democratic socialist of sri lanka, <http://lk.china-embassy.org/eng/zgxw/t1114321.htm> (Diakses pada 04 January 2018)

¹⁴⁹ Embassy the People's Republic of China in the democratic socialist of sri lanka, "Chinese Government's Special Representative on African Affairs Zhong Jianhua Holds a Telephone Conversation with South Sudanese Foreign Minister on the Situation in South Sudan," Embassy the People's Republic of China in the democratic socialist of sri lanka, <http://lk.china-embassy.org/eng/zgxw/t1114321.htm> (Diakses pada 04 January 2018)

¹⁵⁰ Embassy the People's Republic of China in the democratic socialist of sri lanka, "Chinese Government's Special Representative on African Affairs Zhong Jianhua Holds a Telephone

Sudan Selatan menganggap penting keprihatinan Tiongkok dan akan terus menjaga keamanan orang-orang dan lembaga-lembaga Tiongkok dengan baik.¹⁵¹

Perwakilan khusus Tiongkok untuk urusan Afrika Zhong Jianhua mengunjungi Sudan selatan pada 29-30 Desember 2013.¹⁵² Tujuan Zhong Jianhua mengunjungi Sudan Selatan adalah untuk berdiskusi mengenai dampak yang terjadi akibat adanya konflik sipil Sudan Selatan dengan presiden Salva Kiir dan perwakilan khusus Amerika Serikat di Sudan Selatan, Donald, duta besar Amerika Serikat untuk Sudan Selatan, Susan Page dan Mr. Alexander Rondos Perwakilan Khusus EU untuk Afrika.¹⁵³ Adanya pertemuan dengan beberapa perwakilan diplomatik ini menunjukkan upaya penyelesaian konflik sipil ini tidak hanya dari aktor tunggal namun melibatkan negara-negara dan organisasi kawasan. Hal tentunya berdasarkan dengan kepentingan aktor-aktor tersebut dalam penyelesaian konflik sipil di Sudan Selatan. Pertemuan tersebut menghasilkan permintaan pemerintah untuk menghentikan perang sipil yang mengakibatkan terhentinya pasokan minyak.

Negosiasi yang dipelopori oleh Tiongkok ternyata menemui kegagalan. Dimana pada 25 desember 2013 terjadi pertempuran kembali antara pihak

Conversation with South Sudanese Foreign Minister on the Situation in South Sudan,” Embassy the People’s Republic of China in the democratic socialist of sri lanka, <http://lk.china-embassy.org/eng/zgxw/t1114321.htm> (Diakses pada 04 January 2018)

¹⁵¹ Embassy the People’s Republic of China in the democratic socialist of sri lanka,” Chinese Government’s Special Representative on African Affairs Zhong Jianhua Holds a Telephone Conversation with South Sudanese Foreign Minister on the Situation in South Sudan,” Embassy the People’s Republic of China in the democratic socialist of sri lanka, <http://lk.china-embassy.org/eng/zgxw/t1114321.htm> (Diakses pada 04 January 2018)

¹⁵² Qinyen guo, 55

¹⁵³ Qinyen guo,55

pemerintah dan pihak pemberontak di wilayah Malaka. Pertempuran ini telah menewaskan dua penjaga perdamaian india.¹⁵⁴

b. Tiongkok melakukan negosiasi dengan pihak pemberontak.

Selanjutnya Diplomat Tiongkok juga melakukan diskusi dengan pihak pemberontak pada 30 desember 2013 dalam perihal menanggapi permintaan Tiongkok dan IGAD untuk melakukan perundingan bersama mengenai penyelesaian konflik dan negosiasi yang mengkonsolidasi kepentingan pihak pemberontak.¹⁵⁵

Setelah melakukan pertemuan dengan pihak pemberontak sebagai upaya mendorong adanya mediasi dan perundingan. Hasil yang didapat adalah pihak pemberontak mau melakukan perundingan dengan pihak pemerintah dengan beberapa syarat seperti perundingan dilakukan di tempat yang netral dan tidak memperkuat pihak pemerintah maupun pihak pemberontak. Pemberontak boleh mengajukan permintaan atau prasyarat persetujuan. Upaya Tiongkok pada tahap ini telah dilakukan dengan mendorong kedua belah pihak untuk menyetujui adanya mediasi dan perundingan.¹⁵⁶ Namun walaupun pihak pemberontak menyetujui adanya mediasi, pihak pemberontak tetap saja melakukan penyerangan ke beberapa daerah strategis seperti pada ibukota negara bagian Jonglei dan terletak hanya 200 kilometer (125 mil) utara Juba, serta kota Bentiu, ibukota negara bagian penting penghasil minyak.

4.1.2 Destruction

Tingkatan ini penggunaan kekerasan semakin meningkat antara kedua belah pihak yang berseteru baik itu pihak pemerintah maupun pihak pemberontak

¹⁵⁴ Sudan Tribune,” South government, rebels sign ceasefire agreement. Sudan Tribun, <http://www.sudantribune.com/spip.php?article49693> (Diakses pada 4 januri 2018).

¹⁵⁵ Obert Hodz , 4

¹⁵⁶ Obert Hodzi, 5

saling menggunakan kekerasan. Selain itu penyelesaian konflik antar kedua belah pihak telah melibatkan organisasi internasional dan regional. Hal ini menunjukkan bahwa kondisi konflik yang terjadi telah memasuki tingkatan terakhir dalam tingkatan eskalasi konflik seperti yang disebutkan sebelumnya. hal ini dibuktikan dengan adanya pertempuran besar yang terjadi di Bor negara bagian Jonglei. Pasukan pemerintah dan pihak pemberontak saling ingin menguasai wilayah tersebut. Pertempuran kedua belah pihak sangat sengit hingga memakan ratusan korban dari kedua belah pihak. Pertempuran besar ini telah menewaskan sekitar 1.400 warga sipil tewas ketika pemberontak menahan Bor pada 17 hingga 24 Desember.¹⁵⁷

Pada tingkatan ini Tiongkok seharusnya melakukan tindakan *peacekeeping* untuk mengontrol kekerasan yang terjadi antara kedua belah pihak dan mengupayakan arbitrase agar terciptanya kestabilan dengan mendorong adanya gencatan senjata sebagai bentuk pengendalian terhadap kekerasan. Namun Tiongkok malah mengupayakan mediasi, konsultasi, dan *power mediation* untuk terciptanya gencatan senjata pada kedua belah pihak.



4.1.2.1 Tindakan Intervensi Tiongkok pada tingkatan Destruction

a. Upaya Mediasi Tiongkok

Sebelum melakukan upaya mediasi, Tiongkok telah melakukan negosiasi kepada pihak pemerintah dan pihak pemberontak. Pada Januari 2014, Tiongkok

¹⁵⁷ Sudan Tribune, "South government, rebels sign ceasefire agreement. Sudan Tribune, <http://www.sudantribune.com/spip.php?article49693> (Diakses pada 4 januri 2018).

dan beberapa aktor lainnya seperti Uni Afrika, PBB, IGAD, Uni Eropa, AS, Inggris Norwegia memulai memfasilitasi mediasi antara pemerintah dan pihak pemberontak.¹⁵⁸ Namun sebelum negosiasi dimulai pihak pemerintah melakukan serangan ke daerah-daerah yang dikuasai oleh pihak pemberontak. Hal ini tentunya semakin memperkuat persepsi negatif antar kedua belah pihak. Tiongkok dan IGAD mengupayakan adanya negosiasi antara kedua belah pihak yang akan bertempat di Adi Abbas Ethiopia.¹⁵⁹ Ethiopia menjadi tempat negosiasi dengan pertimbangan bahwa merupakan tempat yang netral untuk melakukan perundingan.¹⁶⁰

Dalam proses mediasi ini, pihak pemberontak menuntut agar Uganda tidak mendukung pemerintah Sudan Selatan dengan pasukan militer. Seorang juru bicara dari pihak pemberontak mengatakan bahwa menuntut agar Uganda berhenti mendukung pasukan pemerintah sebagai syarat untuk menandatangani gencatan senjata.¹⁶¹ Pihak pemberontak juga menuntut pembebasan tahanan politik yang ditahan oleh pemerintah Sudan Selatan. ini merupakan prasyarat sebelum menandatangani gencatan senjata. Dari pihak pemerintah menolak untuk membebaskan 11 tahanan politik. Ia juga mengecam organisasi kemanusiaan yang sedang bertugas di Sudan Selatan telah mendukung gerakan pemberontak.¹⁶²

¹⁵⁸ Zhou Hang:7

¹⁵⁹ Jason Hanna and Susanna Capelouto CNN, "South Sudan, rebels reach ceasefire after weeks of fighting" CNN, <https://edition.cnn.com/2014/01/23/world/africa/south-sudan-ceasefire/> (Diakses pada 4 Januari 2018)

¹⁶⁰ Jason Hanna and Susanna Capelouto CNN, "South Sudan, rebels reach ceasefire after weeks of fighting" CNN, <https://edition.cnn.com/2014/01/23/world/africa/south-sudan-ceasefire/> (Diakses pada 4 Januari 2018)

¹⁶¹ Sudan Tribune, "South government, rebels sign ceasefire agreement. Sudan Tribun, <http://www.sudantribune.com/spip.php?article49693> (Diakses pada 4 januri 2018).

¹⁶² BBC, "south Sudan President Salva Kiir hits out at UN", BBC, <https://www.bbc.com/news/world-africa-25826598> (Diakses pada 4 januari 2019).

Tiongkok dan IGAD + dalam tahap ini mempolarisasi kepentingan kedua belah pihak sehingga kedua belah pihak dapat menyetujui gencatan senjata.

Pada 23 Januari 2014, perwakilan dari Pemerintah Sudan Selatan dan perwakilan pemimpin pemberontak Riek Machar mencapai kesepakatan gencatan senjata di Ethiopia.¹⁶³ Gencatan senjata ini merupakan momentum awal terciptanya perdamaian setelah 20 hari konflik kekerasan yang terjadi di Sudan Selatan. Tiongkok bersama mediator lainnya seperti Uni Afrika, PBB, Tiongkok, Uni Eropa, AS, Inggris dan Norwegia dan IGAD+ telah mencapai keberhasilan dalam menengahi kepentingan kedua belah pihak..



Gambar 4.2 Penandatanganan Gencatan Senjata antara Pihak Pemerintah dan Pihak Pemberontak.

Sumber: CGTN Africa, 2015

Kesepakatan gencatan tersebut telah telah menghasilkan 2 persetujuan yang harus dipatuhi oleh kedua pihak yang bersengketa. Persetujuan pertama adalah *Agreement on the Status of Detainees Between The Government Of republic of South Sudan And The Sudan People's Liberation Movement/ Army (In*

¹⁶³ Zhou Hang:9

Opposition) SPLM/ A (in Opposition) mengenai tahanan politik.¹⁶⁴ Persetujuan kedua adalah *Agreement on Cessation of Hostilities Between the the Government Of republic of South Sudan And The Sudan People's Liberation Movement/ Army (In Opposition) SPLM/ A (in Opposition)* mengenai persetujuan penghentian permusuhan. Persetujuan memiliki 11 poin kesepakatan antara pihak pemberontak dan pihak pemerintah.¹⁶⁵ 11 poin tersebut meliputi deklarasi penghentian permusuhan antara kedua belah pihak, penghentian permusuhan menggunakan media propaganda, melindungi warga sipil, membuka bantuan kemanusiaan, komitmen untuk melakukan pengawasan dan verifikasi, membentuk badan pengawas persetujuan, mengoperasikan badan pengawas persetujuan, pendeklarasian penggunaan senjata, Amandement .Badan penyelesaian konflik dan *Entry Into Force*, dimana perjanjian akan berlaku setelah 24 jam penandatanganan.¹⁶⁶

Dari isi perjanjian tersebut dapat disimpulkan bahwa perjanjian tersebut mengarahkan pihak-pihak yang berselisih untuk meminimalisir penggunaan kekerasan dan perlindungan hak-hak warga sipil. Perjanjian tersebut juga diperkuat dengan adanya badan pengawasan pelaksanaan perjanjian.

Namun perjanjian tersebut akhirnya dilanggar oleh kedua belah pihak. Tiongkok tidak melakukan tindakan intervensi *peacekeeping* seperti yang seharusnya dilakukan oleh *intervener* sesuai dengan *model contingency*. hal inilah yang menyebabkan tingkat kepatuhan terhadap perjanjian gencatan senjata rendah. Pada tingkatan *destruction* penggunaan kontrol *power* oleh pihak ketiga

¹⁶⁴ Sudan Tribune," South government, rebels sign ceasefire agreement. Sudan Tribun, <http://www.sudantribune.com/spip.php?article49693> (Diakses pada 4 januri 2018).

¹⁶⁵ Zhou Hang:7

¹⁶⁶ Sudan Tribune," South government, rebels sign ceasefire agreement. Sudan Tribun, <http://www.sudantribune.com/spip.php?article49693> (Diakses pada 4 januri 2019).

sangat penting dalam terciptanya kestabilan. *Model contingency* menawarkan tindakan *peacekeeping* sebagai bentuk kontrol terhadap *power* yang terjadi. Selanjutnya kedua belah pihak diarahkan pada adanya arbitrase dan konsultasi khusus hal ini bertujuan untuk mengurangi tensi kedua belah pihak sehingga dapat mendorong perjanjian gencatan senjata.

b. Upaya Konsultasi Tiongkok ke pihak pemerintah dan pihak pemberontak.

Negara Tiongkok juga merasakan dampak dari tuduh menuduh pelanggaran gencatan senjata dimana lokasi penyerangan adalah ladang minyak perusahaan Tiongkok.¹⁶⁷ Tiongkok mulai melakukan upaya arbitrase dan *power meditation* dengan melakukan kunjungan dan diskusi dengan kedua belah pihak yang bersengketa baik formal maupun informal.

Pada 1-3 April 2014, Perwakilan Khusus, Zhong Jianhua, mengunjungi Sudan Selatan, bertukar pandangan tentang situasi saat ini dan hubungan bilateral dengan Presiden Kiir dan Wakil Presiden James Wani Igga.¹⁶⁸ Zhong juga bertemu dengan Perwakilan Khusus Hilde F. Johnson Sekretaris Jenderal PBB dan Kepala Misi Perserikatan Bangsa-Bangsa di Sudan Selatan, dan perwakilan dari IGAD.¹⁶⁹ Adanya kunjungan yang dilakukan oleh Zhong Jianhua merupakan bentuk upaya pengendalian mispersepsi yang terjadi antara pihak pemerintahan dan pihak pemberontak pasca penyerangan setelah persetujuan gencatan senjata. Kondisi konflik semakin memburuk dengan adanya penggunaan kekerasan yang semakin meningkat. Para mediator juga menilai upaya yang dilakukan selama ini

¹⁶⁷ Iiya Gridneff, "Fresh Figthing Breaks out in South Sudan"
<http://www.dailystar.com.lb/News/Middle-East/2014/Feb-18/247684-fresh-fighting-breaks-out-in-south-sudan.ashx> (diakses pada 12 desember 2012)

¹⁶⁸ Qinyen guo, 55

¹⁶⁹ Qinyen guo, 55

masih terbilang lambat dan memerlukan evaluasi kembali untuk mengupayakan kembali persetujuan gencatan senjata. Bagi Tiongkok momentum gencatan senjata merupakan momentum yang dinantikan hal ini berkaitan dengan kepentingan ekonomi Tiongkok yang memerlukan pasokan minyak dari Sudan Selatan. Adanya bentrokan menyebabkan distribusi minyak menjadi terhambat. Tiongkok mengalami kerugian sebesar 2 juta dolar setiap harinya di karenakan terhambatnya produksi minyak akibat konflik.

Pada 9 April 2014, Duta Besar Tiongkok, Ma Qiang mengadakan pertemuan dengan Menteri Luar Negeri Benyamin dari Sudan Selatan, membahas situasi di Sudan Selatan dan mencoba untuk mempromosikan *peace talk*. Situasi di Sudan Selatan setelah pelanggaran gencatan senjata semakin memburuk terlebih pihak pemberontak meminta anggota SPLM yang ditangkap segera dibebaskan. Pada bulan April juga terjadi pembantaian besar-besaran yang terjadi di Bentiu yang menewaskan 200 warga sipil yang beretnis dinka yang dibantai oleh pasukan bersenjata Nuer.¹⁷⁰ Kondisi konflik menunjukkan ketegangan yang tinggi antar kedua belah pihak sehingga pada tahap ini sulit untuk membangun kembali kepercayaan antara kedua belah pihak yang berseteru.

Tiongkok mulai menerapkan diplomasi proaktif dan responsif untuk mengatasi ketegangan yang terjadi.¹⁷¹ Hal ini disampaikan oleh salah satu utusan Tiongkok dalam beberapa perundingan dengan pihak-pihak yang terlibat. Penyelesaian konflik merupakan hal yang baru bagi Tiongkok sehingga dibutuhkan kehati-hatian dalam menangani kasus konflik sipil ini. Adanya

¹⁷⁰ James Copnall, "South Sudan rebels deny Bentiu slaughter accusation", BBC news, <https://www.bbc.com/news/world-africa-27108777> (diakses pada tanggal 19 desember 2018)

¹⁷¹ Drazen Jorgic, "China Take more Assertive line in South Sudan Diplomacy" Reuters: <https://www.reuters.com/article/us-southsudan-china-insight-idUSKBN0EG00320140605>(Diakses pada 19 sdesember 2018)

normalisasi hubungan antara kedua belah pihak menjadi kunci bagi Tiongkok sebagai *Third Party Intervention*. Pada perjanjian putaran kedua gencatan senjata, IGAD dan beberapa aktor lainnya seperti Uni Afrika, PBB, Tiongkok, Uni Eropa, AS, Inggris dan Norwegia berhasil mempertemukan kedua belah pihak pada forum mediasi kembali. Gencatan senjata kembali disepakati oleh kedua belah pihak. Berbeda dengan sebelumnya, persetujuan kali ini menggunakan tempo waktu untuk menandatangani yaitu kurang dari 24 jam dan masa percobaan gencatan senjata 30 hari.¹⁷² Namun berselang beberapa jam dari persetujuan gencatan senjata. Kedua belah pihak kembali melanggar gencatan senjata dan saling tuduh mengenai penyerang yang dilakukan oleh salah satu pihak.

Kegagalan melakukan perundingan damai antara kedua belah Pihak yang berseteru dan pelanggaran terhadap kesepakatan gencatan pada putaran kedua proses perdamaian yang tengah berlangsung tentunya menjadi bahan evaluasi bagi para mediator termasuk Tiongkok. Proses perdamaian yang telah diusahakan tidak didukung oleh proses saling percaya antara pihak pemerintah dan pihak pemberontak.

Kondisi konflik sipil di Sudan Selatan telah banyak memakan korban jiwa yang kebanyakan merupakan penduduk sipil, perang yang telah terjadi lebih dari 5 bulan ini telah membuat kelaparan dan kemiskinan serta membuat lebih dari 3.000 penduduk kehilangan tempat tinggal.¹⁷³ Bagi negara Tiongkok kondisi konflik ini harus dapat dikendalikan. Konflik dengan tindak kekerasan yang tinggi yang cenderung bersifat merusak. Upaya yang dilakukan Tiongkok sebagai

¹⁷² BBC, "South Sudan rivals Kiir and Machar agree peace deal, BBC News; <https://www.bbc.com/news/world-africa-27352902#> (Diakses pada tanggal 12 desember 2018).

¹⁷³ VOA, "South Sudanese Forces Blamed for Torching Thousands of Homes", VO news, <https://www.voanews.com/a/south-sudanese-forces-blamed-torching-thousands-homes/3790837.html> (Diakses pada tanggal 18 september 2018).

bentuk konsistensi terhadap penyelesaian masalah ini adalah Perwakilan Khusus Tiongkok, Zhong Jianhua melakukan pertemuan formal dengan kepala mediator IGAD untuk perundingan perdamaian Sudan Selatan, Seyoum Mesfin, dan negosiator dari sisi pemberontak Taban Deng Gai, membahas situasi saat ini dan proses mediasi di Selatan Sudan. Pihak-pihak tersebut melakukan pertemuan di Ethiopia pada 24 september 2014.¹⁷⁴

Dari praktik konsultasi di atas dapat dilihat bahwa tindakan konsultasi tidak memberikan dampak signifikan terhadap perdamaian dalam kondisi konflik seperti pada tingkatan *destruction*. Pada tingkatan ini seharusnya Tiongkok melakukan tindakan intervensi *peacekeeping* sebagai bentuk pengendalian kekerasan yang terjadi seperti yang dijelaskan sebelumnya. praktik konsultasi ini bisa digunakan pada tingkatan *segregation* dimana tingkat kekerasan hanya berupa ancaman dari kedua belah pihak.

c. Upaya Power Mediation Tiongkok

Setelah upaya mediasi yang dilakukan oleh Tiongkok tidak membawa dampak yang signifikan terhadap perdamaian. Selanjutnya Tiongkok melakukan tindakan intervensi yang sedikit lebih memaksa dari sebelumnya. Tiongkok mengupayakan mediasi dengan memaksa kedua belah pihak. Hal ini dapat dilihat dari Tiongkok mengupayakan Salva Kiir dan Riek Machar, untuk menandatangani perjanjian gencatan senjata. Poin utama Tiongkok dalam upaya mediasi dan diskusi bilateral dengan kedua belah pihak adalah permintaan untuk melindungi aset dan investasi ekonomi. Tentara Pembebasan Rakyat (SPLA) mengumumkan pada 16 Januari 2015 bahwa ladang minyak bawah kendali penuh

¹⁷⁴ Qinyen guo,55

SPLA dan komando umum meyakinkan perusahaan-perusahaan minyak di Adar dan Faluj bahwa perlindungan perusahaan 100%.¹⁷⁵

Hasil perjanjian tersebut adalah respons terhadap tekanan dari Tiongkok, yang menuntut jaminan terhadap perusahaannya. Mariel Benjamin menyatakan bahwa Sudan Selatan berkomitmen untuk melindungi para pekerja dan aset.¹⁷⁶ Menurut Menteri Informasi Sudan Selatan, Michael Makuei Leuth, pertemuan itu diprakarsai oleh Tiongkok dan dihadiri oleh para anggota dari pihak pemberontak yang dipimpin oleh mantan presiden Riek Machar.¹⁷⁷ Setelah pertemuan, Barnaba Marial Benjamin mengatakan kepada media bahwa Tiongkok menginginkan jaminan bahwa perusahaan-perusahaan minyak.¹⁷⁸

Pada tanggal 27 Januari 2015, selama KTT Uni Afrika (AU) di Ethiopia, Wakil Menteri Luar Negeri Zhang Ming melakukan mediasi antara kedua belah pihak mengenai masalah termasuk proses perdamaian di Sudan Selatan. Xie Xiaoyan, Duta Besar Tiongkok untuk Ethiopia dan Duta Besar untuk Uni Afrika, hadir pada pertemuan tersebut.¹⁷⁹



¹⁷⁵ Qinyen guo, 55

¹⁷⁶ Obert Hodzi, 5-11

¹⁷⁷ Obert Hodzi, 8

¹⁷⁸ Obert hodzi, 6

¹⁷⁹ Ministry of Foreign Affairs Of the People's Republic of China" Vice Foreign Minister Zhang Ming Meets with President Salva Kiir Mayardit and Opposition Leader Riek Machar of South Sudan," Ministry of Foreign Affairs Of the People's Republic of China, https://www.fmprc.gov.cn/mfa_eng/wjbxw/t1233450.shtml (Diakses pada 4 januari 2019).



Gambar 4.3 Mediasi Tiongkok dengan pihak pemerintah dan pemberontak

Sumber: *Ministry of Foreign Affairs the People's Republic of China, 2015*

Wakil Menteri Luar Negeri Zhang Ming memberi pengarahan kepada kedua belah pihak tentang kehadiran Menteri Luar Negeri Wang Yi mengenai Konsultasi Khusus dalam Mendukung Proses Perdamaian Sudan Selatan yang dipimpin IGAD yang diusulkan oleh Tiongkok serta kontribusi dan upaya Tiongkok dalam mempromosikan proses perdamaian di Sudan Selatan. Zhang Ming¹⁸⁰ juga mendesak pihak-pihak yang bertikai di Sudan Selatan untuk sungguh-sungguh mengimplementasikan berbagai perjanjian yang ditandatangani. Perjanjian tersebut menghasilkan konsensus yang meliputi pandangan untuk kepentingan negara dan rakyatnya, gencatan senjata, mempercepat langkah dalam mendorong perdamaian.¹⁸¹ negosiasi untuk kemajuan, membentuk pemerintahan

¹⁸⁰ FOCA," Vice Foreign Minister Zhang Ming Meets with Minister in the Office of the President Awan Riak of South Sudan," FOCA, https://www.focac.org/eng/zfgx_4/zzjw/t1177692.htm (Diakses pada tanggal 04 januari)

¹⁸¹ Ministry of Foreign Affairs Of the People's Republic of China," Vice Foreign Minister Zhang Ming Meets with President Salva Kiir Mayardit and Opposition Leader Riek Machar of South Sudan," Ministry of Foreign Affairs Of the People's Republic of China, https://www.fmprc.gov.cn/mfa_eng/wjbxw/t1233450.shtml (Diakses pada 4 januari 2019).

transisi pada tanggal awal dan mempromosikan Sudan Selatan untuk pemulihan awal perdamaian dan stabilitas.¹⁸²

Pada tanggal 17 agustus 2015 telah tercapai perjanjian permanen mengenai resolusi konflik sipil di Sudan Selatan. *Agreement on The Resolution Of The Conflict in The Republic Of South Sudan*. Dalam perjanjian ini disepakati perjanjian gencatan senjata yang permanen. Pada bab 2 perjanjian gencatan senjata ini terdapat bab yang menjelaskan gencatan senjata dan beberapa tindakan yang tidak boleh dilakukan oleh kedua belah pihak. Pertama tindakan yang dapat menghambat atau menunda pemberian bantuan kemanusiaan, atau perlindungan bagi warga sipil, dan membatasi pergerakan orang secara bebas.¹⁸³ Kedua tindakan dan bentuk kekerasan seksual dan berbasis gender, termasuk eksploitasi dan pelecehan seksual. Ketiga Perekrutan atau penggunaan tentara anak-anak oleh angkatan bersenjata atau milisi yang bertentangan dengan konvensi internasional, tindakan ofensif, provokatif atau tindakan balas dendam. Ini merupakan hasil yang baik dari gencatan senjata yang telah dilakukan sebelumnya. gencatan senjata sebelumnya hanya bertahan beberapa jam setelah penandatanganan. Perjanjian gencatan senjata permanen ini menjadi keberhasilan mediator dalam mengupayakan perdamaian.

Setelah menandatangani perjanjian perdamaian pada agustus 2015. Pihak pemberontak mengadakan serang dan merusak 1.900 rumah di kawasan Central Equatoria sejak September. Hal ini dilakukan oleh pihak pemberontak sebagai

¹⁸² Ministry of Foreign Affairs Of the People's Republic of China," Vice Foreign Minister Zhang Ming Meets with President Salva Kiir Mayardit and Opposition Leader Riek Machar of South Sudan," Ministry of Foreign Affairs Of the People's Republic of China," https://www.fmprc.gov.cn/mfa_eng/wjbxw/t1233450.shtml (Diakses pada 4 januari 2019).

¹⁸³ UNMISS," Agreement On The Resolution Of The Conflict In The Republic Of South Sudan,"UNMISS, 2015

respon terhadap kebijakan yang dilakukan oleh presiden Salva Kiir.¹⁸⁴ Setelah kesepakatan damai presiden Salva Kiir mengeluarkan perintah untuk menggambar ulang batas-batas internal negara itu, meningkatkan jumlah negara dari 10 menjadi 28.¹⁸⁵ Hal ini tentunya memicu pertikaian batas terhadap wilayah kekuasaan dari kedua belah pihak. Bagi pihak pemberontak hal ini dianggap sebagai perampasan terhadap wilayah kekuasaan oleh pihak pemerintah. Pihak pemberontak melakukan serangan balasan yang menargetkan wilayah Central Equatoria.¹⁸⁶

Gencatan senjata yang kembali diupayakan oleh Tiongkok kembali dilanggar oleh kedua belah pihak. Hal ini dikarenakan Tiongkok belum dapat menyakinkan kedua belah pihak untuk memperhitungkan dampak yang ditimbulkan akibat adanya kekerasan yang terjadi dari konflik sipil. Rendahnya kepatuhan akan perjanjian membuat kedua belah pihak dengan mudahnya melanggar gencatan senjata meskipun telah dibuat badan pengawas perjanjian. Seperti yang telah dijelaskan pada bagian sebelumnya bahwa ketika tingkatan *destruction* maka intervensi yang dilakukan menurut *model contingency* merupakan intervensi *peacekeeping* dengan mendorong adanya arbitrase dan konsultasi kepada kedua belah pihak selanjutnya pada tingkatan ini *intervener* juga disarankan untuk memberikan bantuan pembangunan (*development aid*) untuk mengatasi dampak kesenjangan yang terjadi akibat adanya konflik. Setelah

¹⁸⁴ VOA, "South Sudanese Forces Blamed for Torching Thousands of Homes", VO news, <https://www.voanews.com/a/south-sudanese-forces-blamed-torching-thousands-homes/3790837.html> (diakses pada tanggal 18 september 2018).

¹⁸⁵ Chen, H., Liao, H., Tang, B. J., & Wei, Y. M. "Impacts of OPEC's political risk on the international crude oil prices: An empirical analysis based on the SVAR models". *Energy Economics*, 57, 2015 :42-49

¹⁸⁶ VOA, "South Sudanese Forces Blamed for Torching Thousands of Homes", VO news, <https://www.voanews.com/a/south-sudanese-forces-blamed-torching-thousands-homes/3790837.html> (diakses pada tanggal 18 september 2018).

kondisi membaik maka kedua belah pihak diarahkan kembali proses perdamaian lebih lanjut sesuai dengan *model contingency* yang disarankan.

d. Upaya *Peacekeeping* Tiongkok

Setelah melakukan upaya intervensi yang bersifat diplomasi pada awal terjadinya konflik hingga konflik telah memasuki tingkatan kehancuran. Baru lah pada april 2015 Tiongkok mengirim satu batalion dengan 7000 pasukan perdamaian PBB untuk mengatasi konflik sipil yang cenderung menggunakan kekerasan.¹⁸⁷ Hal ini juga sebagai respon pelanggaran kembali gencatan senjata pada Januari 2015 dan adanya kondisi yang diprediksi oleh PBB akan adanya genosida.¹⁸⁸ Pecahnya bentrokan kedua pada tahun 2016 menyebabkan 2 anggota penjaga perdamaian Tiongkok terbunuh.¹⁸⁹ Hal ini menjadi perhatian khusus mengenai ancaman kekerasan di Sudan Selatan telah mengancam pekerja penjaga perdamaian. Kondisi konflik yang rawan terhadap penggunaan kekerasan.

Tindakan Tiongkok melakukan *peacekeeping* ini merupakan operasi penjaga perdamaian besar pertama yang dilakukan oleh pasukan penjaga perdamaian dari Tiongkok. Pasukan perdamaian ini telah mengendalikan kekerasan yang terjadi di Sudan selatan ini berdasarkan dengan pernyataan dari Uni Afrika.¹⁹⁰

Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya tindakan *peacekeeping* ini merupakan intervensi yang disarankan dalam tingkatan *destructions* hal ini

¹⁸⁷ Aleu Garang,” 15

¹⁸⁸ VOA,” South Sudanese Forces Blamed for Torching Thousands of Homes”,VO news, <https://www.voanews.com/a/south-sudanese-forces-blamed-torching-thousands-homes/3790837.html> (diakses pada tanggal 18 september 2018).

¹⁸⁹ BBC,” South Sudan: Heavy gunfire following death of soldiers,”BBC, <https://www.bbc.com/news/world-africa-36744636> (Diakses pada 4 januari 2018)

¹⁹⁰ Sudan Tribune,” South government, rebels sign ceasefire agreement. Sudan Tribun, <http://www.sudantribune.com/spip.php?article49693> (Diakses pada 4 januri 2018).

bertujuan untuk mengendalikan kekerasan yang ada walaupun kondisi dan situasi konflik sangat sulit dikendalikan. *Peacekeeping* adalah langkah awal yang baik dalam membangun stabilitas di daerah konflik dan membantu mengarahkan kedua belah pihak untuk melakukan gencatan senjata.

e. Development Aid Tiongkok

Pemberian bantuan pada tahap *Destruction* ini bertujuan untuk mengurangi dampak dari distribusi bahan pangan yang tidak merata akibat adanya konflik sipil ini. Pemberian bantuan juga bertujuan mengatasi mengatasi kesenjangan struktural yang terjadi akibat konflik. Kondisi konflik setelah pelanggaran gencatan senjata pada tahun 2016 membuat banyaknya warga sipil Sudan Selatan yang menjadi korban dalam konflik bersenjata di ibu kota juba, hal ini menyebabkan 300 tewas dan ribuan lainnya mencari suaka ke negara-negara sekitar Sudan Selatan. Dalam kondisi demikian, Pemerintah Tiongkok memberikan bantuan kemanusiaan ke Sudan Selatan, termasuk 8.750 ton beras untuk memerangi kelaparan dan 1 juta dolar AS untuk memberantas kolera.¹⁹¹ Selain bantuan kepada pemerintah Sudan Selatan, Tiongkok juga menyumbangkan 10 juta dolar AS untuk Program Pangan Dunia (WFP), dengan 5 juta dolar AS untuk penyediaan bantuan makanan ke Sudan Selatan dan 5 juta dolar AS lainnya untuk meringankan beban pasokan makanan untuk para pengungsi dari Sudan Selatan dan Somalia di Kenya. Perjanjian yang relevan dengan WFP ditandatangani di Beijing pada 1 April 2017.¹⁹²

¹⁹¹ Ministry of Foreign Affairs the People's Republic of China,, "China Provides Humanitarian Aid to South Sudan, Ministry of Foreign Affairs the People's Republic of China, https://www.fmprc.gov.cn/mfa_eng/wjb_663304/zwjg_665342/zwbd_665378/t1453571.shtml (Diakses pada 2 januari 2019).

¹⁹² Ministry of Foreign Affairs the People's Republic of China,, "China Provides Humanitarian Aid to South Sudan, Ministry of Foreign Affairs the People's Republic of China,

f. Konsultasi khusus dan mediasi Tiongkok untuk mendukung proses perdamaian

Setelah adanya *peacekeeping* yang dilakukan oleh Tiongkok, selanjutnya Tiongkok mulai memfasilitasi kedua belah pihak untuk mengadakan konsultasi khusus. Konsultasi ini berguna untuk menganalisis dampak yang terjadi akibat penggunaan kekerasan yang dilakukan oleh kedua belah pihak.

Pertemuan konsultasi khusus Tiongkok untuk mendukung proses perdamaian Sudan Selatan yang dipimpin IGAD di Khartoum, ibukota Sudan. Pertemuan tersebut berfokus pada kebutuhan mendesak untuk mengakhiri konflik di Sudan Selatan. Konsultasi tersebut menunjukkan komitmen baru yang ditegaskan kembali oleh perwakilan dari Pemerintah Republik Sudan Selatan dan (SPLM-IO).

Pertemuan berlangsung untuk membantu pihak yang berkonflik mengupayakan proses perdamaian yang dipimpin IGAD menjadi satu-satunya jalan keluar dari krisis. Pertemuan dihadiri oleh Menteri Luar Negeri Sudan Ali Karti, Menteri Luar Negeri Ethiopia dan Ketua Dewan Menteri IGAD saat ini, Dr. Tedros Adhanom, dan Menteri Luar Negeri China, Wang Yi.¹⁹³ Pemerintah Sudan Selatan diwakili oleh Menteri Luar Negeri dan Kerjasama Internasional, Barnaba Marial Benjamin, dan SPLM-IO dipimpin oleh Ketua negosiatornya, Taban Deng Gai. Hadir pula Utusan Khusus IGAD termasuk Duta Besar Seyoum Mesfin dari Ethiopia, Jenderal Sumbiyo dari Kenya dan Mohammed El-Daby dari Sudan. Menteri Luar Negeri Sudan Ali Karti memberikan pengarahan kepada media pada

https://www.fmprc.gov.cn/mfa_eng/wjb_663304/zwjg_665342/zwbd_665378/t1453571.shtml (Diakses pada 2 januari 2019).

¹⁹³ South Sudan Tribune, "South Sudan's Security Arrangements Agreement," South Sudan Tribune, <http://www.sudantribune.com/spip.php?article65805> (Diakses pada 26 desember 2018)

akhir pertemuan dan mencatat bahwa konsultasi khusus untuk mendukung proses perdamaian Sudan Selatan.¹⁹⁴ Penghentian perjanjian permusuhan dan bekerja bersama dalam naungan proses mediasi yang dipimpin IGAD untuk membungkam senjata dan menghentikan perang. Menteri Luar Negeri Wang Yi mencatat bahwa Tiongkok tetap meraih keberhasilan proses mediasi perdamaian yang dipimpin IGAD sejak dimulainya konflik mengutip bahwa Wang Yi mengadakan pembicaraan dengan perwakilan dari dua pihak yang bertikai di Sudan Selatan selama empat kali.

Gencatan senjata sebelumnya yang dilanggar oleh kedua belah pihak telah membuat mediator telah mempelajari bagaimana membuat proses perdamaian dapat berjalan dengan semestinya. Sebelumnya Tiongkok dan IGAD+ hanya sebagai mediator yang menjadi penengah pihak yang berselisih namun mengingat kondisi konflik telah memasuki tahapan kehancuran maka tindakan mediasi yang dilakukan tidaklah cukup untuk mengatasi permasalahan yang ada. Untuk itu tindakan intervensi berupa arbitrase sangat dibutuhkan untuk mendorong pihak-pihak yang bersengketa untuk menyetujui kesepakatan yang gencatan senjata. Sebelumnya tahapan mediasi dan negosiasi yang dilakukan oleh Tiongkok sangatlah dipengaruhi oleh pemerintah Sudan Selatan. barulah pada pada tahun 2018 Tiongkok dan IGAD+ mengupayakan tindakan intervensi arbitrase untuk lebih menjamin proses perdamaian tetap dalam rencana. *Revitalised Agreement on the Conflict in the Republic of South Sudan* menjadi bentuk keberhasilan proses

¹⁹⁴ XinHuanet,” China optimistic revitalized peace deal will hold in South Sudan: diplomat, (http://www.xinhuanet.com/english/2018-12/05/c_137653229.htm (Diakses pada 26 desember 2018))

perdamaian yang dilakukan oleh IGAD, Tiongkok dan Amerika Serikat dan Uni Eropa.¹⁹⁵



¹⁹⁵ Ministry of Foreign Affairs the People's Republic of China,, "China Provides Humanitarian Aid to South Sudan, Ministry of Foreign Affairs the People's Republic of China, https://www.fmprc.gov.cn/mfa_eng/wjb_663304/zwjg_665342/zwbd_665378/t1453571.shtml (Diakses pada 2 januri 2019).

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Sudan Selatan muncul pada tahun 2011 sebagai negara yang paling baru di dunia. Negara Sudan Selatan resmi menjadi negara yang berdaulat setelah adanya perjanjian damai (Compromise Peace Agreement) antara Sudan People's Liberation Army (SPLA) atau gerakan pembebasan rakyat Sudan dengan Pemerintah Sudan untuk mengakhiri perang selama 40 tahun. Namun setelah kemerdekaan, Sudan Selatan harus menghadapi permasalahan baru di tingkat internal negara. Dua tahun setelah kemerdekaan Sudan Selatan tepatnya pada desember 2013 terjadi pemberontakan yang dilakukan oleh sekelompok orang yang tergabung dalam gerakan Sudan' People Liberation Movement- In Opposition SPLM-IO yang melawan pemerintahan presiden Salva Kiir.

Salah satu negara yang dirugikan dengan adanya perang sipil ini adalah negara Tiongkok. Tiongkok memiliki investasi yang bernilai tinggi di Sudan Selatan. Salah satu investasi Tiongkok di Sudan Selatan adalah perusahaan minyak China National Petroleum Corp. Adanya perang sipil menghambat penjualan dan produksi minyak sehingga Tiongkok harus melakukan tindakan untuk menghentikan perang sipil di Sudan Selatan.

Hubungan Tiongkok dengan Sudan Selatan telah berjalan bahkan sejak Sudan Selatan belum menjadi negara yang merdeka. Potensi yang dimiliki oleh Sudan Selatan dalam bidang sumber daya alam dan letaknya yang strategis di membuat negara Tiongkok memiliki ketertarikan tersendiri dalam menjalin

kerjasama dengan Sudan Selatan. Konflik Sipil di Sudan Selatan telah menarik perhatian Tiongkok untuk berperan aktif dan menjadi aktor sentral dalam upaya perdamaian. Keikutsertaan Tiongkok pada konflik sipil ini merupakan sebuah transformasi kebijakan Tiongkok yang sebelumnya sangat kaku. Transformasi kebijakan luar negeri yang proaktif dalam proses perdamaian ini telah dimulai sejak konflik sipil di Sudan dan berlanjut ke kawasan Afrika Sub-Sahara. ini telah menjadi studi kasus yang penting dalam evolusi kebijakan luar negeri Tiongkok secara global. Pandangan mengenai peran besar Tiongkok di Sudan Selatan telah ada sebelum konflik sipil meletus pada tahun 2013. Salah satu kajian mengenai analisis peran Tiongkok ialah Sudan Selatan sebagai tempat uji coba untuk diplomasi proaktif. Bahkan telah diperdebatkan bahwa peran Tiongkok di Sudan Selatan saat ini akan menjadi gambaran bagaimana hubungan Tiongkok di masa depan dengan negara-negara di kawasan Afrika Sub Sahara. Hal ini terlihat dalam pendapat beberapa ahli bahwa Tiongkok menggunakan pendekatan yang lebih tegas untuk melindungi kepentingannya di Sudan Selatan akan menjadi citra baru Tiongkok di sistem internasional.

]Adapun peran serta Tiongkok di konflik sipil Sudan Selatan adalah sebagai Third Party Intervener dalam upaya menyelesaikan menjadi mediator atau penengah dalam konflik tersebut. Ini merupakan hal yang baru bagi Tiongkok dimana sebelumnya Tiongkok belum pernah menangani kasus konflik sipil yang berfokus pada proses perdamaian. Tindakan Yang dilakukan Tiongkok di Sudan selatan dapat dilihat dari model contingency yang merupakan bagian dari Third Party Intervention.

Model contingency bertujuan untuk mengidentifikasi empat tahap dalam eskalasi konflik pada third party intervention yakni Discussion, Polarisation Segregation, Destruction Tahapan eskalasi tersebut dipengaruhi oleh sifat komunikasi dan interaksi antara para pihak, persepsi pihak-pihak terhadap pihak lain dan hubungan keberpihakan. Intervener nantinya akan melihat kondisi konflik berdasarkan kondisi konflik, nantinya intervener akan mengidentifikasi tahapan atau tahapan mana yang akan diambil dalam upaya menyelesaikan konflik tersebut.

Dari data yang didapat oleh peneliti. Praktik intervensi yang dilakukan oleh Tiongkok pada konflik sipil di Sudan Selatan mengalami keberhasilan namun sebelum itu Tiongkok mengupayakan tindakan intervensi yang tidak disarankan oleh model contingency. Hal ini seperti yang dijelaskan diatas bahwa model contingency memberikan model eskalasi konflik dimana menghubungkan tindakan intervensi yang sesuai dengan kondisi konflik yang ada. Sebagai negara baru yang melakukan intervensi dalam mengupayakan peacemaking hal ini tentunya memerlukan pengalaman-pengalaman yang didapat selama mengadakan proses perdamaian. Hal ini dapat dilihat pada awal Tiongkok mengintervensi Sudan Selatan. Tiongkok menggunakan tipe-tipe intervensi yang berfokus pada proses dan minim terhadap kontrol keputusan. Tiongkok mengupayakan negosiasi ketika tingkatan eskalasi konflik Discussion. Namun upaya Tiongkok mengalami kegagalan dan situasi konflik beralih pada tingkatan Destruction atau tingkatan kehancuran dimana kondisi terendah konflik dengan penggunaan kekerasan dari kedua belah pihak. Pada kondisi yang demikian seharusnya intervener mengambil tindakan intervensi dengan jenis intervensi peacekeeping dimana bertujuan untuk



mengontrol kekerasan yang terjadi serta mendorong kestabilan pada kondisi konflik sehingga intervener dapat mengusahakan kembali konsultasi atau arbitrase sehingga dapat mendorong kedua belah pihak menyetujui gencatan senjata atau mendorong kedua belah pihak menyetujui perdamaian. Hal inilah yang disarankan oleh model contingency. Namun dalam prakteknya Tiongkok tidak melakukan hal demikian. Ketika konflik telah memasuki tingkatan Destruction, Tiongkok melakukan intervensi berupa mediasi dan konsultasi hal ini membuat kedua belah pihak menandatangani gencatan senjata namun perjanjian gencatan senjata tersebut tidak bertahan lama. Hal ini disebabkan oleh ketika tingkatan telah memasuki tingkatan terakhir dimana penggunaan senjata maksimal maka yang harus dilakukan intervener adalah mengendalikan kekerasan terlebih dahulu, kemudian barulah mendorong kedua belah pihak mengadakan konsultasi dan arbitrase.

Tindakan Tiongkok selanjutnya juga tidak sesuai dengan apa yang dianjurkan oleh model contingency, sehingga perjanjian gencatan senjata juga tidak bertahan lama seperti yang diusahakan oleh Tiongkok sebelumnya. barulah pada tahun 2015 Tiongkok mulai melakukan intervensi yang bersifat peacekeeping dimana Tiongkok mengirimkan pasukan penjaga perdamaian dan mulai mengontrol kekerasan yang terjadi di konflik. Kemudian ketika kondisi memungkinkan untuk melanjutkan proses perdamaian, Tiongkok mulai mendorong kedua belah pihak untuk melakukan konsultasi khusus untuk menganalisis permasalahan kedua belah pihak dalam konflik sipil ini. Kemudian upaya-upaya Tiongkok juga didukung oleh IGAD+ mengupayakan kembali mediasi dan berhasil membuat kedua belah pihak yang berseteru menandatangani

gencatan senjata yang lebih permanen. Tindakan intervensi Tiongkok yang dimulai dari adanya intervensi peacekeeping merupakan tindakan yang sesuai dengan apa yang harus dilakukan intervensi dalam intervensi pihak ketiga. Selanjutnya Tindakan Tiongkok yang mendorong adanya konsultasi dan arbitrase juga merupakan tindakan intervensi yang seharusnya dilakukan intervensi sesuai dengan model contingency. hal inilah yang membuat Tiongkok berhasil membuat kedua belah pihak menyetujui gencatan senjata yang lebih permanen dari sebelumnya. hal ini menjadi menarik dikarenakan model contingency telah menawarkan model eskalasi konflik yang efektif dalam membuat perdamaian. sebelumnya tindakan Tiongkok belum sesuai dengan model contingency namun ketika tindakan Tiongkok sesuai dengan model contingency, intervensi yang dilakukan Tiongkok menghasilkan gencatan senjata yang permanen. Ini dapat menjadi bukti bagaimana efektifnya model contingency yang dilakukan pihak ketiga dalam mengintervensi konflik sipil.

5.2 Saran

Penggunaan Model Contingency sebagai tahap eskalasi konflik pada Third Party Intervention masih terbilang jarang. Walaupun demikian Model Contingency sangat membantu dalam menganalisis tipe intervensi yang dilakukan oleh sebuah negara salah satunya Tiongkok pada konflik sipil di Sudan Selatan. Tiongkok melakukan Intervensi ke Sudan Selatan dimulai pada tahun 2013 hingga saat ini. Namun penulis hanya membatasi permasalahan hanya pada tahun 2016 dimana Tiongkok berhasil membuat perjanjian gencatan senjata antara pihak pemberontak dan pihak pemerintah. Diharapkan peneliti selanjutnya dapat menganalisis tindakan intervensi yang dilakukan Tiongkok hingga pada tahun

terkini. Tindakan intervensi yang dilakukan Tiongkok ini juga merupakan hal yang baru sehingga diperlukan evaluasi yang lebih mendalam mengenai keberhasilan Tiongkok dalam mengintervensi sebagai upaya penyelesaian konflik.

Peneliti menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna. Salah satu penyebabnya disebabkan oleh keterbatasan data yang peneliti hadapi. Namun, Peneliti telah berusaha untuk menyajikan penelitian ini sebaik yang bisa peneliti dilakukan dan mengharapkan hasil dari penelitian ini dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan penelitian dengan topik terkait.



DAFTAR PUSTAKA

- Anderson, Liam. "Ethnofederalism and the Management of Ethnic Conflict: Assesing the Alternatives," *The Journal of Federalism*, 46, no.1, 1 January 2016.
- Acaps."South Sudan: Country Profile", <https://www.acaps.org/country/south-sudan/country-profile> Acaps(diakses pada 12 desember 2018).
- Aljazeera. "South Sudan Loses control of key oil-rich city, ALJAZEERA <https://www.aljazeera.com/news/africa/2013/12/envoys-head-south-sudan-as-fighting-rages-20131222112124655142.html>. (diakses pada 20 desember 2018)
- Aljazeera,"South Sudan violence spreads from capital" Aljazeera: <https://www.aljazeera.com/video/africa/2013/12/south-sudan-violence-spreads-from-capital-20131218123217186850.html> (Diakses pada 20 november 2018)
- Aljazeera." South Sudan Loses control of key oil-rich city, ALJAZEERA <https://www.aljazeera.com/news/africa/2013/12/envoys-head-south-sudan-as-fighting-rages-20131222112124655142.html> (diakses 25 oktober 2018).
- Aris, Stephen. "One Belt, One Road : China's Vision of Connetivity" *CSS Analyses in Security Policy No. 195, Sept 2016*.
- Aly Verjee, "Explaining China's involvement in the South Sudan peace process"lowy institute; <https://www.lowyinstitute.org/the-interpreter/explaining-chinas-involvement-south-sudan-peace-process> (diakses pada tanggal 12 desember 2018).
- Aziza Geleta Dessalegn,"Cause and Consequence of Conflict in South Sudan," *Internasional Joutnal of Political Science and Development* 50, no.40 (Januari 2017): 17.
- Bacchi, Umberto. "U.N. Agency pulss staff from parts of South Sudan due safety fears",
- REUTERS <https://www.reuters.com/article/us-southsudan-violence-aid/u-n-agency-pulls-staff-from-parts-of-south-sudan-due-safety-fears-idUSKBN17M2B2>.
- BBC," South Sudan rivals Kiir and Machar agree peace deal, BBC News; <https://www.bbc.com/news/world-africa-27352902#> (diakses pada tanggal 12 desember 2018).
- Barnicle, Jeremy et al. "Securing Peace: An Action Strategy for Sri Lanka", A Report Prepared by the Workshop on Post- Conflict Reconstruction Woodrow

Wilson School of Public and International Affairs, Princeton University for the Center for Strategic and International Studies (CSIS).

Bondevik, K. M. (2000) 'Statsministerens nyttårstale årsskiftet 1999/2000' <http://www.regjeringen.no/nb/dokumentarkiv/Regjeringen-Bondevik-I/234245/>

Chen, H., Liao, H., Tang, B. J., & Wei, Y. M. "Impacts of OPEC's political risk on the international crude oil prices: An empirical analysis based on the SVAR models". *Energy Economics*, 57, 2015 :42-49

Ching-chiu hang dan Chin-yu Shih , *Harmonious Interventions s: China's Quest for Relationl Security* London: Routledge, 2014.

China Internet Information Center." The Common Program of the Chinese People's Political Consultative Conference "China's People Daliy" <http://en.people.cn/china/19990914A128.html>

Cresswell, John W. *Fourt Edition Research Design, Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches*. Universitas Nebraska, Lincoln: Sage Publication, 2013.

Daniel Large. "China's Sudan Engagement: Changing Northern and Southern Political Trajectories in Peace and War" *The China Quarterly*, 199 (september 2009)

Dollar, David." China's Rise as a Regional and Global Power: The AIIB and The One Belt, One Road" *Journal of Internasional Relations and Sustainable Development*, No. 4, Summer 2015.

Drazen Jorgic," China Take more Assertive line in South Sudan Diplomacy" Reuters: <https://www.reuters.com/article/us-southsudan-china-insight-idUSKBN0EG00320140605> diakses pada 19 sdesember 2018

El wathing kameir "The political economy south sudan- A scoping analytical study", The African Development Bank report, 2011.

Erikson, Daniel P.; Chen, Janice "China, Taiwan, and the Battle for Latin America". *The Fletcher Forum of World Affairs* 2007 (31, number 2): 71.

Foster, Marcus. "Small States in Peacemaking Roles". Jackson School of International Studies. Ghosh, P.A. "Ethnic Conflict in Sri Lanka and Role of the Indian Peacekeeping Force(IPKF)".

Goodhand, Jonathan et all. "Aid, Conflict, and PeaceBuilding in Sri Lanka:2000-2005". *The Asia Foundation*. Vol.01, Six Part Series

Goldman ,Barry M., et all., "The psychology of conflict and conflict management in organizations [SIOP Frontiers Series], Chapter: The role of third-

parties/mediation in resolving conflict in organizations,” London:Lawrence Erlbaum, 2008.

Greig, J. M., dan Regan, P” When do they say yes? An analysis of the willingness to offer and accept mediation in civil war”, *International Studies Quarterly*, 52, no.4: 759-781.

Hannah McNelsh,”South Sudan’s Machar speaks to Al Jazeera”, *Aljazeera* <https://www.aljazeera.com/indepth/features/2013/12/south-sudan-machar-speaks-al-jazeera-2013121961331646865.html> (Diakses pada 24 november 2018).

James Copnall,” South Sudan rebels deny Bentiu slaughter accusation”, *BBC news*, <https://www.bbc.com/news/world-africa-27108777> (diakses pada tanggal 19 desember 2018)

Jason Burke.”South Sudan: is the renewed violence the restart of civil war?”,*the guardian*, <https://www.theguardian.com/world/2016/jul/12/south-sudan-is-the-renewed-violence-the-restart-of-civil-war> (diakses pada 13 september 2018).

Jason Hanna and Susanna Capelouto,”South Sudan, rebels reach cease-fire after weeks of fighting” *CNN*, <https://edition.cnn.com/2014/01/23/world/africa/south-sudan-ceasefire> (Diakses pada 23 desember 2018)

John Young.”Isolation and Endurance Riek Machar and the SPLM-IO”, *The Human Security Baseline Assesment (HSBA) report*, (october 2017).

Large, Daniel. ”China and South’s Civil war, 2013-2015”, *African Studies Quarterly* 16, no. 3-4 (Desember 2016).

Lauren Ploch Blinchard, “Conflict in South Sudan and the Challenges Ahead”, *Congressional Research Service*, 2016.

Iiya Garidneff ”Fresh Figthing Breaks out in South Sudan” <http://www.dailystar.com.lb/News/Middle-East/2014/Feb-18/247684-fresh-fighting-breaks-out-in-south-sudan.ashx> (diakses pada 12 desember 2012)

Miles,Matthew B. dan Micheal Huberman,”Qualitative Data Analysis : A Methods Sourcebook,” Thousand Oaks: SAGE Publications Inc, 2015

Ministry of Foreign Affairs of the People’s Republic of China ,” China's Initiation of the Five Principles of Peaceful Co-Existence,” [://www.fmprc.gov.cn/mfa_eng/ziliao_665539/3602_665543/3604_665547/t18053.shtml](http://www.fmprc.gov.cn/mfa_eng/ziliao_665539/3602_665543/3604_665547/t18053.shtml) (Diakses 23 september 2017)

Ministry of Foreign Affairs of People’s Republic of China, “Speech at the International Colloquium Commemorating the 60th Anniversary of the Five

Principles of Peaceful Coexistence”, Ministry of Foreign Affairs of People’s Republic of China
https://www.fmprc.gov.cn/mfa_eng/wjdt_665385/zyjh_665391/t1160366.shtml
(Diakses September,2017)

Monica Gheorghita,” China In The Un Security Council: The Dynamics of Change at The Beginning of a New Millenium,” Intitute for world economy – European Social fund, 2015.

Mumuni, M Sigli., "Chinas non-Interventions policy in Africa: Principle versus pragmatism”, African Journal of Political Science and International Relations 11, no. 9 2017.

Musaazi Namiti.”Analysis: Struggle for power in South Sudan”, Aljazeera:
<https://www.aljazeera.com/indepth/features/2013/12/analysis-struggle-power-south-sudan-20131217845861691.html> (Diakses pada 25 november 2018).

Paul D Anieri, “International Politics: Power and Purpose in Global Affairs, 2nd ed”, Boston: Wadsworth, 2012.

Putri Cahyani,” Analisis Konflik Sudan Selatan Pasca Rederendum Pemisahan Diri Sudan Selatan,” *Journal of Internsional Relations* , No. 4 2017

Liu, Xinru. *The Silk Road in World History*. New York: Oxford, 2010.

Luka Biong and pamela lomoro, laura james, rosalind marsden”Domestic and regional implication of the economic crisis in south sudan”, Chatham house the royal institute of internasional affairs – african program meeting. 2016.

Qingnye, Gou .”The Principle of Non-interference and China’s Role in International Conflict in the New Era China in Sudan and South Sudan, Syria, and Afghanistan”, Doctoral diss.,Lund University,2017.

Regan,M. Patrick. dan Aysegul Aydin, “Diplomacy and other Forms of Interventions : Combined Strategies and the Duration of Civil war”, Sage Journal 50, no. 5, (oktober 2016).

Ronald, J Fisher and Loreleigh Keashly . “The Potential Complementarity of Mediation and Consultation within a Contingency Model of Third party Interventions ”, in: Journal of Peace Research, 28, 1, (Ferbruary 1991)

Roselle, Laura dan Sharon Spray, Research and Writing in International Relations (London: Longman Pearson, 2008.

South Sudan Humanitarian Project,”Implications Of The Economic Crisis In South Sudan”, South Sudan Humanitarian Project Report, <Http://Southsudanhumanitarianproject.Com/Wp->

Content/Uploads/Sites/21/Formidable/346/Implications-Of-The-Economic-Crisis-In-South-Sudan (Diakses Pada 12 Desember 2018).

Sigli M. Mumuni, "Chinas non-Interventions policy in Africa: Principle versus pragmatism", African Journal of Political Science and International Relations 11, no. 9(2017).

United Nations Security Council,"Resolution 2127 (2013)" ,United Nation (diakses, Juli 2018) [https://undocs.org/S/RES/2127\(2013\)](https://undocs.org/S/RES/2127(2013)).

United Nations Security Council,"Resolution 2009 (2011)",United Nation (diakses, Juli 2018) [https://undocs.org/S/RES/2009\(2011\)](https://undocs.org/S/RES/2009(2011))

VOA," South Sudanese Forces Blamed for Torching Thousands of Homes",VO news, <https://www.voanews.com/a/south-sudanese-forces-blamed-torching-thousands-homes/3790837.html> (diakses pada tanggal 18 september 2018).

Waage danHilde Henriksen. "Peacebuilding is a Risky Business: Norway's Role in the Peace Process in the Middle East 1993", PRIO Report No. 01, 2004.

Yusa, Fatrakhul. "Peran Diaspora Tamil dalam Koflik Sri Lanka Tahun 2002-2010". Jurnal Analisis Hubungan Internasional. Universtas Airlangga Vol03.No3.

Ziro, Raphael Mwatela dan Zhao Changfeng, "Africa in China's'One Belt, One Road'Initiative: A Critical Analysis", IOSR-JHSS 21, no. 12 (Desember, 2016): 10-21.

_____"Conflict and Development: Development Assistance Strategy for Peace Building and Reconstruction in SriLanka". JBIC Institute Japan Bankfor International Cooperation. Research Paper No.24. A.P.H Publishing Corporation,1999.